



Radar Bali

Duo Kelian Dinas di Jembrana Dituntut 4,5 Tahun

DENPASAR – Tuntutan hukuman penjara lumayan tinggi diajukan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Jembrana terhadap Kelian Dinas Banjar Munduk Ranti, I Gede Astawa, 48 dan kelian Dinas Banjar Sari Kuning Tulungagung, I Dewa Ketut Artawan, 53. Duo kelian dinas dari Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, itu masing-masing dituntut penjara semalam 4,5 tahun.

JPU Gedion Ardana mewakili Jaksa Ivan Praditya Putra menilai dua kelian dinas tersebut bersalah mengorupsi dana santunan kematian Pemkab Jembrana tahun 2015. "Agar majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Gede Astawa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan (4,5 tahun) dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara," ujar JPU di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin (10/4).

Selain pidana badan, JPU juga meminta majelis hakim kepada majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila menjatuhkan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Selain itu, Astawa yang menjabat sebagai Kelian Dinas Banjar Munduk Ranti sejak tahun 2003 sampai tahun 2014 juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 32.700.000, atau harta bendanya disita atau diganti pidana penjara selama enam bulan.

Tuntutan pidana penjara dan denda yang sama juga dikenakan kepada terdakwa Artawan. Bedanya pada uang pengganti yang lebih besar, yakni Rp 70.400.000. Bila tak membayar, hartanya disita, atau dipidana penjara selama satu tahun.

JPU menilai kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan primer, yaitu Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menanggapi tuntutan JPU, masing-masing terdakwa melalui tim penasihat dari pos bantuan hukum (PBH) Peradi Denpasar akan mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis. "Kami minta waktu seminggu untuk menyampaikan pledoi, Yang Mulia," ujar Dewi Wulandari, salah satu pengacara terdakwa.

Seperti yang tertuang dalam dakwaan, kedua terdakwa mengajukan dana santunan kematian fiktif pada Dinas Kessosnakertrans Jembrana tahun 2015. Keduanya bekerja sama dengan Indah Suryaningsih (berkas terpisah), pegawai di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Jembrana. Dalam perkara ini juga melibatkan sejumlah kelian banjar di beberapa desa di Jembrana. Total anggaran santunan kematian dalam DPPA SKPD Dinkesosnakertrans tahun 2015 sebesar Rp 3.762.357.500 atau Rp 1,5 juta per warga yang meninggal. Dari santunan yang telah direalisasikan sebanyak 2.387 penerima senilai Rp 3,580 miliar, dan ada 301 berkas yang direkayasa (dokumen fiktif) dan diduplikasi untuk diajukan ulang. (san/yor)

Edisi : Kamis, 11 April 2019

Hal : 4.



Radar Bali

Kelompok Ternak Diberi Kandang Ayam Rp3,2 M

MANGUPURA - Pemerintah Kabupaten Badung terus menggelontor bantuan hibah ke masyarakat. Tidak hanya hibah pembangunan bale banjar dan pura, kini memberikan bantuan hibah untuk kandang ayam potong bagi satu kelompok masyarakat di Badung. Untuk satu kandang ayam, menghabiskan Rp 3,2 miliar yang nantinya diserahkan kepada kelompok ternak.

Kabid Produksi Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten

Badung I Gede Rama Bargawa menjelaskan, untuk pembangunan kandang ayam ini masih dalam proses lelang. Pagu anggaran Rp 3.250.958.174 yang diambil dari APBD 2019. Setelah pembangunan selesai, kemudian diserahkan kepada kelompok ternak. "Hibah ini (kandang ayam potong) diberikan kepada satu kelompok saja yakni Kelompok Jaya Mandiri Perkasa Banjar Tabah, Desa Taman, Abiansemal," terang Bargawa, Rabu (10/4) kemarin.

Secara terpisah Kepala Dinas

Perikanan Badung Putu Oka Swadiana menjelaskan, pemberian hibah ini untuk pemberdayaan peternak ayam di Badung sehingga dapat meningkatkan produksi. Seperti diketahui, populasi ayam pedaging di Badung naik 15 persen dari 611.503 ekor pada 2017 menjadi 703.962 ekor pada 2018. "Pemberian hibah ini tentu untuk meningkatkan produksi daging ayam di Badung," ungkapnya.

Selain itu konsep kandang ini juga dibuat bagus dan mewah

sehingga nanti bisa dijadikan objek studi banding oleh masyarakat. "Ya intinya ini menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kesejahteraan peternak di Badung," terangnya.

Begitu juga anggota DPRD Badung Nyoman Dirga Yusa asal Desa Taman, Abiansemal ini membenarkan bahwa ini adalah Kelompok yang mendapat hibah kandang ayam ini berasal dari Banjar Tabah, Desa Taman. Ia

meyakinkan bahwa kelompok ini bukan milik perorangan melainkan benar-benar kelompok. "Ini jauh dari fiktif. Ini benar-benar kelompok," jelas Dirga Yusa.

Dari penelusuran koran ini, bukan kali ini saja Kelompok Jaya Mandiri Perkasa mendapat bantuan hibah dari Pemkab Badung. Pada tahun 2017 lalu, kelompok ini juga mendapat hibah dari Pemkab Badung untuk ternak ayam buras senilai Rp25 juta. (dwi/yor)

Edisi : Kamis, 11 April 2019

Hal : 4



Keluarga Koruptor Protes

Klaim Barang Sitaan Negara Milik Mereka

SEMARAPURA- Kasus tindak pidana korupsi, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan mantan Bupati Klungkung periode tahun 2003-2008 dan tahun 2008-2013, I Wayan Candra kembali mencuat. Itu terjadi setelah dua kerabat Candra, I Nengah Nata Wisnaya dan I Ketut Rugeg asal Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan melayangkan gugatan kepada Kejaksaan Negeri Klungkung atas aset-aset yang menjadi barang sitaan negara. Atas adanya gugatan itu, Kejari Klungkung tidak hanya akan meladeni gugatan dua penggugat itu. Namun, kembali mempelajari kasus Candra untuk kemungkinan akan dilanjutkan.

Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Otto Sompotan didampingi Kasi Datun Kejari Klungkung, Cokorda Gede Agung Inrasunu dan Kasi Intel I Gusti Ngurah Anom Sukawinata saat dikonfirmasi di Kantor Kejari Klungkung, Rabu (10/4) membenarkan terkait gugatan yang dilakukan I Nengah Nata Wisnaya dan I Ketut Rugeg. "Benar, ada gugatan yang dilakukan dua penggugat tersebut," ungkapnya.

Gugatan itu berawal saat Kejari Klungkung berencana melakukan eksekusi terhadap 10 dari 51 bidang tanah beserta bangunan milik mantan Bupati Klungkung, I Wayan Candra menjadi barang rampasan negara atas kasus korupsi, gratifikasi, dan pencucian uang terkait pembangunan Dermaga Gunaksa yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Setelah rencana tersebut disiarkan oleh media masa, Nata dan Rugeg melakukan gugatan. Mereka berdua mengklaim sejumlah aset berupa tanah dan bangunan yang telah menjadi barang sitaan negara atas kasus Candra yang telah inkracht tersebut merupakan milik mereka. "Memang dokumen itu atas nama penggugat. Setiap warga negara berhak untuk mengajukan gugatan. Tetapi

yang menjadi tanda tanya, gugatannya kenapa baru sekarang saat kami akan eksekusi. Kenapa tidak pra-peradilan dari dulu, kenapa baru kami akan eksekusi dan muncul di berita baru menggugat. Kenapa?" ujarnya heran.

Atas gugatan tersebut, menurutnya Kejari Klungkung akan berjuang untuk mempertahankan barang yang kini berstatus barang rampasan negara tersebut. Apalagi pihaknya melihat bahwa pihak Candra kini berupaya untuk menyelamatkan aset-aset milik Candra tersebut dengan cara melakukan gugatan. "Dan kami tidak akan membiarkan barang yang sudah jadi barang milik negara kembali lagi kepada para koruptor. Tidak akan kami biarkan. Karena yang kami baca seperti itu. Masih ada upaya-upaya dari pihak Can-

dra untuk mengklaim kembali barang-barangnya yang sudah dirampas negara. Caranya dia dengan gugatan ini," katanya.

"Tidak hanya meladeni, lantaran adanya gugatan itu menurutnya Kejari Klungkung kembali mempelajari kasus Candra untuk kemungkinan akan kembali melanjutkannya. Bahkan, pihaknya mengancam tidak akan membiarkan orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut lolos dalam jeratan hukum. "Jadi siapa pun yang terkait di situ, tidak akan kami biarkan lolos. Kalau ada indikasi-indikasi pada saat zaman Pak Candra itu ada pihak-pihak yang bekerja sama menyamarkan harta benda yang patut dicurigai berasal dari tindak pidana maka dia tidak boleh lolos dari pertanggungjawaban pidana," terangnya

Lebih lanjut pihaknya mengungkapkan telah menargetkan akan mengeksekusi 10 bidang tanah dan bangunan milik mantan Bupati Klungkung, I Wayan Candra yang dirampas negara atas kasus korupsi, gratifikasi dan pencucian uang terkait pembangunan Dermaga Gunaksa di tahun 2019. "Besok (hari ini, Red) jadwal persidangannya dengan agenda Sidang Pembuktian Dokumen," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, 10 dari 51 bidang tanah beserta bangunan milik mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra yang dirampas negara atas kasus korupsi, gratifikasi dan pencucian uang terkait pembangunan Dermaga Gunaksa kini sedang dalam pengajuan proses lelang oleh Kejaksaan Negeri Klungkung. Sementara sisanya belum dapat diproses untuk dilelang lantaran batas-batas lahan yang disita negara tersebut belum jelas (baca juga grafis). (ayu/dot)

ASET YANG DISITA DARI WAYAN CANDRA:

- 10 bidang tanah dan bangunan
- Tanah seluas 9.450 meter persegi di Desa Bunga Mekar
- Tanah 10 ribu meter persegi di Desa Ped
- Tanah seluas 850 meter persegi di Desa Tojan
- Tanah seluas 14.200 meter persegi di Desa Dawan Kaler
- Tanah seluas 35 meter persegi beserta bangunannya di Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat
- Tanah seluas 12 meter persegi beserta bangunannya di Denpasar Barat
- Tanah seluas 47 meter persegi beserta bangunannya di Desa Dauh Puri Kauh
- Rumah di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra.

Edisi : Kamis, 11 April 2019

Hal : 12



Radar Bali

ASET

Penghitungan Aset IKM Celuk Belum Rampung

GIANYAR - Gedung Industri Kecil Menengah (IKM) di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, masih dibiarkan mangkrak. Gedung tersebut sempat dibongkar oleh sub kontraktornya karena belum membayar ongkos. Rencananya dihitung jumlah aset Pemkab. Akan tetapi, hingga kini penghitungan belum rampung.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Bappeda) Pemkab Gianyar, I Gede Widarma Suharta menyatakan hasil penghitungan dari konsultan pengawas belum diterima hingga saat ini. "Belum saya terima hasilnya, mungkin masih berproses," ujar Widarma yang juga Pelaksana Tugas Asisten II Setda Gianyar ini, kemarin (10/4).

Penghitungan dilakukan untuk memastikan sebanyak 77 persen dari 88 persen aset milik Pemkab Gianyar. Penghitungan dilakukan supaya jelas, bagian barang mana saja yang milik Pemkab. Itu karena pihak sub kontraktor yang mengeluh tidak dibayar bisa mengambil kelebihan proyek mereka. "Mudah-mudahan segera rampung agar bisa dipastikan 77 persen aset dari pada bangunan itu," ucapnya.

Apabila penghitungan ini berjalan cepat, maka proyek mangkrak itu bisa dilanjutkan lagi tahun 2019. Apalagi Pemkab Gianyar sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 928 juta pada APBD induk 2019 untuk melanjutkan pembangunan proyek yang tidak rampung pada 2018 itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pekerja melakukan pembongkaran gedung Industri Kecil Menengah (IKM) pada Senin lalu (25/3). Genteng yang sudah dipasang dicopoti karena pihak sub kontraktor mengeluh genteng mereka belum dibayar. **(dra/dot)**

Edisi : Kamis, 11, April, 2019

Hal : 7



Digelontorkan DD Rp 78 Miliar Lebih

Pemberdayaan Masyarakat Jadi Prioritas Program



Bali Post/kmb41

Komang Agus Sukasena

Kabupaten Karangasem tahun 2019 mendapatkan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat Rp 78.781.974.000.

Kucuran jumlah dana desa itu termasuk mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 64.239.619.000. Dengan dana sebesar itu, lalu di sektor manakah dijadikan prioritas pembangunan oleh pihak Pemkab itu?

KADIS DPMD Karangasem Komang Agus Sukasena, Selasa (9/4) kemarin mengungkapkan, bantuan

DD untuk Karangasem itu memang mengalami peningkatan dari tahun lalu. Peningkatan alokasi DD yang

diberikan itu merupakan kebijakan pemerintah pusat. Pada tahun 2019, Karangasem mendapatkan dana desa (DD) dari pemerintah pusat Rp 78.781.974.000. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang jumlah DD-nya Rp 64.239.619.000.

Untuk menyalurkan bantuan DD ke-78 desa yang tersebar di Karangasem itu, kata Sukasena nilainya tidak sama antara satu desa dengan desa lainnya. Penyaluran DD itu diberikan berdasarkan sejumlah indikator. Param-

bingung, karena membutuhkan waktu cukup lama untuk mencoblos. Sebagian besar warga mengaku kesulitan melihat gambar partai dan calegnya. Demikian juga tulisan pada surat suara, juga amat kecil-kecil. Ada juga yang mengaku kesulitan melipat kembali surat suaranya, karena ukurannya yang cukup besar.

Salah satu warga Wayan Rasni, mengakui sulit mencari nama caleg pilihannya, karena tulisannya dianggap terlalu kecil. Demikian juga Wayan Sarna, mengaku

warnanya. Padahal, sebelum memasukkan sudah dipandu oleh petugas PPS yang menjaga dan mengarahkan di sekitar kotak suara. Hasil ini sedikit menjadi catatan, di mana proses sosialisasi KPU belum mampu memberikan pemahaman sepenuhnya kepada masyarakat dalam teknis memilih. Ini pula yang menjadi kekhawatiran banyak pihak, dengan sistem pemilu serentak ini, karena masyarakat di desa-desa nampak belum siap dengan sistem pemilihan seperti itu. (kmb31)

losan.

Ketua KPU Klungkung Gusti Lanang Mega Saskara, Selasa (9/4) kemarin, mengatakan kecamatan yang pertama kali disasar adalah Nusa Penida. Proses distribusi logistik ke Nusa Penida akan dilakukan pada 14 April nanti, menggunakan truk, kemudian diangkut menggunakan Kapal Roro dari Pelabuhan Padangbai menuju Nusa Penida. Total logistik ke Nusa Penida dengan jumlah TPS 190, sebanyak 950 kotak suara (satu TPS lima kotak suara) yang

Edisi : Rabu, 10 April 2019

Hal : 11



Pengadaan Mobil Expander Semestinya Tak Jadi Prioritas

PEMKAB Gianyar menyerahkan puluhan unit mobil Expander untuk 63 desa di Kabupaten Gianyar, kecuali Desa Pejeng. Pengadaan 63 unit mobil nilainya belasan miliar rupiah itu diperoleh dari Bagi Hasil Pajak (BHP) daerah Kabupaten Gianyar. Pengadaan ini mendapat sorotan. Pasalnya, anggaran tersebut seharusnya bisa digunakan untuk program lain yang lebih prioritas.

Kepala Dinas PMD Gianyar Dewa Ngakan Ngurah Adi menerangkan, pembelian mobil yang menggunakan dana BHP sudah sesuai Perbup 141/2018 tentang pedoman pemberian bagi hasil pajak kepada pemerintah desa tahun 2019. Berdasarkan perbup itu, pemerintahan desa berkewajiban menganggarkan pengadaan mobil dan motor tersebut. "Bapak Bupati berani mewajibkan

karena sesuai perbup ini, karena mempertimbangkan BHP yang naik signifikan, yakni dari Rp 53 miliar menjadi Rp 72 miliar untuk desa tahun ini," jelasnya.

Akibat kebijakan ini, sejumlah desa ada yang menunda pembangunan infrastruktur, karena harus menganggarkan pembelian mobil. Menanggapi persoalan tersebut, Dewa Adi menyebutkan, untuk pembangunan infrastruktur itu bisa menggunakan alokasi dana selain BHP. "Misalnya Dana Desa dari pusat itu kan dipertukarkan khusus membangun infrastruktur, bisa pakai itu seharusnya," katanya.

Anggota DPRD Gianyar I.B. Nyoman Rai menilai program pengadaan mobil operasional desa ini seharusnya diadakan selektif. Sebab, setiap desa memiliki kebutuhan berbeda.

Misalnya pemberian dengan mempertimbangkan prestasi desa, sehingga dapat diberikan bertahap sebagai bentuk *reward*. "Makanya ini seharusnya disertai dengan kajian wilayah dan sosial masyarakat," katanya.

Satu-satunya desa yang tidak ikut beli mobil adalah Desa Pejeng Kaja. Perbekel Pejeng Kaja Tjokorda Gde Agung beralasan saat ini sedang mengerjakan program pengolahan sampah 3R. "Kita sedang menjalankan program pengolahan sampah yang lumayan perlu dana, sebab tempat pembuangan sampah kan kita tidak bisa lagi timbun di jurang atau dibuang ke sana-ke mari, apalagi masyarakat sendiri ingin lingkungan bersih dan sehat," jelasnya.

Rencana pembangunan tempat pengolahan sampah

tersebut pasti direalisasikan, karena sudah dianggarkan dalam APBDes. Selain itu, tahun ini pihaknya juga fokus dalam perbaikan infrastruktur jalan pada salah satu banjar di Desa Pejeng. "Ada satu sudut yang belum diaspal, beberapa kali dirancang tapi batal, tahun ini sudah pasti dikerjakan itu. Nah, kalau misalnya kami mengadakan mobil, dengan jalan masih rusak, kan ribut warga saya. Makanya pertimbangan kami ke sana, untuk mobil tahun depan masih bisa," tandasnya.

Sebelumnya, bertepatan dengan *Tilem Kadasa*, Kamis (4/4), Pemkab Gianyar menyerahkan kendaraan operasional untuk Pemerintah Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Gianyar. Hal 15 Serah Terima

Serah Terima

Dari Hal. 1

Sebanyak 63 mobil Expander dan 64 sepeda motor PCX diserahkan langsung Bupati Gianyar I Made Mahayastra di Lapangan Astina Gianyar. Sesuai serah terima, acara dilanjutkan dengan *touring* ke Basang Ambu, Tampaksiring.

Berdasarkan data Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (DPMD), total pagu dana desa di Kabuapten Gianyar mencapai Rp 314,7 miliar. Jumlah itu berasal dari berbagai sumber seperti BKK Provinsi Bali untuk desa pakraman Rp 63,7 miliar, BKK Provinsi Bali untuk subak dan subak abian Rp 26,7 miliar, BKK Kabupaten Gianyar untuk desa pakraman Rp 5,3

miliar, Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 74,4 miliar, Pagu BHP 72,3 miliar, Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp 12,1 miliar dan Pagu Dana Desa 59,9 miliar. Dari seluruh dana itu, setiap desa di Kabupaten Gianyar bisa menerima dana miliaran rupiah. Seperti Desa Taru yang total menerima dana dari tujuh sumber itu sebesar Rp 9,8 miliar. (kmb35)

Edisi : Rabu, 10 April 2019

Hal : 1 dan 15



Belum Tertangani Sejak Jebol Tiga Tahun Lalu Warga Sulahan Sempat Protes ke Sedana

BANGLI, TRIBUN BALI - Sejak jebol tiga tahun lalu, jalan yang menjadi pintu masuk Desa Sulahan, Kecamatan Susut belum mendapat perbaikan. Padahal ruas jalan tersebut menjadi jalur perlintasan warga sekitar meski saat ini hanya menyisakan lebar 1,5 meter.

Wakil Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Artha sempat menyinggung kerusakan jalan di kampung halaman yang terbilang cukup parah tersebut. Ia sampaikan itu saat memimpin apel disiplin pertengahan tahun 2018.

Dikonfirmasi Selasa (9/4), Sedana Artha mengatakan

banyak masyarakat yang mengeluh kepadanya terkait jalan jebol itu mengingat kerusakan telah terjadi sejak tiga tahun terakhir. Ia pun mengungkapkan sudah menganggarkan perbaikan saat jalan itu jebol.

"Ini bukan sesuatu yang harus kita wacanakan, tapi perlu *action* (dari) pihak terkait dalam hal ini Kepala Dinas PU. Saya sudah perintahkan karena sudah ada anggarannya itu," katanya.

Sebelumnya, pejabat yang juga berasal dari Desa Sulahan ini mengaku sempat diprotes oleh warganya melalui media sosial lantaran

ruas jalan selebar tujuh meter itu tak kunjung mendapatkan perbaikan meski telah dianggarkan.

Di hadapan pegawai Pemkab Bangli kala itu, Sedana Artha meminta Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKim) Bangli segera merealisasikan perbaikan. Namun penegasan wakil bupati saat apel tersebut terkesan gertak sambal. Hingga bulan keempat tahun 2019 ini, jalan jebol sepanjang 20 meter tersebut belum diperbaiki juga.

Lalu kapan dimulainya perbaikan? Sedana Artha

menjawab, perbaikan dilakukan tahun ini. Sedangkan mengenai kendala lambatnya realisasi perbaikan dengan dana yang telah tersedia, ia mengarahkan *Tribun Bali* untuk konfirmasi ke Kepala Dinas PUPRKim.

Review dan Lelang

Sekretaris Dinas PUPRKim Bangli, I Made Soma mengatakan, tahun ini perbaikan jalan jebol menuju kampung halaman Wabup Bangli itu akan segera dikerjakan. Panjang kerusakan jalan mencapai 20 meter dengan lebar jalan yang tergerus 5,5 meter dari total lebar jalan tujuh

meter terhitung sampai bahu jalan. Anggaran perbaikan sudah diplot dengan nominal Rp 600 juta pada APBD induk 2019 ini.

"Setelah dibuatkan DED (*Detail Engineering Design*) oleh konsultan, perlu review sedikit untuk penyempurnaan. Paling tidak review ini

hanya membutuhkan waktu selama sepekan. Selanjutnya baru diajukan untuk proses lelang ke ULP (Unit Layanan Pengadaan)," jelasnya. (mer)

Anggaran Sebelumnya Tak Mencukupi

PERBAIKAN jalan tersebut sudah dianggarkan sejak diketahui jebol dengan nilai Rp 200 juta. Namun saat dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) belum disahkan, justru kerusakan semakin parah akibat tergerus hujan. "Setelah dievaluasi kembali, ternyata dana itu tidak mencukupi. Karena ada kekurangan dana serta tidak bisa dikerjakan, maka dianggarkan kembali pada tahun 2018 di (APBD) perubahan dengan anggaran Rp 600 juta," beber Sekretaris Dinas PUPRKim Bangli, I Made Soma.

Usai ditambahnya anggaran perbaikan, pengerjaan jalan jebol lagi-lagi tidak bisa direalisasikan. Soma menyebut, ini disebabkan pengesahan APBD Perubahan saat itu cenderung mepet, yakni sekitar bulan Oktober atau November. Sedangkan proses lelang kegiatan, setidaknya membutuhkan waktu selama sebulan. "Belum lagi pengerjaan senderannya yang membutuhkan waktu selama dua bulan. Oleh karena itu, kami putuskan untuk menunda dan dialihkan tahun 2019," tandasnya. (mer)



Terkait Kasus LPD Kapal

Lima Perempuan Mantan Kolektor Ditahan

Denpasar (Bali Post) -

Setelah menuntaskan kasus mantan Kepala LPD Desa Kapal Drs. I Made Ladra (53) dengan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan (3,5 tahun) dan mengembalikan uang Rp 1.796.916.100, Kejati Bali terus mengembangkan kasusnya untuk menelusuri nama-nama lain yang terlibat. Bahkan, Jumat (5/4) kemarin, tim Pidsus Kejati Bali menahan lima orang perempuan yang statusnya saat itu sebagai kolektor di LPD Kapal.

Pertama Ni Kadek Ratna Ningsih (38) asal Banjar Tegal, Kelurahan Kapal, Badung. Dia adalah kolektor (kini mantan) LPD Kapal. Kedua adalah Ni Wayan Suardiani (36) asal Banjar Panglan, Kapal, yang saat ini sebagai pegawai kontrak di RSUD Badung dan sebelumnya juga kolektor di LPD Desa Adat Kapal. Ketiga Ni Made Ayu Ardianti (42) asal Banjar Titih, Kapal. Dia juga mantan kolektor di LPD Desa Adat Kapal.

Lalu Ni Nyoman Sudiasih (36) asal Banjar Lagon, Kapal. Wanita tamatan SMK

ini juga kolektor di LPD Desa Adat Kapal. Dan terakhir adalah Ni Luh Rai Kristianti (50) asal Lingkungan Banjar Celuk, Kapal, yang juga mantan kolektor di LPD Desa Adat Kapal.

Kasipenkum dan Humas Kejati Bali Edwin Beslar didampingi salah satu tim Pidsus Kejati Bali Wayan Suardi membenarkan pihaknya menahan lima orang tersangka terkait dugaan korupsi di LPD Desa Adat Kapal. "Ya, sudah dilakukan tahap II di Kejari Badung. Dan mereka langsung kami tahan dan titipkan di Lapas Kerobokan," kata pihak kejaksanaan. Memang, sebelum mereka ditahan, dalam dakwaan mantan Kepala LPD Desa Kapal Drs. I Made Ladra, nama kolektor ini semuanya mengemuka.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya di Pengadilan Tipikor, dugaan keterlibatan lima orang perempuan kolektor ini terkuak manakala LPD Desa Adat Kapal, Badung mati suri. Untuk itu dilakukan verifikasi hingga dibentuk konsultan publik dan dilakukan audit. Dari sana

disimpulkan ada 11 temuan prinsip yang menyebabkan LPD Kapal mati suri.

Pertama, adanya pemufakatan jahat pengurus LPD Kapal hingga menikmati fasilitas kredit dalam jumlah yang besar. Banyak kredit LPD yang jatuh tempo, namun tidak dilakukan upaya penyelamatan. Adanya rekayasa pemberian kredit (*window dressing*) kepada mantan kolektor LPD atas nama Ni Luh Rai Kristianti Rp 8,5 miliar dengan bunga 1%. Adanya kredit topangan, atau kredit atas nama (fiktif).

Selain itu, ada kredit tempilan, pemberian kredit tanpa proses 5C, adanya pemalsuan dokumen gaji pegawai, adanya aset diambil alih atau digadaikan, terjadi potongan uang asuransi, adanya kebijakan yang merugikan LPD, beban kantor dan lainnya, termasuk terdakwa Ladra dengan menggunakan programer atas nama Martinus Baha mengubah data di LPD yang dipimpinnya. Tak pelak, sambung jaksa, LPD rugi hingga Rp 15,35 miliar. (kmb37)

Edisi : Sabtu, 6, April, 2019

Hal : 3



Lima Kolektor LPD Kapal Ditahan

★ Semuanya Wanita, Ikut Terlibat
Korupsi Rp 15M

kuman 3,5 tahun penjara dan mengembalikan kerugian negara Rp 1,7 miliar, kasus korupsi yang menyeret mantan Kepala LPD Kapal, Mengwi, Badung kembali bergulir. Kali ini, Kejati Bali kembali melakukan penahanan terhadap lima kolektor yang semua wanita yang diduga ikut menilep sejumlah uang milik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kapal, Mengwi, Badung senilai lebih dari Rp 15 miliar.

Lima kolektor yang ditahan, yaitu Ni Kadek Ratna Ningsih, 38 asal Banjar Tegal, Kelurahan Kapal, Badung, Ni Wayan Suardiani, 36 asal Banjar Penaglan, Kapal (saat

ini sebagai pegawai kontrak di RSUD Badung, Ni Made Ayu Ardianti, 42 Banjar Titih, Kapal, Ni Nyoman Sudiasih, 36, Banjar Lagon, Kapal, Ni Luh Rai Kristianti, 50 asal Lingkungan Banjar Celuk, Kapal. "Semuanya merupakan mantan kolektor di LPD Kapal," tegas Kasipenkum dan Humas Kejati Bali, Edwin Beslar didampingi jaksa Wayan Suardi, Jumat (5/4).

Penahanan ini disebutkan setelah jaksa menerima pelimpahan tahap II terkait kasus dugaan korupsi di LPD Kapal. Selanjutnya, kelima tersangka ini langsung dibawa ke Lapas Kelas IIA Kerobokan, Kuta Utara Ba-

dung untuk menjalani penahanan sambil menunggu jadwal sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Dijelaskan, dalam sidang dengan terdakwa mantan Kepala LPD Kapal, I Made Ladra, keterlibatan kelima kolektor mulai terkuak. Dugaan keterlibatan lima orang perempuan kolektor ini terkuak saat LPD Desa Adat Kapal, Badung, mati suri. Sehingga dilakukan verifikasi, hingga dibentuk konsultan publik dan dilakukan audit.

Dalam audit ditemukan yang menjadi tanggungan kolektor Ni Kadek Ratnaningsih antara lain temuan dana nasabah yang dipakai

Luh Rai Kristianti sejumlah Rp 1,82 miliar dan tabungan sukarela nasabah yang ditarik milik I Made Sama sebesar Rp 378 juta dan dikembalikan Rp 404 juta. Namun pengembalian menggunakan tabungan fiktif. "Sehingga total yang menjadi tanggungan Ni Kadek Ratnaningsih sebesar Rp 2,22 miliar," ujar Edwin. Selain itu yang menjadi tanggung jawab kolektor Ni Nyoman Sudiasih terkait dana tabungan nasabah sebesar Rp 400 juta. Yang menjadi tanggungan Wayan Suardani Rp 246,3 juta, dan tanggungan Ni Made Ayu Arsianti sebesar Rp 272,8 juta.

Seperti diketahui dugaan

keterlibatan lima orang perempuan kolektor ini terkuak saat LPD Desa Adat Kapal mati suri. Sehingga dilakukan verifikasi, hingga dibentuk konsultan publik dan dilakukan audit. Dari sana disimpulkan ada 11 temuan prinsip yang menyebabkan LPD Kapal mati suri.

Pertama adanya pemufakatan jahat pengurus LPD Kapal hingga menikmati fasilitas kredit dalam jumlah yang besar. Banyak kredit LPD yang jatuh tempo, namun tidak dilakukan upaya penyelamatan. Adanya rekayasa pemberian kredit (window dressing) kepada mantan kolektor LPD atas nama Ni Luh Rai Kris-

tianti Rp 8,5 miliar dengan bunga 1%.

Adanya kredit topengan, atau kredit atas nama (fiktif). Selain itu ada kredit tempilan, pemberian kredit tanpa proses 5C, adanya pemalsuan dokumen gaji pegawai, adanya aset diambil alih atau digadikan, terjadi potongan uang asuransi, adanya kebijakan yang merugikan LPD, beban kantor dan lainnya, termasuk terdakwa Ladra dengan menggunakan programer atas nama Martinus Baha mengubah data di LPD yang dipimpinnya. Hasil audit BPKP Wilayah Bali menemukan kerugian LPD Kapal Rp 15,35 miliar. rez

Edisi : Sabtu, 6, April, 2019

Hal : 5



Peremajaan PIPANISASI Jalan Nangka-Antasura

Anggaran dari APBN

Belum Jelas

Dengan tidak ada kepastian itu, selain akan mengundur peremajaan pipa juga berdampak pada perbaikan Jalan Nangka-Antasura.

DENPASAR, NusaBali

Anggaran pipanisasi Jalan Nangka - Antasura Denpasar yang diajukan ke Anggaran

Pendapatan Belanja Nasional (APBN) sebesar Rp 9,2 miliar oleh PDAM Kota Denpasar hingga kini belum jelas realisasinya. Sebab, dari kementerian hingga saat ini belum berani memastikan apakah anggaran pusat bisa diprioritaskan ke penggantian pipa atau tidak. Hal itu membuat pihak PDAM kembali menunggu keputusan pusat.

Padahal pengajuan anggaran tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2017 untuk peremajaan pipa sepanjang 5,6 kilometer. Pipa-pipa tersebut membutuhkan peremajaan karena umur pipa sudah mencapai 50 tahun. Pada

hal, harusnya peremajaan pipa dilakukan maksimal 30 tahun. Hal itu membuat kekhawatiran PDAM karena dengan umur pipa yang sudah tua memungkinkan kebocoran akan sering terjadi.

Direktur Utama PDAM Kota Denpasar, IB Arsana saat dikonfirmasi, Jumat (6/4) mengaku, hingga saat ini dari pusat sama sekali belum bisa memastikan realisasi anggaran itu. Dengan tidak ada kepastian itu, selain akan mengundur peremajaan pipa juga berdampak pada perbaikan Jalan Nangka-Antasura yang selama ini dikeluhkan warga karena bergelombang.

Dengan kondisi itu, pihaknya berencana akan mengajukan ke APBD dengan tambahan anggaran yang dimiliki PDAM. Kendati dipastikan tidak mencukupi untuk peremajaan seluruh kebutuhan pipa, pihaknya berharap sebelum ada realisasi dari APBN, pipa yang diprioritaskan harus diganti akan didahulukan menggunakan APBD. "Rencana kedua begitu (mengajukan ke APBD), kalau ada anggaran akan diajukan tahun 2020 nanti. Walaupun tidak mencukupi keseluruhan paling tidak kita bisa lakukan peremajaan secara bertahap.

Kalau tidak begitu ya kami terpaksa tetap menunggu dari anggaran APBN," jelas Arsana.

Kata dia, saat ini pihaknya menyarankan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk melakukan perbaikan jalan. Jika tidak dilakukan saat ini, masyarakat kembali akan protes karena proses perbaikan jalan terlalu lama dengan alasan PDAM. "Ya karena belum ada realisasi, jadi mau tidak mau PUPR kita sarankan untuk perbaikan saja. Kalau menunggu peremajaan kami gak tau kapan terealisasi," imbuhnya. mis

Edisi : Sabtu, 6 April 2019

Hal : 3



Anggota Dewan Disiapkan Uang Jasa Pengabdian

Bangli (Bali Post) -

Pemerintah Kabupaten Bangli telah menyiapkan uang jasa pengabdian untuk para anggota dewan yang akan mengakhiri masa pengabdian-nya. Berdasarkan data dari Sekretariat DPRD Bangli, besaran anggaran yang disiapkan untuk 30 anggota dewan tersebut yakni Rp 290 juta.

Sekretaris DPRD Bangli Anak Agung Panji Awatarayana, Senin (8/4) kemarin mengungkapkan, penganggaran uang jasa pengabdian bagi anggota dewan, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2017. Adapun besaran uang jasa pengabdian yang diterima masing-masing anggota dewan, disesuaikan dengan masa

baktinya.

Untuk anggota dewan yang masa baktinya kurang dari atau sampai dengan satu tahun, berhak menerima uang jasa pengabdian sebesar satu bulan uang representasi. Sementara untuk masa bakti sampai lima tahun, mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5 bulan atau paling banyak 6 bulan uang representasi.

Disebutkannya, nilai uang representatif anggota dewan berbeda-beda. Untuk Ketua, nilai uang representatifnya Rp 2.100.000, sementara Wakil Ketua Rp 1.680.000. Sedangkan anggota hanya Rp 1.575.000. Jika dihitung dengan masa baktinya sampai lima tahun, maka Ketua Dewan akan menerima Rp 12.600.000, sementara Wakil Ketua Rp 10.080.000 dan anggota Rp 9.450.000 per anggota.

Agung Panji mengatakan, dari 27 anggota, terdapat satu orang yang masa baktinya setahun. Dia adalah Wayan Artom, yang merupakan PAW dari alm. Made Bawa. Karena itu, dia hanya berhak atas uang jasa pengabdian sebesar 1 kali uang representatif.

Mengenai pencairannya, Agung Panji mengatakan akan dilakukan setelah masa bakti anggota dewan berakhir. "Masa bakti anggota dewan berakhir bulan Agustus 2019," ujarnya.

(kmb40)



Edisi : Selasa, 9, April 2019

Hal : 14



Bagikan 63 Mobil ke Perbekel, Tetap Minta BKK di Badung

PENGADAAN puluhan mobil Expander dan sepeda motor PCX di Kabupaten Gianyar, menjadi pergunjingan di masyarakat. Pengadaan 64 sepeda motor PCX hitam dan 63 mobil Expander hitam untuk perbekel ini, dinilai jor-joran dan bukan menjadi skala prioritas. Di tengah bagi-bagi mobil dan motor, Gianyar justru mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten Badung. Bantuan ini meliputi tujuh bidang, yaitu pariwisata, kebudayaan, pendidikan, pendataan asli daerah, pertanian, teknologi informasi dan pekerjaan umum (infrastruktur).

Berdasarkan informasi, bantuan tersebut akan diserahkan langsung oleh Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Rabu (10/4) besok. Bantuan yang diberikan pun tak main-main mencapai puluhan miliar.

Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Putu Ngurah Thomas Yuniarta membenarkan jika Bupati Badung mengagendakan menyerahkan BKK untuk Kabupaten Gianyar pada Rabu (10/4) besok. "Ya, Rabu besok bapak rencananya menyerahkan bantuan BKK di Tampaksiring, Gianyar. Kalau tidak salah bantuan yang diserahkan Rp 30 miliar," ungkapnya.

Ditanya apakah bantuan yang diberikan tidak bertolak

belakang dengan keberadaan Gianyar yang jor-joran membeli mobil untuk perbekel, Ngurah Thomas enggan menjawab. "Yang jelas Rabu diberikan (bantuan BKK)," ucapnya singkat.

Berita sebelumnya, Pemkab Badung dan Pemkab Gianyar telah menjalin kerja sama. Bupati Badung Nyoman Giri Prasta mengatakan yang melandasi kerja sama ini adalah Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Penandatanganan kerja sama ini dalam rangka meningkatkan koordinasi dan komunikasi, demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih optimal dan infrastruktur daerah

yang lebih baik. Selain itu kerja sama ini juga dimaksudkan untuk lebih memantapkan hubungan sinergis antardaerah, menyasraskan pembangunan daerah, mensinergikan po-

tensi antardaerah serta meningkatkan pertukaran pengetahuan dan teknologi masing-masing. "Maksud pelaksanaan kesepakatan bersama ini yaitu meningkatkan keterpaduan pengelolaan berbagai program kegiatan pembangunan daerah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat," ungkap Giri Prasta.

Penandatanganan kesepakatan ini merupakan satu bentuk penguatan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka ikut serta menyelesaikan tujuan pembangunan nasional, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. "Saya berharap implementasi dari

kesepakatan ini dapat saling bersinergi dengan program-program pemerintah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat secara optimal," kata Giri Prasta.

Sebelumnya, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra juga mengatakan bahwa dengan adanya MoU dengan Badung, minimal dapat merealisasikan harapan masyarakat yang segera ingin memiliki jalan yang bagus,

wantilan, balai banjar, pura, kesehatan, pendidikan yang bagus. Mewujudkan

hal tersebut diperlukan inovasi, kerja keras untuk menggalang potensi dana dari pajak dan retribusi. "Ini menunjukkan komitmen Bupati Badung bahwa tidak hanya membangun Badung, beliau telah memikirkan Bali. Tentunya peluang ini kami maksimalkan. Mudah-mudahan di 2019 nanti kita bisa wujudkan," jelasnya seraya menambahkan, bantuan ini nantinya dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK). (kmb27)

Dana Desa Tak Boleh untuk Beli Kendaraan

DANA Desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat utamanya digunakan untuk infrastruktur dan pemberdayaan. Khusus infrastruktur, yang dimaksud adalah infrastruktur dasar dan infrastruktur sosial dasar. Namun, masyarakat kerap salah mengartikan infrastruktur dasar dengan membuat taman, patung, atau tugu memakai Dana Desa.

Padahal yang dimaksud infrastruktur dasar adalah infrastruktur yang dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Seperti pembangunan poliklinik, pasar desa, dan jalan usaha tani. Tujuannya untuk mendorong pergerakan ekonomi di desa. Selain itu, Dana Desa juga tidak boleh dipakai untuk membeli kendaraan seperti sepeda motor dan mobil.

Baru-baru ini beredar kabar jika Dana Desa di Gianyar justru dipakai untuk membeli mobil operasional bagi para kepala desa. Ketika ditanyakan mengenai hal ini, Senin (8/4) kemarin, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali Ketut Lihadnyana membantah kabar tersebut. "Itu bukan Dana Desa dipakai, itu adalah 10 persen pajak retribusi daerah. Untuk urusan itu, diatur melalui peraturan bupati masing-masing," ujarnya.

Penggunaan Dana Desa yang dialokasikan dari APBN, lanjut Lihadnyana, diatur

dalam Peraturan Menteri Desa, yakni untuk peningkatan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan ekonomi. Untuk tahun 2019 ini sudah disalurkan Dana Desa tahap pertama dengan alokasi 70 persen. Sementara tahap kedua sedang berproses dan diharapkan cair Mei mendatang.

Anggota Komisi I DPRD Bali I Nyoman Oka Antara mengatakan, Dana Desa mestinya dipakai untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Salah satunya dengan membangun infrastruktur secara bergilir di desa. "Jangan sampai itu yang melanggar karena Dana Desa ini tanggung jawabnya berat juga. Sudah banyak yang kena, biar lebih berhati-hati. Kepala desa tidak boleh mementingkan diri sendiri," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR-RI I Gusti Agung Rai Wirajaya mengaku sudah sering mengingatkan kepala desa di seluruh Bali terkait pemeriksaan Dana Desa oleh BPK-RI. "Saya dengar ada selentingan Dana Desa digunakan untuk membeli kendaraan sepeda motor maupun mobil. Ini tidak boleh, ini benar-benar melanggar. Saya katakan sekarang tolong itu jangan dilakukan untuk kepala desa di seluruh Bali. Kalau itu dilakukan, saya mohon maaf, anda siap masuk ke dalam sebuah pelanggaran," ujar politisi PDI-P ini. (kmb32)

Edisi : Selasa, 9 April, 2019

Hal : 16



Plafon Pasar Seni Geopark Jebol

Disperindag Siapkan Anggaran Renovasi Rp 1 Miliar

Bangli (Bali Post) -

Sejumlah bagian bangunan Pasar Seni Geopark, Kintamani mulai mengalami kerusakan. Salah satunya pada bagian plafon di lantai atas. Untuk memperbaiki kerusakan pada bangunan pasar tersebut, Disperindag Kabupaten Bangli telah menyiapkan anggaran Rp 1 miliar.

Berdasarkan pantauan, kerusakan terjadi pada plafon lantai tiga pasar Seni Geopark khususnya pada ruangan di sisi utara yang pernah ditempati sebagai kantor Disparbud. Beberapa titik plafon tampak jebol. Lis plafonnya juga sudah banyak yang berjatuhan. Sementara material plafon yang jebol berserakan di lantai.

Pasar yang rampung dibangun pemerintah tahun 2014 lalu itu menelan anggaran miliaran rupiah. Selain mengalami kerusakan, lantai serta dinding bangunan pasar yang dibiarkan kosong bertahun-tahun itu juga tampak sangat kotor.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dis-

perindag) Kabupaten Bangli Nengah Sudibya tak menampik adanya kerusakan pada bagian plafon pasar Seni Geopark. Menurutnya, kerusakan itu terjadi karena pengaruh usia bangunan yang sudah beberapa tahun dan cuaca daerah setempat yang dingin.

Dikatakannya bahwa pada tahun ini pihaknya

telah merencanakan renovasi di pasar itu. Untuk merenovasinya, Disperindag Bangli telah menyiapkan anggaran Rp 1 miliar yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dari Kementerian Perindustrian.

Selain merenovasi beberapa bagian yang rusak seperti plafon termasuk toilet, Sudibya mengatakan, akan melakukan penataan interior. Sesuai perencanaan, Pasar Seni Geopark tersebut nantinya akan dijadikan sebagai pusat promosi barang kerajinan. "Untuk

penataan pasar seni itu kita gunakan jasa konsultan perencanaan. Bagaimana penataannya, penempatan produknya," terangnya. Nantinya setelah selesai direnovasi, pengelolaan Pasar Seni yang berlokasi di Penelokan itu rencananya akan diserahkan ke Badan Pengelola Pariwisata. (kmb40)

Edisi : Selasa, 9 April, 2019

Hal : 14



Perkuat Perekonomian Masyarakat

Ketua DPRD Badung Berikan Bantuan Modal UMKM

KETUA DPRD Badung Putu Parwata terus menepati janjinya dalam merealisasikan pembangunan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Badung. Politisi asal Dalung, Kuta Utara tersebut Senin (8/4) kemarin kembali menggelontorkan dana motivasi untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bagi masyarakat Badung. Ada dua warga yang dibantu dana motivasi penguatan UMKM tersebut, mereka adalah Ni Luh

MODAL USAHA -
Ketua DPRD Badung Putu Parwata memberikan dana penguatan modal UMKM untuk dua warga asal Dalung, bertempat di gedung DPRD Badung, Senin (8/4) kemarin.

Nariati dan Ni Ketut Adnyani.

Putu Parwata mengatakan, pemberdayaan masyarakat melalui penguatan modal UMKM ini adalah bagian terpenting dalam menjaga stabilitas perekonomian kabupaten. "Kegiatan ini adalah peran pemerintah dalam meningkatkan masyarakat berusaha untuk berdaya saing. Pemberian penguatan modal ini juga menghindari para pengusaha kecil ini meminjam dana dari rentenir dan mereka pun tidak terlilit utang oleh rentenir," ujarnya.

Lebih lanjut alumni Program Doktor Ekonomi Pembangunan Unud ini juga mengatakan, nanti untuk periode keempat pihaknya akan memberikan lagi bantuan untuk warung serta industri rumahan untuk 15

orang. "Merupakan salah satu kiat untuk menekan jumlah kemiskinan. Jika kesempatan berusaha ada, tentu saja masyarakat memiliki pendapatan untuk menjalani hidup," papar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung tersebut.

Selain lewat dana motivasi yang bersumber dari dana operasional Ketua DPRD Badung, tegasnya, bantuan permodalan juga dapat diperoleh dari hibah, *corporate social responsibility* (CSR) serta program yang disusun di organisasi perangkat daerah. Selain itu, Pemkab Badung masih bisa memberikan rekomendasi bagi pelaku UMKM untuk memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan BPD Bali dengan bunga hanya tujuh persen. "Khusus KUR hingga Rp 25 juta, tidak kena syarat

agunan," tegasnya.

Pihaknya bisa memberikan rekomendasi, kata Parwata, karena Pemkab Badung merupakan pemegang saham tertinggi di BPD Bali. Karena itu, tak ada alasan BPD tak mau menyalurkan KUR kepada UMKM di Badung.

Sementara salah satu penerima bantuan penguatan modal dari Ketua DPRD Badung, Ni Luh Nariati menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD Badung Putu Parwata yang sangat memperhatikan para pengusaha kecil seperti dirinya. "Bantuan ini nantinya saya gunakan untuk menambah usaha yang sedang digeluti saat ini. Mudah-mudahan bantuan ini bisa terus berlanjut dan menambah motivasi masyarakat untuk membangun usahanya," ungkapnya. (ad323)





"Ngenteg Linggih" di Pura Ulun Desa Banjar Telengis Desa Bengkel Tabanan

Wabup Suiasa Serahkan Hibah Rp 1,3 Miliar Lebih

USAI pemugaran dan pembangunan beberapa *palinggih* di Pura Ulun Desa, Banjar Adat Telengis, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Tabanan, dilaksanakan upacara *Ngenteg Linggih*. Acara dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Wakil Bupati Tabanan I Komang Sanjaya, para tokoh adat dan masyarakat Desa Bengkel, serta *krama* dan *pangemong* pura tersebut, Senin (8/4) kemarin.

Ketua Panitia Pembangunan I Wayan Kandri mengatakan, pihaknya atas nama masyarakat Desa Bengkel mengucapkan terima kasih, di antaranya kepada Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah

Kabupaten Tabanan dan para donatur yang telah ikhlas memberikan bantuan. Berkat dukungan berbagai pihak, pembangunan Pura Ulun Desa yang diempon 60 KK tersebut bisa terselesaikan.

Dituturkan Kandri, pembangunan pura berdasarkan *rembuk krama*, karena jumlah *pangemong* kian bertambah. Perluasan diawali dengan membeli 2 hektar tanah di lokasi pura tersebut seharga Rp 130 juta. Sementara membangun *palinggih* menghabiskan Rp 900 juta. "Untuk pembangunan dan penataan pura, kami mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali, Pemkab Tabanan dan bantuan BKK dari Pemkab Badung sebesar Rp 500 juta, serta para donatur lainnya," ungkapnya.

Dikatakan pula, pembangunan dimulai dari tahun 2017. Sementara pelaksanaan *Ngenteg Linggih* dimulai Februari 2019 dengan puncak *karya* pada 10 April. "Biaya upacara dan pembangunan menghabiskan kurang lebih Rp 1 miliar. Kekurangan dari biaya tersebut kami tutupi dengan urunan bersama," jelasnya.

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dalam sambutannya mengatakan, pemberian bantuan ini merupakan implementasi prinsip "Badung Angelus Bhuana" yang berarti Badung Berbagi, dari Badung untuk Bali. Program ini telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Bali yang ditujukan ikut membangun manusia Bali dengan mengajegkan adat, seni, dan

budaya Bali. "Dengan pembangunan pura dan pelaksanaan upacara ini, telah menunjukkan jati diri umat se-dharma untuk tetap melestarikan seni, adat, dan agama Hindu," ungkapnya.

Pihaknya sangat mengapresiasi masyarakat Desa Bengkel yang telah melaksanakan *swadharmaning agama* dengan pembangunan pura serta melaksanakan upacara dengan gotong royong dan hati yang tulus ikhlas. "Semoga dengan dilaksanakannya upacara ini masyarakat mendapat *karahajengan* dan kesejahteraan oleh Ida Batara-Batari yang *malinggih* di pura ini. Dengan *yadnya*-lah kita bisa tunjukkan rasa terima kasih kepada Hyang Parama Kawi, agar kita selalu diberikan kesejahteraan," jelasnya.

Senada dengan Wabup Suiasa, Wakil Bupati Tabanan I Komang Sanjaya juga memberikan apresiasi. Pihaknya merasa bangga kepada warga Desa Bengkel dapat melaksanakan pembangunan dan melakukan upacara *Ngenteg Linggih* dengan *pakedek-pakenyum*. "Kami berharap ini tetap terus terjaga demi generasi

muda ke depan," imbuhnya. Sementara itu, Wagub Bali Tjokorda Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace menegaskan, *yadnya* merupakan tanggung jawab bersama sebagai umat Hindu kepada Hyang Parama Wisesa. "Pelaksanaan upacara ini tentu telah membawa energi yang positif kepada kita semua. Apalagi upacara

ini dilaksanakan secara bersama-sama dan tulus ikhlas," tegasnya.

Sebelum melaksanakan persembahyangan bersama, secara simbolis Wabup Suiasa menyerahkan hibah sebesar Rp 1,3 miliar lebih dan secara pribadi *mapunia* Rp 5 juta yang diterima langsung oleh panitia pembangunan. (ad328)



Gara-gara Saksi Parpol Mangkir dalam Pelatihan Takut Anggaran Jadi Temuan BPK, Bawaslu Drop Buku Saku ke TPS

DENPASAR, NusaBali

Inilah dampak mangkirnya saksi dari parpol peserta Pemilu 2019 saat hendak diberi pelatihan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali. Khawatir anggaran jadi temuan BPK, Bawaslu Bali pun berencana mengirimkan

secepatnya buku saku yang sudah dicetak senilai Rp 1,7 miliar ke TPS-TPS, sesuai dengan jumlah TPS Pileg/Pilpres.

Anggota Divisi Sengketa Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, mengatakan buku saku yang dicetak dengan menggunakan ang-

garan negara senilai Rp 1,7 miliar itu tidak boleh sia-sia. Harus diterima para peserta Pemilu, dalam hal ini saksi parpol. "Kami akan serahkan buku saku itu ke TPS-TPS. Jumlahnya sesuai dengan TPS yang ada di

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Takut Anggaran Jadi Temuan BPK, Bawaslu Drop..

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

seluruh Bali, 12.386 TPS," ujar Rudia di Denpasar, Senin (8/4).

Menurut Rudia, kalau buku saku yang dicetak dengan duit negara itu tidak sampai ke tangan saksi parpol peserta Pemilu, itu akan menjadi temuan BPK. Satu buku saja tidak sampai diterima dengan berita acara, bisa menjadi temuan BPK. "Kami khawatir kalau buku saku itu tidak terbagikan. Kami sudah tidak punya cukup waktu membagikan buku-buku itu. Sebab, saksi parpol yang hendak kita latih dan mau dikasi buku, malah tidak datang," sesal Rudia.

Untuk menseiati masalah ini, kata Rudia, Bawaslu Bali meminta parpol untuk mengikuti kegiatan pelatihan saksi dengan mengirimkan orang untuk hadir. "Karena ini aturan Pemilu. Norma yang menyebutkan saksi peserta Pemilu dilatih Bawaslu, itu jelas adalah lembaga DPR. Kami mengikuti aturan sesuai dengan Undang-undang saja. Kita minta parpol mengikuti aturan," tegas mantan Ketua Bawaslu Bali 2013-2018 ini.

Itu baru masalah buku saku. Nelum lagi persoalan konsumsi yang mubazir gara-gara saksi parpol peserta Pemilu tidak hadir dalam pelatihan oleh Bawaslu. Menurut Rudia, sisa waktu pelatihan akan selesai Rabu (10/4) besok. Pihaknya berharap semua saksi parpol peserta Pemilu bisa hadir. "Kami tidak menyurati ulang, tapi kita hubungi lagi parpolnya. Karena sebelumnya surat sudah jalan. Kita berharap parpol tegas dengan saksinya suruh hadir."

Data yang dirangkum NusaBali sebelumnya, hampir seluruh kegiatan pelatihan saksi dari parpol diwarnai aksi mangkir. Kegiatan pelatihan saksi dari parpol ini digelar Bawaslu Bali sejak 1 April 2019 dan hingga kini masih berjalan di sejumlah kabupaten/kota se-Bali.

Parpol-parpol umumnya sudah menyetorkan daftar nama saksi ke Bawaslu untuk dilatih, namun ternyata sebagian besar tidak hadir. Bahkan, saat pelatihan di wilayah Karangasem dan Buleleng, ada parpol yang sama sekali tidak mengirimkan saksi. Akibatnya, konsumsi yang sudah dibeli oleh Panwascam dibagi-bagi-

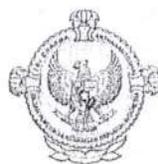
kan kepada anak-anak sekolah dan ke beberapa panti asuhan. Hal yang sama juga terjadi saat kegiatan pelatihan saksi parpol di Tabanan.

Rudia mencontohkan pelatihan saksi dari Gerindra di Singaraja, Buleleng. Jumlah saksi yang didaftarkan Gerindra ke Bawaslu mencapai 132 orang, namun tak satu pun dari mereka hadir pelatihan. Sedangkan dari 325 saksi yang didaftarkan Golkar di Buleleng, hanya 15 orang yang hadir. Demikian pula dari 12 saksi yang didaftarkan NasDem, hanya 15 orang ikut pelatihan.

Kegiatan pelatihan saksi parpol yang digelar Bawaslu di Gedung Serbaguna Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Buleleng juga sama. Gerindra mendaftarkan 246 saksi, tapi yang hadir cuma 3 orang. Sedangkan Golkar mendaftarkan 153 saksi, tapi yang hadir hanya 55 orang. Demikian pula Partai Berkarya, mendaftarkan 117 saksi, tapi yang hadir cuma 1 orang. Contoh memprihatinkan lainnya terjadi di Gianyar, ketika Demokrat mendaftarkan 216 saksi, tapi yang hadir hanya 1 orang. **nat**

Edisi : Selasa, 9 April, 2019

Hal : 1 dan 15



Sikapi Protes Kenaikan PBB P2

BKD 'Lempar Bola' ke Dirjen Pajak

Koordinasi dilakukan dengan Dirjen Pajak karena pemberlakuan tarif baru sudah diterbitkan melalui Perda.

SINGARAJA, NusaBali
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buleleng, berencana berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pa-

jak, Kementerian Keuangan (Kemenuk) RI, menyusul banyaknya keberatan atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) akibat penyesuaian tarif Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Upaya itu dilakukan karena pemberlakuan tarif NJOP sudah diundangkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Rencana tersebut diputuskan dalam rapat antara BKD dengan Inspektorat dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng, Senin (8/4) di kantor BKD Buleleng, Jalan Ngurah Rai Singaraja.

Sekretaris BKD Buleleng, Ni Made Susi Adnyani dikonfirmasi usai rapat mengatakan, dari pembahasan awal BKD baru menyusun draf pengurangan untuk menindaklanjuti keberatan yang diajukan wajib pajak. Penyusunan draf ini berdasarkan pertimbangan prinsip kepatutan terhadap regulasi yang mengatur dan berkeadilan. Ini karena, pungutan PBB P2 sendiri berdasarkan Undang-Undang (UU) diikuti Peraturan Daerah (Perda). Regulasi ini sudah diundangkan, sehingga wajib diterapkan.

Karena itu, BKD akan ber-

kordinasi ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP), agar keputusan yang akan diambil nantinya tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. "Kami baru melakukan rapat awal dan pada dasarnya setiap keberatan itu kita tindaklanjuti, dan keputusan dalam penetapan keberatan pajaknya sesuai prinsip kepatutan dan berkeadilan," katanya.

Menurut Susi, sejak Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) didistribusikan ke setiap Unit Pelaksana Teknis (UPTD) di setiap kecamatan, pihaknya telah menerima beberapa jenis keberatan. Secara

detail berapa wajib pajak yang mengajukan keberatan belum dirinci.

Meski demikian, Susi menyebut kebanyakan wajib pajak keberatan atas kenaikan NJOP. Sedangkan, keberatan karena nilai pajak-nya naik dibandingkan tagihan pajak tahun terdahulu belum banyak yang masuk ke BKD. "Umumnya keberatan kenaikan NJOP dan keberatan PBB-nya naik belum banyak. Ini masih berproses paling lambat dalam seminggu ini sudah ada keputusan pengurangan pajak," jelasnya.

Sebelumnya, penyesuaian tarif NJOP tersebut meru-

pakan tindaklanjut dari perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2013, tentang PBB P2. Dalam penyesuaian itu, Pemkab Buleleng melalui Badan Keuangan Daerah (BKD), telah menyewa tim appraisal menghitung perubahan tarif NJOP PBB P2. Kini, penyesuaian tarif tersebut mulai diberlakukan untuk PBB P2 tahun 2019.

Data di BDK Buleleng menyebut, jumlah SPPT yang dicetak di tahun 2019 sebanyak 178.000 lembar. Jumlah tersebut telah didistribusikan ke masing-masing unit pelaksana teknis (UPT) di masing-masing

kecamatan, untuk diteruskan ke masing-masing WP. Nah setelah SPPT tersebar, WP mulai keberatan karena nilai pajak yang ditanggung kenaikannya cukup tinggi. Seorang warga mengaku, memiliki lahan seluas 1 hektare, dulunya hanya bayar pajak sebesar Rp 300.000, tetapi sekarang naik sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang dulunya hanya membayar sebesar Rp 3.800.000, kini harus membayar sebesar Rp 12.000.000. "Kalau naik pasti naik, tetapi kenaikannya sekarang sangat banyak. Saya sudah layangkan surat keberatan ke BKD," ungkapnya. **k19**



Disdikpora Kaji Lagi Beasiswa Luar Negeri

MANAGUPURA, NusaBali

Program beasiswa ke luar negeri tahap kedua untuk jenjang pendidikan S2 dan S3 sampai sekarang belum dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) masih melakukan kajian matang dan akan meminta petunjuk lebih lanjut pada pimpinan.

"Kami sudah menghadap Pak Sekda. Tapi masih harus didiskusikan dengan berbagai pihak terkait. Termasuk nanti akan dilaporkan kepada Bapak Bupati," ungkap Kepala Disdikpora Kabupaten Badung I Ketut Widia Astika, Senin (8/4).

Menurut Astika, nanti bila sudah ada petunjuk pimpinan, maka akan langsung diproses. "Kalau sudah ada petunjuk terutama mengenai pengang-

garan, baru berproses untuk program beasiswa ke luar negeri tahun 2019. Yang jelas, tahun ini beasiswa akan diberikan khusus untuk S2 dan S3. Masing-masing kuotanya untuk lima orang," ungkap mantan kepala SMKN 1 Kuta Selatan, tersebut.

Program beasiswa ke luar negeri tahun 2019 ini adalah program beasiswa tahap dua. Namun, program yang terlahir atas usulan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta ini terbatas hanya untuk Program Magister/S2 (Strata Dua) dan Program Doktor/S3 (Strata Tiga). Sementara, program beasiswa jenjang Strata Satu (S1) untuk tahun ini ditiadakan. Meniadakan program beasiswa S1 tahun 2019, bukan tanpa sebab. Menurut Astika, program beasiswa S1 sudah

berjalan tahun 2018. Pihaknya perlu melakukan evaluasi atas program tersebut sebelum melanjutkan.

Nah, bagi peserta yang terpilih menerima beasiswa tahap dua khusus untuk S2 dan S3, seluruh biaya selama menempuh pendidikan bakal ditanggung oleh Pemkab Badung. Masing-masing orang dianggarkan Rp 1,1 miliar per tahun.

Secara umum, persyaratan penerima program beasiswa S2 dan S3 ke luar negeri tidak jauh berbeda dengan penerima program beasiswa S1. Antara lain harus warga Badung, yang dibuktikan dengan KTP dan KK.

Kemudian, penerima beasiswa bebas memilih negara yang dituju. Sepanjang yang bersangkutan bersungguh-sungguh kuliah dan setelah ta-

mat siap menerapkan ilmunya untuk Pemerintah Kabupaten Badung.

Sekadar mengingatkan, program beasiswa ke luar negeri tahap pertama dimulai tahun 2018. Setelah melakukan tahapan seleksi yang ketat, Disdikpora Kabupaten Badung akhirnya memberangkatkan 20 orang pelajar berprestasi belajar ke luar negeri. Sebagian besar dari mereka memilih negara Australia sebagai tempat menimba ilmu. Selain itu, negara yang dipilih adalah Inggris, Belanda, dan Malaysia.

Bagi penerima beasiswa S1, mendapatkan anggaran sebesar Rp 500 juta per tahun. Penerima beasiswa pun wajib menandatangani MoU yang berisi setelah lulus kuliah siap mengabdikan untuk Pemerintah Kabupaten Badung. **asa**

Edisi : Selasa, 9 April, 2019

Hal : 2



Radar Bali

RAPAT PARIPURNA DPRD KLUNGKUNG BAHAS LKPJ BUPATI 2018

Pendapatan Daerah Capai Rp 1,1 Triliun

SEMARAPURA - DPRD Klungkung gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klungkung Tahun 2018 di Gedung Sabha Nawa Natya, DPRD Klungkung, Senin (8/4). Terungkap, realisasi Pendapatan Daerah (PD) 2018 capai 97,70 persen dari pagu indikatif perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebesar Rp 1,126 triliun.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta beberkan, realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun 2018 capai Rp 1,1 triliun atau mencapai 97,70 persen dari pagu indikatif perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebesar Rp 1,126 triliun.

Tak mencapai 100 persen lantaran realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Rp 186,993 miliar lebih atau 97,31 persen dari pagu indikatif perubahan RKPD 2018 sebesar Rp 192,166 miliar lebih. "Realisasi



DEWA AYU PITRI ARISANTURADAR BALI

LAPORAN: Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Klungkung 2018 di Gedung Sabha Nawa Natya, Kantor DPRD Klungkung, Senin kemarin (8/4).

pendapatan bersumber dari dana perimbangan sebesar Rp 669,716 miliar lebih atau lebih rendah Rp 10,9 miliar lebih dari pagu indikatif perubahan RKPD tahun 2018 sebesar Rp 680,647 miliar lebih," bebernya.

Begitu juga dengan realisasi belanja pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp 1,146 triliun lebih atau lebih rendah sebesar Rp 55,041 miliar lebih dari pagu indikatif perubahan RKPD tahun 2018. Itu lantaran realisasi belanja langsung mencapai Rp 502,145 miliar atau 89,35 persen dari indikatif perubahan

RKPD tahun 2018 yang dirancang sebesar Rp 562,009 miliar. "Sementara realisasi belanja

tidak langsung mencapai Rp 644,691 miliar lebih atau 100,75 persen dari indikator perubahan RKPD Tahun 2018 yang dirancang sebesar Rp 639,869 miliar," terangnya.

Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru apresiasi kinerja Bupati Klungkung di 2018. Katanya, LKPJ Bupati Klungkung Tahun 2018 selain memenuhi kewajiban konstitusi juga dimaksudkan sebagai upaya membangun transportasi dan memperkuat check and balances penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh DPRD. (adv/ayu/rid)

Edisi : Selasa, 9 April, 2019

Hal : 3



Radar Bali

Wakil Bupati Ketut Suiasa Serahkan Hibah Rp 1,195 Miliar

TABANAN - Usai pemugaran dan pembangunan beberapa palinggih di Pura Ulun Desa, Banjar Adat Telengis, Desa Bengkel, Kediri, Tabanan, dilaksanakan *Ngenteg Linggih*.

Ritual dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Wakil Bupati Tabanan I Komang Sanjaya, para tokoh adat dan masyarakat Desa Bengkel, serta *krama* dan *pangemong* pura tersebut, Senin (8/4).

Ketua panitia pembangunan I Wayan Kandri mengatakan, berterima kasih ke Pemprov Bali, Pemkab Badung, Pemkab Tabanan, serta para donator yang telah ikhlas memberikan bantuan. Sehingga, dalam pembangunan Pura Pura Ulun

Desa yang di-*mong* 60 kepala keluarga (KK) tersebut bisa selesai.

Dituturkan Kandri, pembangunan pura berdasarkan *rembuk krama*, karena jumlah *pangemong* kian bertambah. Guna perluasan, diawali membeli 2 hektare tanah di lokasi pura tersebut seharga Rp 130 juta. Sementara membangun palinggih menghabiskan Rp 900 juta. "Untuk pembangunan dan penataan pura ini, kami mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali, Pemkab Tabanan, dan bantuan BKK dari Pemkab Badung sebesar Rp 500 Juta, serta para donatur lainnya," ungkapnya.

Dikatakan, pembangunan dimulai dari 2017. *Ngenteg Linggih* dimulai Februari 2019 dengan puncak *karya* pada

10 April mendatang. "Biaya upacara dan pembangunan menghabiskan kurang lebih Rp 1 miliar. Kekurangan dari biaya tersebut kami tutupi dengan urunan bersama," jelasnya.

Wakil Bupati Badung I Ke-

tut Suiasa mengatakan, prinsip *Badung Angelus Bhuna*, berarti; Badung Berbagi, dari Badung untuk Bali, telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Bali. "Dengan pembangunan pura dan

pelaksanaan upacara ini, telah menunjukkan jati diri umat *se-dharma*, untuk tetap melestarikan seni, adat, dan agama Hindu," ungkapnya.

Suiasa sangat mengapresiasi masyarakat Desa Bengkel. Sebab, telah melaksanakan *swadharmaning* agama dengan pembangunan pura, serta melaksanakan upacara den-

gan gotong-royong dan hati tulus ikhlas.

Wakil Bupati Tabanan I Komang Sanjaya *pun* mengapresiasi. Pihaknya merasa bangga kepada warga Desa Bengkel dapat melaksanakan pembangunan dan melakukan upacara *Ngenteg Linggih* dengan *pakedek-pakenyum*.

Wagub Cok Ace menegas-

kan, *yadnya* merupakan tanggung jawab bersama sebagai umat Hindu kepada Hyang Parama Wisesa.

Sebelum melaksanakan persembahyangan bersama, secara simbolis Wabup Suiasa menyerahkan hibah Rp 1,195 miliar lebih dan secara pribadi *mepunia* Rp 5 juta, diterima panitia pembangunan. (adv/dwi/djo)

Edisi : Selasa, 9 April, 2019

Hal : 3



Anggarkan Rp 290 Juta untuk 30 Dewan

● Pemkab Beri DPRD Dana Purnabakti Sebagai Jasa Pengabdian

BANGLI, TRIBUN BALI - Jelang berakhirnya masa pengabdian anggota DPRD Bangli periode 2014-2019, Pemkab Bangli menganggarkan Rp 290 juta untuk 30 anggota dewan. Anggaran yang disebut dana purnabakti ini nantinya diberikan kepada seluruh anggota dewan sebagai jasa

pengabdian.

Sekretaris Dewan, Anak Agung Gde Panji Awatarayana menyebutkan, penganggaran uang jasa pengabdian ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota De-

wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Aturan tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2017. Karena sudah ada payung hukumnya, kami berani menganggarkan uang jasa pengabdian dalam APBD Tahun 2019,"

ungkapnya, Senin (8/4).

Pembagian dana purnabakti ini hanya diberikan sekali. Pembagian besaran uang jasa pengabdian, sesuai dengan masa bakti pimpinan serta anggota DPRD. Seperti masa bakti kurang dari atau sampai dengan satu tahun, maka besaran uang jasa pengabdian sebesar satu bulan uang representasi.

Sedangkan untuk masa bakti sampai lima tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar lima bulan atau paling banyak enam bulan uang representasi. Gung Panji mengatakan, uang representasi anggota dewan pada periode ini lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya. Seperti uang representasi bagi ketua DPRD yakni Rp 2,1 juta, wakil ketua Rp 1,6 juta, dan anggota sebesar Rp 1,5 juta.

"Dengan demikian untuk ketua DPRD Bangli nantinya akan menerima Rp 12,6 juta, wakil ketua Rp 10 juta, dan anggota Rp 9,4 juta. Untuk anggota yang mendapatkan jumlah sekian (Rp 9,4 juta) hanya sebanyak 26 orang. Sedangkan satu orang anggota dewan hanya mendapatkan uang jasa pengabdian satu bulan uang representasi sebesar Rp 1,5 juta mengingat yang bersangkutan merupakan PAW dari almarhum I Made Bawa," paparnya.

"Uang jasa pengabdian ini akan kami cairkan setelah masa bakti anggota dewan berakhir, yakni bulan Agustus 2019 nanti. Sementara sisa dari anggaran uang jasa pengabdian itu sudah tentu kita akan kembalikan ke kas daerah," tandasnya. (mer)

Edisi : Selasa, 9 April 2019

Hal : 5



Perekonomian Masyarakat Semakin Timpang

● Pemkab Klungkung Genjot Sektor UMKM dan Pertanian

BUPATI Klungkung I Nyoman Suwirta membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), di hadapan dewan dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (8/4). Ada beberapa hal yang menjadi point penting yang disampaikan Suwirta, yakni perekonomian masyarakat Klungkung yang semakin timpang, sehingga ke depannya pemerintah akan lebih menggenjot sektor UMKM serta pertanian.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru dan dihadiri 18 anggota dewan. Serta dihadiri Bupati Nyoman Suwirta dan jajarannya. Dalam paripurna tersebut, Suwirta menyampaikan secara umum kondisi perekonomian di Kabupaten Klungkung menunjukkan perkembangan positif. Mulai dari pertumbuhan ekonomi pada 2017 mencapai 5,34 persen, di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,07 persen.

"Titik puncak dari pertumbuhan ekonomi ini, memang tidak setinggi di tahun 2016 yang mencapai 6,02 persen. Perekonomian Klungkung di tahun 2016, melesat lantaran sektor pariwisata," jelasnya.

Kondisi ini ternyata juga berdampak pada gini ratio (ketimpangan) antara penduduk miskin dengan kaya di Klungkung yang semakin lebar. Hal ini karena sektor pariwisata biasanya digerakkan para pemodal, sementara sektor pendukung utama, seperti pertanian dikalahkan oleh sektor pariwisata.

"Kami akan terus genjot sektor UMKM dan pertanian. Perekonomian warga tidak boleh terlalu senjang, seperti saat ini," tegas Suwirta.

Terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2018, Suwirta memaparkan, realisasi pendapatan daerah pada 2018 sebesar Rp1,100 triliun atau mencapai 97,70 persen.

Sumber pendapatan dari dana perimbangan belum mencapai target. Yang mana penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak hanya terealisasi Rp 18,401 miliar (84,47



TRIBUN BALI/EKA MITA SUPUTRA

persen). Demikian juga dengan dana alokasi khusus yang terealisasi Rp 120,943 miliar dari pagu Rp 128,491 miliar atau hanya tercapai 94,13 persen. Sedangkan untuk realisasi belanja pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp 1,146 triliun atau lebih rendah Rp 55,041 miliar dari pagu indikatif RKPD tahun 2018.

Realisasi pendapatan daerah ini bersumber dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 186,993 miliar atau 97,31 persen dari pagu indikatif perubahan RKPD tahun 2018 yang ditetapkan Rp 192,166 Miliar. Di samping itu, realisasi pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan Rp 669,716 miliar, lebih rendah Rp 10,931 miliar dari pagu indikatif perubahan RKPD tahun 2018 Rp 680,647 miliar.

Terkait realisasi pembangunan, Bupati Suwirta menyampaikan, sepanjang 2018 sudah dituntaskan rehabilitasi jalan sepanjang 29,60 km, pembangunan gedung Instalansi Bedah Sentral (IBS) Rp 19,951 Miliar, pembangunan enam unit pasar, serta pembangunan 80 unit bedah rumah dan 47 unit rehab rumah.

Pada rapat paripurna itu diserahkan LKPJ ke Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru. (adv/mit)

Edisi : Selasa, 9 April 2019

Hal : 5



Rehab 7 SD Habiskan Rp 2,6 Miliar

DINAS Pendidikan Kota Denpasar menganggarkan Rp 2,6 miliar untuk rehab tujuh Sekolah Dasar (SD) di Kota Denpasar.

"Untuk yang kelanjutan perbaikan tahun 2018 kemarin, kami kebut dan rencanakan selesai sebelum tahun ajaran baru. Sehingga saat tahun ajaran baru, gedung itu sudah terpakai, kami kejar, sehingga target Mei atau Juni tuntas dan Juli bisa dipakai," kata Merta.

Untuk tahun 2019 ada tujuh sekolah yang direhab meliputi SDN 8 Sanur, SDN 6 Penatih, SDN 2 Tonja, SDN 15 Dauh Puri, SDN 14 Pedungan, SDN 27 Pemecutan, SDN 15 Pemecutan.

Adapun rehab ini untuk perhaban atap sekolah. Rehab tahun 2019 dengan anggaran Rp 2,636 miliar ini akan

dimulai bulan Mei 2019 dan ditargetkan tuntas pada September 2019. Dana ini bersumber dari APBD Kota Denpasar 2019.

"Nilai rehabnya nanti tergantung kebutuhan di sekolah masing-masing. Konsultan yang mengerjakan. Kita anggarakan dana segitu, kita mohon ke konsultan sebelum buat gambar atau DED agar ke sekolah dulu, tanya kepala sekolahnya apa yang diperlukan. Sekolah yang tentukan bagaimana," katanya.

Selain rehab atap, juga ada pembangunan Padmasana di dua sekolah yakni SDN 22 Dauh Puri, dan SDN 16 Pemecutan. Juga perbaikan tembok penyengker di SDN 11 Peguyangan, SDN 8 Pemecutan, SDN 6 Ssetan, SDN 17 Kesiman, SDN 18 Dangin Puri, dan SDN 4 Peguyangan. (sup)

Edisi : Selasa, 9 April 2009

Hal : 8



Atas Kenaikan Tarif PBB P2

BKD Kaji Keberatan Wajib Pajak

Singaraja (Bali Post) –

Adanya kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2) itu memicu keberatan para Wajib Pajak (WP) di Buleleng. Ini karena dampak penyesuaian tarif yang mulai berlaku 2019 itu, membuat kewajiban WP jadi membengkak dibandingkan tahun sebelumnya.

Atas kondisi ini, Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng mempersilakan WP melaporkan keberatannya. Kalau keberatan WP itu masuk akal, maka pihak BKD dipastikan akan pengurangan PBB P2 sampai setengah dari total tagihan pajak itu.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BKD Buleleng Gede Suyasa, Minggu (7/4) kemarin mengatakan, setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dicetak dan didistribusikan. Sejahter ini BKD sudah menyosialisasikan kepada WP untuk mencermati dokumen pajak yang diterima. Dari cara itu WP memandang nilai pajaknya tidak masuk akal. Nilai kenaikannya benar-benar memberatkan. "WP kami persilakan mengajukan keberatan ditujukan kepada BKD," pinta Gede Suyasa.

Namun sejauh ini, memang pihak WP relatif banyak yang keberatan dengan kenaikan tarif PBB P2 itu.

Bahkan keberatan itu mulai dikaji tim dan dilaporkan kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana.

"Setelah saya ditugaskan di BKD, Senin (8/4) hari ini kami akan mengkaji keberatan WP terhadap kenaikan PBB P2. Saya masih mempelajari karena ini dilaksanakan oleh pejabat sebelumnya," katanya.

Birokrat asal Desa/Kecamatan Tejakula itu menambahkan, kajian atas keberatan itu akan dilaporkan kepada Bupati. Kalau berdasarkan perhitungan teknis dan pertimbangan penting, Bupati bisa saja memberikan pengurangan pajak. Tentu saja, keputusan pimpinan berdasarkan *grade* yang sudah ditentukan. Sehingga dari keberatan yang diajukan akan ditindaklanjuti. Selain masalah teknis penghitungan, bisa saja pengurangan pajak itu diberikan dengan pertimbangan kemampuan WP melunasi kewajibannya.

"Nanti akan ada penetapan pimpinan di daerah. Yang pasti keberatan ini akan ditindaklanjuti berdasarkan *grade* masing-masing dan juga pertimbangan teknis lainnya," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, tahun 2018 lalu pemerintah menyempurnakan penetapan tarif PBB P2 bersama DPRD Buleleng. Setelah dilakukan pembahasan secara alot, penyempurnaan tarif itu disepakati mulai berlaku tahun ini. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup), tarif PBB P2 itu dihitung berdasarkan zona dan perkembangan harga tanah terbaru. Dari sekian banyak zona, penghitungan nilai pajak berdasarkan zona objek pajak di jalan protokol, jalan desa, kawasan pariwisata, dan masih banyak zona lainnya.

Menyusul penyempurnaan itu, SPPT tahun 2019 sudah dicetak. Bahkan sudah didistribusikan kepada para WP di Bali Utara. Hasilnya, WP mulai mengajukan keberatan terhadap penetapan PBB P2 yang telah disempurnakan itu. Ini karena, perkembangan harga tanah menyebabkan pajak yang wajib dilunasi jadi nilainya bertambah, dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. (kmb38)

Edisi : Senin, 8 April, 2019

Hal : 8



Bangun Jembatan, Bongkar Plang Penginapan

AMLAPURA, NusaBali

Warga Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Karangasem ramai-ramai membongkar plang nama penginapan di Banjar Bislantang Kaler, Desa Purwakerthi, Minggu (7/4). Tujuan pembongkaran untuk memperlancar pembangunan jembatan menghubungkan dari pusat Desa Purwakerthi ke Tukad Liki dan jalur itu juga tembus ke Desa Labasari, Kecamatan Abang.

Sebelum membongkar plang dengan tinggi sekitar 1,5 meter dan lebar 1 meter, terlebih dahulu krama Desa Purwakerthi menggelar paruman. Membicarakan membongkar plang salah satu penginapan milik I Ketut Dauh. Dalam paruman I Ketut Dayuh merelakan plang penginapannya dibongkar karena mencolok ke jalan raya. Atas dasar kesepakatan itulah warga melakukan pembongkaran dikoordinasikan Perbekel Desa Purwakerthi, I Nengah Karyawan.

Nengah Karyawan menambahkan, pembangunan jembatan



Warga Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Karangasem, membongkar plang penginapan, Minggu (7/4).

segera direalisasikan tahun anggaran 2019 dan dari APBD Kabupaten Karangasem dengan panjang jembatan 12 meter dan lebar 6 meter. Sehingga nantinya memudahkan warga melintas di Tukad Liki. Selama ini warga melintas mesti menyusuri sungai dengan adanya jembatan, tidak akan pernah khawatir walau di musim hujan. Bangunan jem-

batan berbiaya Rp 2,4 miliar.

Pembangunan itu satu paket dengan pengaspalan jalan melasti dari Desa Purwakerthi ke Pantai Amed. "Kami mengapresiasi dukungan masyarakat untuk kelancaran pembangunan di desa, terutama pemilik plang penginapan, setelah kami beri penjelasan dan merelakan dilakukan pembongkaran," tambahnya. k16



Pesisir Pulau Ceningan Terancam Abrasi

SEMARAPURA, TRIBUN BALI- Ketut Sumerta (50) sedang melabuhkan sampannya di pesisir Pulau Ceningan, Minggu (7/4). Sejenak kemudian warga asal Ceningan itu lantas duduk di pesisir pantai berpasir putih di sekitar Jembatan Kuning. Ia sempat menunjukkan runtuhnya tanggul yang roboh.

"Informasinya pesisir ini mau dibangun tanggul oleh pemerintah, tapi belum terealisasi," ujarnya.

Ia berharap pemerintah dapat segera membangun tanggul di lokasi itu agar pesisir tidak kunjung tergerus abrasi. Terlebih pesisir di sekitar Jembatan Kuning menjadi akses penting bagi warga untuk melabuhkan jukung-jukung, termasuk boat kecil.

"Sebenarnya ini sudah ada

tanggul sebelumnya. Tapi rusak. Semoga yang rusak ini bisa dibangun kembali," jelasnya.

Pemkab Klungkung memang telah berencana membangun tanggul untuk mengantisipasi abrasi di pesisir Ceningan, tepatnya di pesisir sekitar Jembatan Kuning. Jika tanggul tidak kunjung dibangun, dikhawatirkan air laut akan mengikis pesisir pantai berpasir putih ini.

Plt Kadis PU Klungkung, Nyoman Susanta menjelaskan, perencanaan untuk pembuatan tanggul tersebut telah dibuat tahun 2017 silam. Namun hingga saat ini tanggul itu belum terealisasi karena minimnya anggaran.

Tanggul di pesisir Pulau Ceningan ini rencananya dibangun sepanjang 26 meter

dengan anggaran sekitar Rp 500 juta. Terlebih Bupati Suwirta memiliki rencana untuk melakukan penataan terhadap pesisir di sekitar Jembatan Kuning yang telah menjadi ikon Pulau Lemongan-Ceningan.

"Semoga tahun 2020 tanggul ini bisa terealisasi. Pembuatan tanggul memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Per meternya,

bisa mencapai Rp 20 juta," ungkap Nyoman Susanta.

Berdasarkan data terakhir Dinas PU Klungkung, saat ini pesisir Klungkung yang rawan abrasi panjangnya sekitar 25,77 km. Dari jumlah itu, ada sekitar 13,523 kilometer yang telah berhasil ditangani. Sementara sisanya sekitar 12,247 kilometer garis pantai rawan abrasi di Kabupaten Klungkung akan

ditangani secara bertahap. Sekitar 6,5 kilometer pesisir abrasi ada di Klungkung daratan dan sekitar 5,75 kilometer ada di Nusa Penida.

"Tahun ini saja kami menganggarkan penanganan abrasi sejumlah Rp 2 miliar dan difokuskan di Banjar Kutapang, Desa Batununggal. Kami perkirakan anggaran itu dapat tertangani sekitar 100 meter," ungkapnya. (mit)

Tidak Ada Anggaran Penanganan

PLT Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat Klungkung, I Nyoman Susanta menjelaskan, tahun 2019 ini tidak ada anggaran penanganan abrasi dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida.

Pihaknya telah mengajukan permohonan untuk penanganan 12,247 kilometer garis pantai

rawan abrasi yang ada di Klungkung.

"Kami tidak tahu apa penyebabnya. Untuk target penanganan abrasi, tentu kami harus lihat renstra BWS Bali-Penida, karena menyangkut kewenangan. Tetapi kami juga memasang di renstra dinas tiap tahun 100 meter sampai tahun 2023," ungkapnya. (mit)



Program Internet Desa Gratis Dianggarkan Rp 2,1 Miliar



Drs. Made Agus Harta Wiguna

Bali Post/bit

Tabanan (Bali Post) -

Pemprov Bali berencana memasang jaringan internet (wifi) di seluruh desa adat, puskesmas dan objek wisata yang dananya bersumber dari BKK 2019. Dari sembilan kabupaten/kota di Bali, Kabupaten Tabanan mendapatkan anggaran paling banyak yakni Rp 2,1 miliar lebih. Anggaran tersebut rencananya digunakan untuk program internet gratis di 393 titik.

Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tabanan Drs. Made Agus Harta Wiguna menyampaikan, dana dari provinsi dimanfaatkan untuk menyewa *bandwith* untuk meng-cover seluruh 349 desa pakraman, 20 puskesmas dan 10 objek wisata di Tabanan. "Ada juknis yang mengatur hal itu dan sudah ditentukan lokasinya sebanyak 393 di seluruh Tabanan," ungkap Agus, Minggu (7/4) kemarin.

Program ini akan segera direalisasikan. Salah satunya dengan pemilihan penyedia melalui e-katalog. Sementara untuk keberlanjutan program ini, Pemkab Tabanan telah mengusulkan BKK provinsi untuk tahun anggaran 2020.

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menerangkan, pemasangan wifi gratis nantinya akan dikemas dalam satu aplikasi *Bali Smart Island*. Tahap pertama menasar desa adat, destinasi wisata, dan puskesmas. Selanjutnya akan menasar sekolah, kampus, permukiman padat dan sebagainya. (kmb28)

Edisi : Senin, 8, April, 2019

Hal : 4



Ikuti 26 Materi PKB, Denpasar Siapkan Rp 3,5 Miliar ✓

DENPASAR, NusaBali

Pesta Kesenian Bali (PKB) memasuki pelaksanaan ke-41. Kabupaten/kota mulai menyiapkan jumlah kesenian yang akan ditampilkan. Seperti Pemerintah Kota Denpasar yang tahun ini akan mengikuti sebanyak 26 materi dengan anggaran sebesar Rp3,5 Miliar.

PKB ke-41 yang mengambil tema 'Bayu Pramana: Memuliakan Sumber Daya Angin' rencananya akan digelar 15 Juni sampai 13 Juli 2019. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, IGN Bagus Mataram menjelaskan, materi yang akan diikuti pawai, parade, lomba, pagelaran, workshop, pameran, dan sarasehan. Dari 26 materi yang akan diikuti, akan melibatkan sekitar 3.000 orang, baik seniman maupun crew pembantu. "Kami sudah melakukan berbagai persiapan mulai dari penunjukan duta serta finalisasi materi yang akan dibawakan," ungkapnya.

Salah satu kesenian yang akan pentas mewakili Kota Denpasar adalah Janger Kedaton Sumerta. Kesenian yang ada di Banjar Kedaton, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur ini mendapat pembinaan dari tim provinsi Bali.

Koordinator Janger Kedaton, Made Sudiarmika mengatakan, Janger Kedaton sedianya akan tampil pada 23 Juni mendatang di Panggung Ksirarnawa Taman Budaya Denpasar. "Pada penampilan nanti di ajang PKB, kami akan menampilkan Janger Melampayan, dengan mengangkat cerita 'Hanuman Kecangkik,'" ucapnya.

Keberadaan Janger Kedaton tersebut tidak lepas dari sejarahnya sebagai Janger Sesungguhnya krama Banjar Kedaton. Konon, Janger Sesungguhnya ini sudah ada sejak tahun 1906 dan tetap lestari hingga sekarang. Janger Kedaton selama ini juga sudah beberapa kali tampil di ajang PKB. "Kami melibatkan 25 orang penabuh, dan 32 orang penari. Yang kami libatkan di sini seluruhnya generasi muda Banjar Kedaton," imbuhnya.

Kadis Mataram berharap, ajang PKB ini bisa dimanfaatkan oleh insan seni Kota Denpasar sebagai ajang apresiasi seni dan kebudayaan Bali. Tidak hanya karena dipercaya menjadi wakil Kota Denpasar, namun lebih dari itu, ajang PKB dapat dijadikan sebagai kesadaran manusia Bali untuk menjaga seni budayanya mulai dari diri sendiri. "Pemilihan duta kesenian di Kota Denpasar selalu digilir di empat kecamatan. Karena itu kami berharap bisa maksimal hasilnya," tandas Mataram. [ind](#)

Edisi : Senin, 8, April, 2019

Hal : 3



Penyesuaian NJOP Menuai Protes

★ Kenaikan PBB Dianggap Tinggi

Kenaikan diprotes karena naik berlipat-lipat. Dari bayar Rp 300 ribu menjadi Rp 1 juta. Bahkan ada yang dari Rp 3,8 juta ditagih Rp 12 juta.

SINGARAJA, NusaBali

Penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), mulai menuai protes. Pemilik tanah selaku wajib pajak (WP) pun telah melayangkan surat keberatan ke kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) di Jalan Ngurah Rai Singaraja.

Penyesuaian tarif NJOP tersebut merupakan tindak lanjut dari perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2013, tentang PBB P2. Dalam penyesuaian itu, Pemkab Buleleng melalui Badan Keuangan Daerah (BKD), telah menyewa tim appraisal menghitung perubahan tariff NJOP PBB P2. Kini, penyesuaian tarif tersebut mulai diberlakukan untuk PBB P2 tahun 2019.

Data di BDK Buleleng menyebut, jumlah SPPT yang dicetak di tahun 2019 sebanyak 178.000 lembar. Jumlah tersebut telah didistribusikan ke masing-masing unit pelaksana

teknis (UPT) di masing-masing kecamatan, untuk diteruskan ke masing-masing WP. Nah setelah SPPT tersebar, WP mulai keberatan karena nilai pajak yang ditanggung kenaikannya cukup tinggi.

Seorang warga mengaku, memiliki lahan seluas 1 hektare, dulunya hanya bayar pajak sebesar Rp 300.000, tetapi sekarang naik sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang dulunya hanya membayar sebesar Rp 3.800.000, kini harus membayar sebesar Rp 12.000.000. "Kalau naik pasti naik, tetapi kenaikannya sekarang sangat banyak. Saya sudah layangkan surat keberatan ke BKD," ungkapnya.

Sementara, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Buleleng Minggu (7/4), tidak menampik sudah ada WP yang mengajukan keberatan terkait dengan pemberlakuan tariff NJOP yang baru. Karena itu, pihaknya akan mengkaji kembali kenaikan tarif tersebut. "Saya kan baru di BKD, jadi memang ada yang sudah melayangkan keberatan. Besok (Senin, hari ini, Red), kami akan bahas dan mengkajinya," katanya.

Menurut birokrat asal Desa/Kecamatan Tejakula ini, masih dimungkinkan adanya perbaikan tarif. Karena itu, terhadap keberatan yang sudah masuk, pihaknya akan mengevaluasi

kembali. Hasil evaluasi itu akan disampaikan kepada Bupati untuk dibuatkan ketetapan yang baru. "Nanti akan ada penetapan oleh pimpinan di daerah. Yang pasti keberatan ini akan ditindaklanjuti berdasarkan grade masing-masing, dan pertimbangan teknis lain," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, BKD Buleleng, Ni Nyoman Sukadani menyatakan, penyesuaian tariff NJOP itu akan berdampak adanya kenaikan PBB P2. "Bagi pemilik lahan hektaran, tentu kenaikannya akan terasa, karena pengenaan tariff NJOP-nya sudah berbeda. Tapi kalau yang punya tanah misalnya 2 are, paling kenaikannya hanya Rp 5.000," katanya.

Sukadani menyebut, pihaknya tetap memberikan kesempatan kepada WP untuk mengajukan keberatan terhadap penyesuaian tariff PBB tahun ini. Hanya saja, keberatan tersebut diajukan sebelum SPPT jatuh tempo tanggal 30 September 2019, maka keberatan atas kenaikan PBB tidak akan dilayani. "Sekarang ini, kami kan sudah mendistribusikan SPPT, nah kalau memang nanti ada yang keberatan silakan ajukan, jadi kami berikan waktu sampai 6 bulan. Tetap kalau keberatannya lewat dari tanggal 30 September, kami tidak terima, karena kami anggap tariff PBB itu sudah dapat diterima," jelasnya. ☎ k19

Edisi : Senin, 8, April, 2019

Hal : 4



Pembangunan Irradiator Gamma Senilai Rp 156 Miliar di Buleleng, Disetujui Pusat



• NUSABALILIK SURYA ARIANI

Plt Kadis Pertanian Buleleng, Made Sumiarta.

SINGARAJA, NusaBali

Tim Terpadu Kabupaten Buleleng sudah mengirimkan proposal untuk pembangunan Irradiator Gamma (perangkat untuk pengawet dan menjaga kualitas hasil pertanian) ke pusat. Proposal senilai Rp 156 miliar yang diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini pun telah disetujui pusat.

Tim Terpadu yang dikoordinasikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Buleleng, bersama Dinas Pertanian Buleleng, Dinas Perindustria & Perdagangan (Disperindag) Buleleng, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perikanan Buleleng, dan Dinas Lingkungan Hidup Buleleng ini sudah sempat audiensi dengan pejabat pusat. Menurut Plt Kadis Pertanian Buleleng, I Made Sumiarta, rencana pembangunan Irradiator Gamma sudah mendapatkan persetujuan pusat.

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Nantinya, Irradiator Gamma akan dibangun di atas lahan seluas 22 hektare di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. Lahan tersebut merupakan milik Pemprov Bali, yang saat ini masih digunakan sebagai areal Balai Benih Gerokgak. "Lahan Pemprov Bali di Desa Patas ini sudah mendapat persetujuan dari Gubernur (Wayan Koster) untuk pembangunan Irradiator Gamma," ungkap Made Sumiarta di Singaraja, Minggu (7/4).

Desa Patas sendiri dipilih sebagai lokasi proyek Irradiasi Gamma, karena desa yang berada di Buleleng Barat tersebut sudah dirancang Bupati Putu Agus Suradnyana untuk dikembangkan menjadi kawasan terpadu. Selain itu, Desa Patas juga dekat dengan Pelabuhan Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, hingga memudahkan akses penerimaan dan pengiriman hasil pengawetan.

Made Sumiarta berharap rencana proyek Irradiator Gamma ini sudah direalisasi-

kan tahun 2020 mendatang. Irradiator Gamma ini merupakan proyek besar untuk mengangkat hasil pertanian, peternakan, dan olahan pangan di Buleleng, untuk dikomersialkan.

Menurut Sumiarta, proses pengawetan yang masuk ke gudang Irradiator Gamma dipastikan akan berjumlah besar. Tak menutup kemungkinan buah, sayur, gading, dan bahan olahan lainnya dari luar Bali dapat masuk dan diawetkan dengan proses penyinaran alat di Irradiator Gamma, sehingga bisa tahan lebih lama sekitar 2-3 bulan.

"Proyek Irradiator Gamma ini skalanya besar. Tidak hanya Bali, tetapi buah dan produk pertanian, daging, dan olahan dari Jawa Timur, NTB, dan NTT bisa masuk ke sini. Di Indonesia saat ini baru ada dua, masing-masing di Serpong (Jawa Barat) dan Jogjakarta" papar Sumiarta.

Disebutkan, Irradiator Gamma di Buleleng nantinya akan dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda), sehingga memanfaatkan industri tersebut dapat bekerjasama dengan petani dan perusahaan-

perusahaan yang bergerak di bidangnya.

Sementara itu, Pemprov Bali juga mendukung penuh proyek Irradiator Gamma di Desa Patas ini. Pemprov Bali tengah memikirkan skema pembiayaan pembangunan Irradiasi Gamma yang mencapai Rp 156 miliar tersebut.

Dukungan Pemprov Bali terhadap rencana Pemkab Buleleng membangun Irradiator Gamma tersebut disampaikan Gubernur Koster saat bertatap muka dengan seluruh komponen masyarakat Buleleng di Gedung Kesenian Gde Manik, Jalan Udayana Singaraja, 17 Maret 2019 lalu, yang dihadiri langsung perangkat desa adat dan para Perbekel se-Buleleng, serta perwakilan guru dan tokoh masyarakat.

Gubernur Koster memperkirakan pembangunan Irradiator Gamma menghabiskan dana sebesar Rp 156 miliar. Irradiator Gamma tersebut ditargetkan sudah dibangun paling lambat tahun 2020 mendatang. "Sekarang saya sedang pikirkan skema pembiayaannya. Tapi, dari Pemkab Buleleng sudah mengusulkan

dana ke Kementerian Pertanian. Saya rasa kalau dananya sebesar Rp 156 miliar, pasti ada jalan keluarnya. Sedang saya pikirkan ini untuk kepentingan pertanian di Bali," tandas Koster dalam simakrama yang dihadiri pula Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat itu.

Menurut Koster, program pembangunan Irradiator Gamma tersebut sangat tepat, karena dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian di Bali. Apalagi, kini seluruh hotel di Bali diwajibkan menyajikan buah-buahan hasil pertanian lokal Bali.

Sedangkan Bupati Agus Suradnyana menyatakan hampir 70 persen hasil pertanian berupa buah-buahan di Bali berasal dari Buleleng. Karenanya, keberadaan Irradiator Gamma tersebut dapat menggerakkan sektor pertanian di Buleleng dan Bali umumnya. "Dengan alat Irradiator Gamma ini, buah mangga akan mampu bertahan selama 3 bulan. Jambu kristal kalau masuk hotel ada bintik latatnya, tamu tidak akan mau memakan. Tapi, dengan alat ini, semua akan hilang," katanya. k23

Edisi : Senin, 8 April, 2019

Hal : 1 dan 15



Pembaruan Kontrak BIFA Gagal

★ Setahun Tetap Bayar Rp 30 Juta

SINGARAJA, NusaBali

Rencana peninjauan nilai kontrak atas pemanfaatan Lapangan Terbang (Lapter) Letkol Wisnu di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, oleh Bali International Flight Academy (BIFA) gagal terwujud. Padahal, pihak BIFA sudah sepakat dengan nilai kontrak yang terbaru sebesar Rp 75.605.000 setahun. Kini Lapter Letkol Wisnu hanya menghasilkan sebesar Rp 30.000.000 setahun sesuai kontrak lama.

Rencana peninjauan nilai kontrak itu sudah dilakukan Pemkab Buleleng sebelum batas akhir pembayaran sewa Maret 2018. Dalam peninjauan ini, Pemkab Buleleng menunjuk Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara

dan Lelang (KPKNL) Singaraja melakukan appraisal harga atas aset tersebut. Akhirnya muncul harga sewa sebesar Rp 75.605.000. Nilai itu pun telah disepakati antara Pemkab dengan pihak BIFA.

Namun, sampai saat ini kontrak terbaru itu tidak kunjung bisa ditandatangani, lantaran aset di Lapter Letkol Wisnu juga milik Pemprov Bali. Kala itu, Pemprov ingin dalam kontrak tersebut dilibatkan. Hanya saja, Pemprov Bali masih melakukan pengukuran lahan untuk memastikan luas lahan di Lapter Letkol Wisnu.

Dulunya Pemkab Buleleng membangun Lapter di atas lahan Pemprov Bali, atas re-

komendasi dan persetujuan Gubernur Bali, kala itu Dewa Made Beratha pada tahun 2000 silam. Mulai dari landasan pacu sepanjang 900 meter dengan lebar 60 meter, pagar, menara air traffic control, serta beberapa bangunan lainnya. Fasilitas itu kemudian disewa oleh sekolah penerbang Bali International Flight Academy (BIFA) sejak tahun 2008, dengan nilai sewa sebesar Rp 30 juta setahun.

"Kami masih menunggu pihak Pemprov Bali, kemungkinan nantinya kerjasama itu melibatkan tiga pihak, Pemkab Buleleng, Pemprov Bali dan BIFA. Tetapi Pemprov Bali saat ini masih membuat status hukum (Ser-

tifikat, Red) dari lahan itu. Kami belum tahu perkembangannya," terang Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Buleleng, Gede Gunawan Ap, Minggu (7/4).

Disinggung masalah nilai kontrak? Kadishub Gunawan Ap menyatakan, sewa kontrak pemanfaatan Lapter Letkol Wisnu oleh BIFA masih berlaku kontrak yang lama. Dimana pihak BIFA tetap membayar sewa kontrak sebesar Rp 30 juta. "Karena belum tandatangan, jadi masih berlaku kontrak yang lama. Dan BIFA sudah membayar sewa sebesar Rp 30 juta. Kalau tidak salah Maret 2019 sudah dibayar sewanya itu," ujar Gunawan. **k19**

Edisi : Senin, 8 April 2019

Hal : 4



Denpasar Anggarkan PKB Rp 3,5 M

Ikuti 26 Materi, Semua Siap Tempur

DENPASAR - Dana Pesta Kesenian Bali (PKB) di jaman pemerintahan Gubernur Wayan Koster sepertinya berat ke kabupaten/kota. Buktinya, dana PKB dari provinsi hanya ratusan juta sementara dana PKB Pemkot Denpasar mencapai Rp 3,5 miliar.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Den-

pasar, IGN Bagus Mataram saat dikonfirmasi, Minggu (7/4) mengungkapkan, total anggaran PKB ke-41 untuk Denpasar mencapai Rp 3,5 miliar. "Ya, kalau anggaran secara keseluruhan lebih kurang Rp 3,5 miliar," kata Mataram. Lanjutnya, Denpasar mengikuti 26 materi yang diwajibkan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali selaku panitia penyelenggara PKB. "Denpasar sendiri sangat siap menyambut gelaran seni tahunan di Bali ini," ucapnya.

Denpasar juga sudah sangat siap mengikuti PKB, mulai dari penunjukan duta serta finalisasi materi yang akan dibawakan. "Kami telah siap mengikuti seluruh materi yang diberikan provinsi, sebanyak 26 materi dengan melibatkan 2.500 sampai 3000 seniman. Secara umum sudah siap berlaga," kata Mataram.

Materi yang dimaksud Mataram itu terbagi dalam beberapa jenis yakni pawai, parade, lomba, pagelaran, work-

shop, pameran, dan sarasehan. "Gelaran PKB ini agar dimanfaatkan oleh insan seni Kota Denpasar sebagai ajang apresiasi seni dan kebudayaan Bali, sehingga ke depan seni, budaya serta kearifan lokal Bali dapat tetap ajeg dan lestari dengan tetap berpedoman pada pakem-pakem seni itu sendiri," katanya.

Untuk diketahui PKB ke-XLI (41) Tahun 2019 ini mengangkat tema pokok Bayu Pramana yang mengandung makna memuliakan sumber daya angin. (feb/dit)

Edisi : Senin, 8 April, 2019

Hal : 4



Terkait Kasus LPD Kapal

Lima Perempuan Mantan Kolektor Ditahan

Denpasar (Bali Post) -

Setelah menuntaskan kasus mantan Kepala LPD Desa Kapal Drs. I Made Ladra (53) dengan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan (3,5 tahun) dan mengembalikan uang Rp 1.796.916.100, Kejati Bali terus mengembangkan kasusnya untuk menelusuri nama-nama lain yang terlibat. Bahkan, Jumat (5/4) kemarin, tim Pidsus Kejati Bali menahan lima orang perempuan yang statusnya saat itu sebagai kolektor di LPD Kapal.

Pertama Ni Kadek Ratna Ningsih (38) asal Banjar Tegal, Kelurahan Kapal, Badung. Dia adalah kolektor (kini mantan) LPD Kapal. Kedua adalah Ni Wayan Suardiani (36) asal Banjar Panglan, Kapal, yang saat ini sebagai pegawai kontrak di RSUD Badung dan sebelumnya juga kolektor di LPD Desa Adat Kapal. Ketiga Ni Made Ayu Ardianti (42) asal Banjar Titih, Kapal. Dia juga mantan kolektor di LPD Desa Adat Kapal.

Lalu Ni Nyoman Sudiasih (36) asal Banjar Lagon, Kapal. Wanita tamatan SMK

ini juga kolektor di LPD Desa Adat Kapal. Dan terakhir adalah Ni Luh Rai Kristianti (50) asal Lingkungan Banjar Celuk, Kapal, yang juga mantan kolektor di LPD Desa Adat Kapal.

Kasipenkum dan Humas Kejati Bali Edwin Beslar didampingi salah satu tim Pidsus Kejati Bali Wayan Suardi membenarkan pihaknya menahan lima orang tersangka terkait dugaan korupsi di LPD Desa Adat Kapal. "Ya, sudah dilakukan tahap II di Kejari Badung. Dan mereka langsung kami tahan dan titipkan di Lapas Kerobokan," kata pihak kejaksanaan. Memang, sebelum mereka ditahan, dalam dakwaan mantan Kepala LPD Desa Kapal Drs. I Made Ladra, nama kolektor ini semuanya mengemuka.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya di Pengadilan Tipikor, dugaan keterlibatan lima orang perempuan kolektor ini terkuak manakala LPD Desa Adat Kapal, Badung mati suri. Untuk itu dilakukan verifikasi hingga dibentuk konsultan publik dan dilakukan audit. Dari sana

disimpulkan ada 11 temuan prinsip yang menyebabkan LPD Kapal mati suri.

Pertama, adanya pemufakatan jahat pengurus LPD Kapal hingga menikmati fasilitas kredit dalam jumlah yang besar. Banyak kredit LPD yang jatuh tempo, namun tidak dilakukan upaya penyelamatan. Adanya rekayasa pemberian kredit (*window dressing*) kepada mantan kolektor LPD atas nama Ni Luh Rai Kristianti Rp 8,5 miliar dengan bunga 1%. Adanya kredit topangan, atau kredit atas nama (fiktif).

Selain itu, ada kredit tempilan, pemberian kredit tanpa proses 5C, adanya pemalsuan dokumen gaji pegawai, adanya aset diambil alih atau digadaikan, terjadi potongan uang asuransi, adanya kebijakan yang merugikan LPD, beban kantor dan lainnya, termasuk terdakwa Ladra dengan menggunakan programer atas nama Martinus Baha mengubah data di LPD yang dipimpinnya. Tak pelak, sambung jaksa, LPD rugi hingga Rp 15,35 miliar. (kmb37)

Edisi : Sabtu, 6, April, 2019

Hal : 3



Lima Kolektor LPD Kapal Ditahan

★ Semuanya Wanita, Ikut Terlibat
Korupsi Rp 15M

kuman 3,5 tahun penjara dan mengembalikan kerugian negara Rp 1,7 miliar, kasus korupsi yang menyeret mantan Kepala LPD Kapal, Mengwi, Badung kembali bergulir. Kali ini, Kejati Bali kembali melakukan penahanan terhadap lima kolektor yang semua wanita yang diduga ikut menilep sejumlah uang milik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kapal, Mengwi, Badung senilai lebih dari Rp 15 miliar.

Lima kolektor yang ditahan, yaitu Ni Kadek Ratna Ningsih, 38 asal Banjar Tegal, Kelurahan Kapal, Badung, Ni Wayan Suardiani, 36 asal Banjar Penaglan, Kapal (saat

ini sebagai pegawai kontrak di RSUD Badung, Ni Made Ayu Ardianti, 42 Banjar Titih, Kapal, Ni Nyoman Sudiasih, 36, Banjar Lagon, Kapal, Ni Luh Rai Kristianti, 50 asal Lingkungan Banjar Celuk, Kapal. "Semuanya merupakan mantan kolektor di LPD Kapal," tegas Kasipenkum dan Humas Kejati Bali, Edwin Beslar didampingi jaksa Wayan Suardi, Jumat (5/4).

Penahanan ini disebutkan setelah jaksa menerima pelimpahan tahap II terkait kasus dugaan korupsi di LPD Kapal. Selanjutnya, kelima tersangka ini langsung dibawa ke Lapas Kelas IIA Kerobokan, Kuta Utara Ba-

dung untuk menjalani penahanan sambil menunggu jadwal sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Dijelaskan, dalam sidang dengan terdakwa mantan Kepala LPD Kapal, I Made Ladra, keterlibatan kelima kolektor mulai terkuak. Dugaan keterlibatan lima orang perempuan kolektor ini terkuak saat LPD Desa Adat Kapal, Badung, mati suri. Sehingga dilakukan verifikasi, hingga dibentuk konsultan publik dan dilakukan audit.

Dalam audit ditemukan yang menjadi tanggungan kolektor Ni Kadek Ratnaningsih antara lain temuan dana nasabah yang dipakai

Luh Rai Kristianti sejumlah Rp 1,82 miliar dan tabungan sukarela nasabah yang ditarik milik I Made Sama sebesar Rp 378 juta dan dikembalikan Rp 404 juta. Namun pengembalian menggunakan tabungan fiktif. "Sehingga total yang menjadi tanggungan Ni Kadek Ratnaningsih sebesar Rp 2,22 miliar," ujar Edwin. Selain itu yang menjadi tanggung jawab kolektor Ni Nyoman Sudiasih terkait dana tabungan nasabah sebesar Rp 400 juta. Yang menjadi tanggungan Wayan Suardani Rp 246,3 juta, dan tanggungan Ni Made Ayu Arsianti sebesar Rp 272,8 juta.

Seperti diketahui dugaan

keterlibatan lima orang perempuan kolektor ini terkuak saat LPD Desa Adat Kapal mati suri. Sehingga dilakukan verifikasi, hingga dibentuk konsultan publik dan dilakukan audit. Dari sana disimpulkan ada 11 temuan prinsip yang menyebabkan LPD Kapal mati suri.

Pertama adanya pemufakatan jahat pengurus LPD Kapal hingga menikmati fasilitas kredit dalam jumlah yang besar. Banyak kredit LPD yang jatuh tempo, namun tidak dilakukan upaya penyelamatan. Adanya rekayasa pemberian kredit (window dressing) kepada mantan kolektor LPD atas nama Ni Luh Rai Kris-

tianti Rp 8,5 miliar dengan bunga 1%.

Adanya kredit topengan, atau kredit atas nama (fiktif). Selain itu ada kredit tempilan, pemberian kredit tanpa proses 5C, adanya pemalsuan dokumen gaji pegawai, adanya aset diambil alih atau digadikan, terjadi potongan uang asuransi, adanya kebijakan yang merugikan LPD, beban kantor dan lainnya, termasuk terdakwa Ladra dengan menggunakan programer atas nama Martinus Baha mengubah data di LPD yang dipimpinnya. Hasil audit BPKP Wilayah Bali menemukan kerugian LPD Kapal Rp 15,35 miliar. rez

Edisi : Sabtu, 6, April, 2019

Hal : 5



Peremajaan PIPANISASI Jalan Nangka-Antasura

Anggaran dari APBN

Belum Jelas

Dengan tidak ada kepastian itu, selain akan mengundur peremajaan pipa juga berdampak pada perbaikan Jalan Nangka-Antasura.

DENPASAR, NusaBali

Anggaran pipanisasi Jalan Nangka - Antasura Denpasar yang diajukan ke Anggaran

Pendapatan Belanja Nasional (APBN) sebesar Rp 9,2 miliar oleh PDAM Kota Denpasar hingga kini belum jelas realisasinya. Sebab, dari kementerian hingga saat ini belum berani memastikan apakah anggaran pusat bisa diprioritaskan ke penggantian pipa atau tidak. Hal itu membuat pihak PDAM kembali menunggu keputusan pusat.

Padahal pengajuan anggaran tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2017 untuk peremajaan pipa sepanjang 5,6 kilometer. Pipa-pipa tersebut membutuhkan peremajaan karena umur pipa sudah mencapai 50 tahun. Pada

hal, harusnya peremajaan pipa dilakukan maksimal 30 tahun. Hal itu membuat kekhawatiran PDAM karena dengan umur pipa yang sudah tua memungkinkan kebocoran akan sering terjadi.

Direktur Utama PDAM Kota Denpasar, IB Arsana saat dikonfirmasi, Jumat (6/4) mengaku, hingga saat ini dari pusat sama sekali belum bisa memastikan realisasi anggaran itu. Dengan tidak ada kepastian itu, selain akan mengundur peremajaan pipa juga berdampak pada perbaikan Jalan Nangka-Antasura yang selama ini dikeluhkan warga karena bergelombang.

Dengan kondisi itu, pihaknya berencana akan mengajukan ke APBD dengan tambahan anggaran yang dimiliki PDAM. Kendati dipastikan tidak mencukupi untuk peremajaan seluruh kebutuhan pipa, pihaknya berharap sebelum ada realisasi dari APBN, pipa yang diprioritaskan harus diganti akan didahulukan menggunakan APBD. "Rencana kedua begitu (mengajukan ke APBD), kalau ada anggaran akan diajukan tahun 2020 nanti. Walaupun tidak mencukupi keseluruhan paling tidak kita bisa lakukan peremajaan secara bertahap.

Kalau tidak begitu ya kami terpaksa tetap menunggu dari anggaran APBN," jelas Arsana.

Kata dia, saat ini pihaknya menyarankan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk melakukan perbaikan jalan. Jika tidak dilakukan saat ini, masyarakat kembali akan protes karena proses perbaikan jalan terlalu lama dengan alasan PDAM. "Ya karena belum ada realisasi, jadi mau tidak mau PUPR kita sarankan untuk perbaikan saja. Kalau menunggu peremajaan kami gak tau kapan terealisasi," imbuhnya. mis

Edisi : Sabtu, 6 April 2019

Hal : 3



Atas Kenaikan Tarif PBB P2

BKD Kaji Keberatan Wajib Pajak

Singaraja (Bali Post) –

Adanya kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2) itu memicu keberatan para Wajib Pajak (WP) di Buleleng. Ini karena dampak penyesuaian tarif yang mulai berlaku 2019 itu, membuat kewajiban WP jadi membengkak dibandingkan tahun sebelumnya.

Atas kondisi ini, Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng mempersilakan WP melaporkan keberatannya. Kalau keberatan WP itu masuk akal, maka pihak BKD dipastikan akan pengurangan PBB P2 sampai setengah dari total tagihan pajak itu.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BKD Buleleng Gede Suyasa, Minggu (7/4) kemarin mengatakan, setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dicetak dan didistribusikan. Sejahter ini BKD sudah menyosialisasikan kepada WP untuk mencermati dokumen pajak yang diterima. Dari cara itu WP memandang nilai pajaknya tidak masuk akal. Nilai kenaikannya benar-benar memberatkan. "WP kami persilakan mengajukan keberatan ditujukan kepada BKD," pinta Gede Suyasa.

Namun sejauh ini, memang pihak WP relatif banyak yang keberatan dengan kenaikan tarif PBB P2 itu.

Bahkan keberatan itu mulai dikaji tim dan dilaporkan kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana.

"Setelah saya ditugaskan di BKD, Senin (8/4) hari ini kami akan mengkaji keberatan WP terhadap kenaikan PBB P2. Saya masih mempelajari karena ini dilaksanakan oleh pejabat sebelumnya," katanya.

Birokrat asal Desa/Kecamatan Tejakula itu menambahkan, kajian atas keberatan itu akan dilaporkan kepada Bupati. Kalau berdasarkan perhitungan teknis dan pertimbangan penting, Bupati bisa saja memberikan pengurangan pajak. Tentu saja, keputusan pimpinan berdasarkan *grade* yang sudah ditentukan. Sehingga dari keberatan yang diajukan akan ditindaklanjuti. Selain masalah teknis penghitungan, bisa saja pengurangan pajak itu diberikan dengan pertimbangan kemampuan WP melunasi kewajibannya.

"Nanti akan ada penetapan pimpinan di daerah. Yang pasti keberatan ini akan ditindaklanjuti berdasarkan *grade* masing-masing dan juga pertimbangan teknis lainnya," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, tahun 2018 lalu pemerintah menyempurnakan penetapan tarif PBB P2 bersama DPRD Buleleng. Setelah dilakukan pembahasan secara alot, penyempurnaan tarif itu disepakati mulai berlaku tahun ini. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup), tarif PBB P2 itu dihitung berdasarkan zona dan perkembangan harga tanah terbaru. Dari sekian banyak zona, penghitungan nilai pajak berdasarkan zona objek pajak di jalan protokol, jalan desa, kawasan pariwisata, dan masih banyak zona lainnya.

Menyusul penyempurnaan itu, SPPT tahun 2019 sudah dicetak. Bahkan sudah didistribusikan kepada para WP di Bali Utara. Hasilnya, WP mulai mengajukan keberatan terhadap penetapan PBB P2 yang telah disempurnakan itu. Ini karena, perkembangan harga tanah menyebabkan pajak yang wajib dilunasi jadi nilainya bertambah, dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. (kmb38)

Edisi : Senin, 8 April, 2019

Hal : 8



Program Internet Desa Gratis Dianggarkan Rp 2,1 Miliar



Drs. Made Agus Harta Wiguna

Bali Post/bit

Tabanan (Bali Post) -

Pemprov Bali berencana memasang jaringan internet (wifi) di seluruh desa adat, puskesmas dan objek wisata yang dananya bersumber dari BKK 2019. Dari sembilan kabupaten/kota di Bali, Kabupaten Tabanan mendapatkan anggaran paling banyak yakni Rp 2,1 miliar lebih. Anggaran tersebut rencananya digunakan untuk program internet gratis di 393 titik.

Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tabanan Drs. Made Agus Harta Wiguna menyampaikan, dana dari provinsi dimanfaatkan untuk menyewa *bandwith* untuk meng-cover seluruh 349 desa pakraman, 20 puskesmas dan 10 objek wisata di Tabanan. "Ada juknis yang mengatur hal itu dan sudah ditentukan lokasinya sebanyak 393 di seluruh Tabanan," ungkap Agus, Minggu (7/4) kemarin.

Program ini akan segera direalisasikan. Salah satunya dengan pemilihan penyedia melalui e-katalog. Sementara untuk keberlanjutan program ini, Pemkab Tabanan telah mengusulkan BKK provinsi untuk tahun anggaran 2020.

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menerangkan, pemasangan wifi gratis nantinya akan dikemas dalam satu aplikasi *Bali Smart Island*. Tahap pertama menasar desa adat, destinasi wisata, dan puskesmas. Selanjutnya akan menasar sekolah, kampus, permukiman padat dan sebagainya. (kmb28)

Edisi : Senin, 8, April, 2019

Hal : 4



Pesisir Pulau Ceningan Terancam Abrasi

SEMARAPURA, TRIBUN BALI- Ketut Sumerta (50) sedang melabuhkan sampannya di pesisir Pulau Ceningan, Minggu (7/4). Sejenak kemudian warga asal Ceningan itu lantas duduk di pesisir pantai berpasir putih di sekitar Jembatan Kuning. Ia sempat menunjukkan runtuhnya tanggul yang roboh.

"Informasinya pesisir ini mau dibangun tanggul oleh pemerintah, tapi belum terealisasi," ujarnya.

Ia berharap pemerintah dapat segera membangun tanggul di lokasi itu agar pesisir tidak kunjung tergerus abrasi. Terlebih pesisir di sekitar Jembatan Kuning menjadi akses penting bagi warga untuk melabuhkan jukung-jukung, termasuk boat kecil.

"Sebenarnya ini sudah ada

tanggul sebelumnya. Tapi rusak. Semoga yang rusak ini bisa dibangun kembali," jelasnya.

Pemkab Klungkung memang telah berencana membangun tanggul untuk mengantisipasi abrasi di pesisir Ceningan, tepatnya di pesisir sekitar Jembatan Kuning. Jika tanggul tidak kunjung dibangun, dikhawatirkan air laut akan mengikis pesisir pantai berpasir putih ini.

Plt Kadis PU Klungkung, Nyoman Susanta menjelaskan, perencanaan untuk pembuatan tanggul tersebut telah dibuat tahun 2017 silam. Namun hingga saat ini tanggul itu belum terealisasi karena minimnya anggaran.

Tanggul di pesisir Pulau Ceningan ini rencananya dibangun sepanjang 26 meter

dengan anggaran sekitar Rp 500 juta. Terlebih Bupati Suwirta memiliki rencana untuk melakukan penataan terhadap pesisir di sekitar Jembatan Kuning yang telah menjadi ikon Pulau Lemongan-Ceningan.

"Semoga tahun 2020 tanggul ini bisa terealisasi. Pembuatan tanggul memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Per meternya,

bisa mencapai Rp 20 juta," ungkap Nyoman Susanta.

Berdasarkan data terakhir Dinas PU Klungkung, saat ini pesisir Klungkung yang rawan abrasi panjangnya sekitar 25,77 km. Dari jumlah itu, ada sekitar 13,523 kilometer yang telah berhasil ditangani. Sementara sisanya sekitar 12,247 kilometer garis pantai rawan abrasi di Kabupaten Klungkung akan

ditangani secara bertahap. Sekitar 6,5 kilometer pesisir abrasi ada di Klungkung daratan dan sekitar 5,75 kilometer ada di Nusa Penida.

"Tahun ini saja kami menganggarkan penanganan abrasi sejumlah Rp 2 miliar dan difokuskan di Banjar Kutapang, Desa Batununggal. Kami perkirakan anggaran itu dapat tertangani sekitar 100 meter," ungkapnya. (mit)

Tidak Ada Anggaran Penanganan

PLT Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat Klungkung, I Nyoman Susanta menjelaskan, tahun 2019 ini tidak ada anggaran penanganan abrasi dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida.

Pihaknya telah mengajukan permohonan untuk penanganan 12,247 kilometer garis pantai

rawan abrasi yang ada di Klungkung.

"Kami tidak tahu apa penyebabnya. Untuk target penanganan abrasi, tentu kami harus lihat renstra BWS Bali-Penida, karena menyangkut kewenangan. Tetapi kami juga memasang di renstra dinas tiap tahun 100 meter sampai tahun 2023," ungkapnya. (mit)



Denpasar Anggarkan PKB Rp 3,5 M

Ikuti 26 Materi, Semua Siap Tempur

DENPASAR - Dana Pesta Kesenian Bali (PKB) di jaman pemerintahan Gubernur Wayan Koster sepertinya berat ke kabupaten/kota. Buktinya, dana PKB dari provinsi hanya ratusan juta sementara dana PKB Pemkot Denpasar mencapai Rp 3,5 miliar.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Den-

pasar, IGN Bagus Mataram saat dikonfirmasi, Minggu (7/4) mengungkapkan, total anggaran PKB ke-41 untuk Denpasar mencapai Rp 3,5 miliar. "Ya, kalau anggaran secara keseluruhan lebih kurang Rp 3,5 miliar," kata Mataram. Lanjutnya, Denpasar mengikuti 26 materi yang diwajibkan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali selaku panitia penyelenggara PKB. "Denpasar sendiri sangat siap menyambut gelaran seni tahunan di Bali ini," ucapnya.

Denpasar juga sudah sangat siap mengikuti PKB, mulai dari penunjukan duta serta finalisasi materi yang akan dibawakan. "Kami telah siap mengikuti seluruh materi yang diberikan provinsi, sebanyak 26 materi dengan melibatkan 2.500 sampai 3000 seniman. Secara umum sudah siap berlaga," kata Mataram.

Materi yang dimaksud Mataram itu terbagi dalam beberapa jenis yakni pawai, parade, lomba, pagelaran, work-

shop, pameran, dan sarasehan. "Gelaran PKB ini agar dimanfaatkan oleh insan seni Kota Denpasar sebagai ajang apresiasi seni dan kebudayaan Bali, sehingga ke depan seni, budaya serta kearifan lokal Bali dapat tetap ajeg dan lestari dengan tetap berpedoman pada pakem-pakem seni itu sendiri," katanya.

Untuk diketahui PKB ke-XLI (41) Tahun 2019 ini mengangkat tema pokok Bayu Pramana yang mengandung makna memuliakan sumber daya angin. (feb/dit)

Edisi : Senin, 8 April, 2019

Hal : 4



Bangun Jembatan, Bongkar Plang Penginapan

AMLAPURA, NusaBali

Warga Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Karangasem ramai-ramai membongkar plang nama penginapan di Banjar Bislantang Kaler, Desa Purwakerthi, Minggu (7/4). Tujuan pembongkaran untuk memperlancar pembangunan jembatan menghubungkan dari pusat Desa Purwakerthi ke Tukad Liki dan jalur itu juga tembus ke Desa Labasari, Kecamatan Abang.

Sebelum membongkar plang dengan tinggi sekitar 1,5 meter dan lebar 1 meter, terlebih dahulu krama Desa Purwakerthi menggelar paruman. Membicarakan membongkar plang salah satu penginapan milik I Ketut Dauh. Dalam paruman I Ketut Dayuh merelakan plang penginapannya dibongkar karena mencolok ke jalan raya. Atas dasar kesepakatan itulah warga melakukan pembongkaran dikoordinasikan Perbekel Desa Purwakerthi, I Nengah Karyawan.

Nengah Karyawan menambahkan, pembangunan jembatan



Warga Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Karangasem, membongkar plang penginapan, Minggu (7/4).

segera direalisasikan tahun anggaran 2019 dan dari APBD Kabupaten Karangasem dengan panjang jembatan 12 meter dan lebar 6 meter. Sehingga nantinya memudahkan warga melintas di Tukad Liki. Selama ini warga melintas mesti menyusuri sungai dengan adanya jembatan, tidak akan pernah khawatir walau di musim hujan. Bangunan jem-

batan berbiaya Rp 2,4 miliar.

Pembangunan itu satu paket dengan pengaspalan jalan melasti dari Desa Purwakerthi ke Pantai Amed. "Kami mengapresiasi dukungan masyarakat untuk kelancaran pembangunan di desa, terutama pemilik plang penginapan, setelah kami beri penjelasan dan merelakan dilakukan pembongkaran," tambahnya. k16



Ikuti 26 Materi PKB, Denpasar Siapkan Rp 3,5 Miliar ✓

DENPASAR, NusaBali

Pesta Kesenian Bali (PKB) memasuki pelaksanaan ke-41. Kabupaten/kota mulai menyiapkan jumlah kesenian yang akan ditampilkan. Seperti Pemerintah Kota Denpasar yang tahun ini akan mengikuti sebanyak 26 materi dengan anggaran sebesar Rp3,5 Miliar.

PKB ke-41 yang mengambil tema 'Bayu Pramana: Memuliakan Sumber Daya Angin' rencananya akan digelar 15 Juni sampai 13 Juli 2019. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, IGN Bagus Mataram menjelaskan, materi yang akan diikuti pawai, parade, lomba, pagelaran, workshop, pameran, dan sarasehan. Dari 26 materi yang akan diikuti, akan melibatkan sekitar 3.000 orang, baik seniman maupun crew pembantu. "Kami sudah melakukan berbagai persiapan mulai dari penunjukan duta serta finalisasi materi yang akan dibawakan," ungkapnya.

Salah satu kesenian yang akan pentas mewakili Kota Denpasar adalah Janger Kedaton Sumerta. Kesenian yang ada di Banjar Kedaton, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur ini mendapat pembinaan dari tim provinsi Bali.

Koordinator Janger Kedaton, Made Sudiarmika mengatakan, Janger Kedaton sedianya akan tampil pada 23 Juni mendatang di Panggung Ksirarnawa Taman Budaya Denpasar. "Pada penampilan nanti di ajang PKB, kami akan menampilkan Janger Melampayan, dengan mengangkat cerita 'Hanuman Kecangkik'," ucapnya.

Keberadaan Janger Kedaton tersebut tidak lepas dari sejarahnya sebagai Janger Sesungguhnya krama Banjar Kedaton. Konon, Janger Sesungguhnya ini sudah ada sejak tahun 1906 dan tetap lestari hingga sekarang. Janger Kedaton selama ini juga sudah beberapa kali tampil di ajang PKB. "Kami melibatkan 25 orang penabuh, dan 32 orang penari. Yang kami libatkan di sini seluruhnya generasi muda Banjar Kedaton," imbuhnya.

Kadis Mataram berharap, ajang PKB ini bisa dimanfaatkan oleh insan seni Kota Denpasar sebagai ajang apresiasi seni dan kebudayaan Bali. Tidak hanya karena dipercaya menjadi wakil Kota Denpasar, namun lebih dari itu, ajang PKB dapat dijadikan sebagai kesadaran manusia Bali untuk menjaga seni budayanya mulai dari diri sendiri. "Pemilihan duta kesenian di Kota Denpasar selalu digilir di empat kecamatan. Karena itu kami berharap bisa maksimal hasilnya," tandas Mataram. [ind](#)

Edisi : Senin, 8, April, 2019

Hal : 3



Penyesuaian NJOP Menuai Protes

★ Kenaikan PBB Dianggap Tinggi

Kenaikan diprotes karena naik berlipat-lipat. Dari bayar Rp 300 ribu menjadi Rp 1 juta. Bahkan ada yang dari Rp 3,8 juta ditagih Rp 12 juta.

SINGARAJA, NusaBali

Penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), mulai menuai protes. Pemilik tanah selaku wajib pajak (WP) pun telah melayangkan surat keberatan ke kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) di Jalan Ngurah Rai Singaraja.

Penyesuaian tarif NJOP tersebut merupakan tindak lanjut dari perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2013, tentang PBB P2. Dalam penyesuaian itu, Pemkab Buleleng melalui Badan Keuangan Daerah (BKD), telah menyewa tim appraisal menghitung perubahan tariff NJOP PBB P2. Kini, penyesuaian tarif tersebut mulai diberlakukan untuk PBB P2 tahun 2019.

Data di BDK Buleleng menyebut, jumlah SPPT yang dicetak di tahun 2019 sebanyak 178.000 lembar. Jumlah tersebut telah didistribusikan ke masing-masing unit pelaksana

teknis (UPT) di masing-masing kecamatan, untuk diteruskan ke masing-masing WP. Nah setelah SPPT tersebar, WP mulai keberatan karena nilai pajak yang ditanggung kenaikannya cukup tinggi.

Seorang warga mengaku, memiliki lahan seluas 1 hektare, dulunya hanya bayar pajak sebesar Rp 300.000, tetapi sekarang naik sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang dulunya hanya membayar sebesar Rp 3.800.000, kini harus membayar sebesar Rp 12.000.000. "Kalau naik pasti naik, tetapi kenaikannya sekarang sangat banyak. Saya sudah layangkan surat keberatan ke BKD," ungkapnya.

Sementara, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Buleleng Minggu (7/4), tidak menampik sudah ada WP yang mengajukan keberatan terkait dengan pemberlakuan tariff NJOP yang baru. Karena itu, pihaknya akan mengkaji kembali kenaikan tarif tersebut. "Saya kan baru di BKD, jadi memang ada yang sudah melayangkan keberatan. Besok (Senin, hari ini, Red), kami akan bahas dan mengkajinya," katanya.

Menurut birokrat asal Desa/Kecamatan Tejakula ini, masih dimungkinkan adanya perbaikan tarif. Karena itu, terhadap keberatan yang sudah masuk, pihaknya akan mengevaluasi

kembali. Hasil evaluasi itu akan disampaikan kepada Bupati untuk dibuatkan ketetapan yang baru. "Nanti akan ada penetapan oleh pimpinan di daerah. Yang pasti keberatan ini akan ditindaklanjuti berdasarkan grade masing-masing, dan pertimbangan teknis lain," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, BKD Buleleng, Ni Nyoman Sukadani menyatakan, penyesuaian tariff NJOP itu akan berdampak adanya kenaikan PBB P2. "Bagi pemilik lahan hektaran, tentu kenaikannya akan terasa, karena pengenaan tariff NJOP-nya sudah berbeda. Tapi kalau yang punya tanah misalnya 2 are, paling kenaikannya hanya Rp 5.000," katanya.

Sukadani menyebut, pihaknya tetap memberikan kesempatan kepada WP untuk mengajukan keberatan terhadap penyesuaian tariff PBB tahun ini. Hanya saja, keberatan tersebut diajukan sebelum SPPT jatuh tempo tanggal 30 September 2019, maka keberatan atas kenaikan PBB tidak akan dilayani. "Sekarang ini, kami kan sudah mendistribusikan SPPT, nah kalau memang nanti ada yang keberatan silakan ajukan, jadi kami berikan waktu sampai 6 bulan. Tetap kalau keberatannya lewat dari tanggal 30 September, kami tidak terima, karena kami anggap tariff PBB itu sudah dapat diterima," jelasnya. ☎ k19

Edisi : Senin, 8, April, 2019

Hal : 4



Pembangunan Irradiator Gamma Senilai Rp 156 Miliar di Buleleng, Disetujui Pusat



• NUSABALILIK SURYA ARIANI

Plt Kadis Pertanian Buleleng, Made Sumiarta.

SINGARAJA, NusaBali

Tim Terpadu Kabupaten Buleleng sudah mengirimkan proposal untuk pembangunan Irradiator Gamma (perangkat untuk pengawet dan menjaga kualitas hasil pertanian) ke pusat. Proposal senilai Rp 156 miliar yang diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini pun telah disetujui pusat.

Tim Terpadu yang dikoordinasikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Buleleng, bersama Dinas Pertanian Buleleng, Dinas Perindustria & Perdagangan (Disperindag) Buleleng, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perikanan Buleleng, dan Dinas Lingkungan Hidup Buleleng ini sudah sempat audiensi dengan pejabat pusat. Menurut Plt Kadis Pertanian Buleleng, I Made Sumiarta, rencana pembangunan Irradiator Gamma sudah mendapatkan persetujuan pusat.

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Nantinya, Irradiator Gamma akan dibangun di atas lahan seluas 22 hektare di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. Lahan tersebut merupakan milik Pemprov Bali, yang saat ini masih digunakan sebagai areal Balai Benih Gerokgak. "Lahan Pemprov Bali di Desa Patas ini sudah mendapat persetujuan dari Gubernur (Wayan Koster) untuk pembangunan Irradiator Gamma," ungkap Made Sumiarta di Singaraja, Minggu (7/4).

Desa Patas sendiri dipilih sebagai lokasi proyek Irradiasi Gamma, karena desa yang berada di Buleleng Barat tersebut sudah dirancang Bupati Putu Agus Suradnyana untuk dikembangkan menjadi kawasan terpadu. Selain itu, Desa Patas juga dekat dengan Pelabuhan Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, hingga memudahkan akses penerimaan dan pengiriman hasil pengawetan.

Made Sumiarta berharap rencana proyek Irradiator Gamma ini sudah direalisasi-

kan tahun 2020 mendatang. Irradiator Gamma ini merupakan proyek besar untuk mengangkat hasil pertanian, peternakan, dan olahan pangan di Buleleng, untuk dikomersialkan.

Menurut Sumiarta, proses pengawetan yang masuk ke gudang Irradiator Gamma dipastikan akan berjumlah besar. Tak menutup kemungkinan buah, sayur, gading, dan bahan olahan lainnya dari luar Bali dapat masuk dan diawetkan dengan proses penyinaran alat di Irradiator Gamma, sehingga bisa tahan lebih lama sekitar 2-3 bulan.

"Proyek Irradiator Gamma ini skopnya besar. Tidak hanya Bali, tetapi buah dan produk pertanian, daging, dan olahan dari Jawa Timur, NTB, dan NTT bisa masuk ke sini. Di Indonesia saat ini baru ada dua, masing-masing di Serpong (Jawa Barat) dan Jogjakarta" papar Sumiarta.

Disebutkan, Irradiator Gamma di Buleleng nantinya akan dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda), sehingga memanfaatkan industri tersebut dapat bekerjasama dengan petani dan perusahaan-

perusahaan yang bergerak di bidangnya.

Sementara itu, Pemprov Bali juga mendukung penuh proyek Irradiator Gamma di Desa Patas ini. Pemprov Bali tengah memikirkan skema pembiayaan pembangunan Irradiasi Gamma yang mencapai Rp 156 miliar tersebut.

Dukungan Pemprov Bali terhadap rencana Pemkab Buleleng membangun Irradiator Gamma tersebut disampaikan Gubernur Koster saat bertatap muka dengan seluruh komponen masyarakat Buleleng di Gedung Kesenian Gde Manik, Jalan Udayana Singaraja, 17 Maret 2019 lalu, yang dihadiri langsung perangkat desa adat dan para Perbekel se-Buleleng, serta perwakilan guru dan tokoh masyarakat.

Gubernur Koster memperkirakan pembangunan Irradiator Gamma menghabiskan dana sebesar Rp 156 miliar. Irradiator Gamma tersebut ditargetkan sudah dibangun paling lambat tahun 2020 mendatang. "Sekarang saya sedang pikirkan skema pembiayaannya. Tapi, dari Pemkab Buleleng sudah mengusulkan

dana ke Kementerian Pertanian. Saya rasa kalau dananya sebesar Rp 156 miliar, pasti ada jalan keluarnya. Sedang saya pikirkan ini untuk kepentingan pertanian di Bali," tandas Koster dalam simakrama yang dihadiri pula Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat itu.

Menurut Koster, program pembangunan Irradiator Gamma tersebut sangat tepat, karena dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian di Bali. Apalagi, kini seluruh hotel di Bali diwajibkan menyajikan buah-buahan hasil pertanian lokal Bali.

Sedangkan Bupati Agus Suradnyana menyatakan hampir 70 persen hasil pertanian berupa buah-buahan di Bali berasal dari Buleleng. Karenanya, keberadaan Irradiator Gamma tersebut dapat menggerakkan sektor pertanian di Buleleng dan Bali umumnya. "Dengan alat Irradiator Gamma ini, buah mangga akan mampu bertahan selama 3 bulan. Jambu kristal kalau masuk hotel ada bintik latatnya, tamu tidak akan mau memakan. Tapi, dengan alat ini, semua akan hilang," katanya. k23

Edisi : Senin, 8 April, 2019

Hal : 1 dan 15



Pembaruan Kontrak BIFA Gagal

★ Setahun Tetap Bayar Rp 30 Juta

SINGARAJA, NusaBali

Rencana peninjauan nilai kontrak atas pemanfaatan Lapangan Terbang (Lapter) Letkol Wisnu di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, oleh Bali International Flight Academy (BIFA) gagal terwujud. Padahal, pihak BIFA sudah sepakat dengan nilai kontrak yang terbaru sebesar Rp 75.605.000 setahun. Kini Lapter Letkol Wisnu hanya menghasilkan sebesar Rp 30.000.000 setahun sesuai kontrak lama.

Rencana peninjauan nilai kontrak itu sudah dilakukan Pemkab Buleleng sebelum batas akhir pembayaran sewa Maret 2018. Dalam peninjauan ini, Pemkab Buleleng menunjuk Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara

dan Lelang (KPKNL) Singaraja melakukan appraisal harga atas aset tersebut. Akhirnya muncul harga sewa sebesar Rp 75.605.000. Nilai itu pun telah disepakati antara Pemkab dengan pihak BIFA.

Namun, sampai saat ini kontrak terbaru itu tidak kunjung bisa ditandatangani, lantaran aset di Lapter Letkol Wisnu juga milik Pemprov Bali. Kala itu, Pemprov ingin dalam kontrak tersebut dilibatkan. Hanya saja, Pemprov Bali masih melakukan pengukuran lahan untuk memastikan luas lahan di Lapter Letkol Wisnu.

Dulunya Pemkab Buleleng membangun Lapter di atas lahan Pemprov Bali, atas re-

komendasi dan persetujuan Gubernur Bali, kala itu Dewa Made Beratha pada tahun 2000 silam. Mulai dari landasan pacu sepanjang 900 meter dengan lebar 60 meter, pagar, menara air traffic control, serta beberapa bangunan lainnya. Fasilitas itu kemudian disewa oleh sekolah penerbang Bali International Flight Academy (BIFA) sejak tahun 2008, dengan nilai sewa sebesar Rp 30 juta setahun.

"Kami masih menunggu pihak Pemprov Bali, kemungkinan nantinya kerjasama itu melibatkan tiga pihak, Pemkab Buleleng, Pemprov Bali dan BIFA. Tetapi Pemprov Bali saat ini masih membuat status hukum (Ser-

tifikat, Red) dari lahan itu. Kami belum tahu perkembangannya," terang Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Buleleng, Gede Gunawan Ap, Minggu (7/4).

Disinggung masalah nilai kontrak? Kadishub Gunawan Ap menyatakan, sewa kontrak pemanfaatan Lapter Letkol Wisnu oleh BIFA masih berlaku kontrak yang lama. Dimana pihak BIFA tetap membayar sewa kontrak sebesar Rp 30 juta. "Karena belum tandatangan, jadi masih berlaku kontrak yang lama. Dan BIFA sudah membayar sewa sebesar Rp 30 juta. Kalau tidak salah Maret 2019 sudah dibayar sewanya itu," ujar Gunawan. **k19**

Edisi : Senin, 8 April 2019

Hal : 4



Anggota Dewan Disiapkan Uang Jasa Pengabdian

Bangli (Bali Post) -

Pemerintah Kabupaten Bangli telah menyiapkan uang jasa pengabdian untuk para anggota dewan yang akan mengakhiri masa pengabdian-nya. Berdasarkan data dari Sekretariat DPRD Bangli, besaran anggaran yang disiapkan untuk 30 anggota dewan tersebut yakni Rp 290 juta.

Sekretaris DPRD Bangli Anak Agung Panji Awatarayana, Senin (8/4) kemarin mengungkapkan, penganggaran uang jasa pengabdian bagi anggota dewan, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2017. Adapun besaran uang jasa pengabdian yang diterima masing-masing anggota dewan, disesuaikan dengan masa

baktinya.

Untuk anggota dewan yang masa baktinya kurang dari atau sampai dengan satu tahun, berhak menerima uang jasa pengabdian sebesar satu bulan uang representasi. Sementara untuk masa bakti sampai lima tahun, mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5 bulan atau paling banyak 6 bulan uang representasi.

Disebutkannya, nilai uang representatif anggota dewan berbeda-beda. Untuk Ketua, nilai uang representatifnya Rp 2.100.000, sementara Wakil Ketua Rp 1.680.000. Sedangkan anggota hanya Rp 1.575.000. Jika dihitung dengan masa baktinya sampai lima tahun, maka Ketua Dewan akan menerima Rp 12.600.000, sementara Wakil Ketua Rp 10.080.000 dan anggota Rp 9.450.000 per anggota.

Agung Panji mengatakan, dari 27 anggota, terdapat satu orang yang masa baktinya setahun. Dia adalah Wayan Artom, yang merupakan PAW dari alm. Made Bawa. Karena itu, dia hanya berhak atas uang jasa pengabdian sebesar 1 kali uang representatif.

Mengenai pencairannya, Agung Panji mengatakan akan dilakukan setelah masa bakti anggota dewan berakhir. "Masa bakti anggota dewan berakhir bulan Agustus 2019," ujarnya.

(kmb40)



Edisi : Selasa, 9, April 2019

Hal : 14



Bagikan 63 Mobil ke Perbekel, Tetap Minta BKK di Badung

PENGADAAN puluhan mobil Expander dan sepeda motor PCX di Kabupaten Gianyar, menjadi pergunjingan di masyarakat. Pengadaan 64 sepeda motor PCX hitam dan 63 mobil Expander hitam untuk perbekel ini, dinilai jor-joran dan bukan menjadi skala prioritas. Di tengah bagi-bagi mobil dan motor, Gianyar justru mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten Badung. Bantuan ini meliputi tujuh bidang, yaitu pariwisata, kebudayaan, pendidikan, pendataan asli daerah, pertanian, teknologi informasi dan pekerjaan umum (infrastruktur).

Berdasarkan informasi, bantuan tersebut akan diserahkan langsung oleh Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Rabu (10/4) besok. Bantuan yang diberikan pun tak main-main mencapai puluhan miliar.

Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Putu Ngurah Thomas Yuniarta membenarkan jika Bupati Badung mengagendakan menyerahkan BKK untuk Kabupaten Gianyar pada Rabu (10/4) besok. "Ya, Rabu besok bapak rencananya menyerahkan bantuan BKK di Tampaksiring, Gianyar. Kalau tidak salah bantuan yang diserahkan Rp 30 miliar," ungkapnya.

Ditanya apakah bantuan yang diberikan tidak bertolak

belakang dengan keberadaan Gianyar yang jor-joran membeli mobil untuk perbekel, Ngurah Thomas enggan menjawab. "Yang jelas Rabu diberikan (bantuan BKK)," ucapnya singkat.

Berita sebelumnya, Pemkab Badung dan Pemkab Gianyar telah menjalin kerja sama. Bupati Badung Nyoman Giri Prasta mengatakan yang melandasi kerja sama ini adalah Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Penandatanganan kerja sama ini dalam rangka meningkatkan koordinasi dan komunikasi, demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih optimal dan infrastruktur daerah

yang lebih baik. Selain itu kerja sama ini juga dimaksudkan untuk lebih memantapkan hubungan sinergis antardaerah, menyasraskan pembangunan daerah, mensinergikan po-

tensi antardaerah serta meningkatkan pertukaran pengetahuan dan teknologi masing-masing. "Maksud pelaksanaan kesepakatan bersama ini yaitu meningkatkan keterpaduan pengelolaan berbagai program kegiatan pembangunan daerah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat," ungkap Giri Prasta.

Penandatanganan kesepakatan ini merupakan satu bentuk penguatan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka ikut serta menyelesaikan tujuan pembangunan nasional, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. "Saya berharap implementasi dari

kesepakatan ini dapat saling bersinergi dengan program-program pemerintah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat secara optimal," kata Giri Prasta.

Sebelumnya, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra juga mengatakan bahwa dengan adanya MoU dengan Badung, minimal dapat merealisasikan harapan masyarakat yang segera ingin memiliki jalan yang bagus,

wantilan, balai banjar, pura, kesehatan, pendidikan yang bagus. Mewujudkan

hal tersebut diperlukan inovasi, kerja keras untuk menggalang potensi dana dari pajak dan retribusi. "Ini menunjukkan komitmen Bupati Badung bahwa tidak hanya membangun Badung, beliau telah memikirkan Bali. Tentunya peluang ini kami maksimalkan. Mudah-mudahan di 2019 nanti kita bisa wujudkan," jelasnya seraya menambahkan, bantuan ini nantinya dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK). (kmb27)

Dana Desa Tak Boleh untuk Beli Kendaraan

DANA Desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat utamanya digunakan untuk infrastruktur dan pemberdayaan. Khusus infrastruktur, yang dimaksud adalah infrastruktur dasar dan infrastruktur sosial dasar. Namun, masyarakat kerap salah mengartikan infrastruktur dasar dengan membuat taman, patung, atau tugu memakai Dana Desa.

Padahal yang dimaksud infrastruktur dasar adalah infrastruktur yang dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Seperti pembangunan poliklinik, pasar desa, dan jalan usaha tani. Tujuannya untuk mendorong pergerakan ekonomi di desa. Selain itu, Dana Desa juga tidak boleh dipakai untuk membeli kendaraan seperti sepeda motor dan mobil.

Baru-baru ini beredar kabar jika Dana Desa di Gianyar justru dipakai untuk membeli mobil operasional bagi para kepala desa. Ketika ditanyakan mengenai hal ini, Senin (8/4) kemarin, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali Ketut Lihadnyana membantah kabar tersebut. "Itu bukan Dana Desa dipakai, itu adalah 10 persen pajak retribusi daerah. Untuk urusan itu, diatur melalui peraturan bupati masing-masing," ujarnya.

Penggunaan Dana Desa yang dialokasikan dari APBN, lanjut Lihadnyana, diatur

dalam Peraturan Menteri Desa, yakni untuk peningkatan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan ekonomi. Untuk tahun 2019 ini sudah disalurkan Dana Desa tahap pertama dengan alokasi 70 persen. Sementara tahap kedua sedang berproses dan diharapkan cair Mei mendatang.

Anggota Komisi I DPRD Bali I Nyoman Oka Antara mengatakan, Dana Desa mestinya dipakai untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Salah satunya dengan membangun infrastruktur secara bergilir di desa. "Jangan sampai itu yang melanggar karena Dana Desa ini tanggung jawabnya berat juga. Sudah banyak yang kena, biar lebih berhati-hati. Kepala desa tidak boleh mementingkan diri sendiri," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR-RI I Gusti Agung Rai Wirajaya mengaku sudah sering mengingatkan kepala desa di seluruh Bali terkait pemeriksaan Dana Desa oleh BPK-RI. "Saya dengar ada selentingan Dana Desa digunakan untuk membeli kendaraan sepeda motor maupun mobil. Ini tidak boleh, ini benar-benar melanggar. Saya katakan sekarang tolong itu jangan dilakukan untuk kepala desa di seluruh Bali. Kalau itu dilakukan, saya mohon maaf, anda siap masuk ke dalam sebuah pelanggaran," ujar politisi PDI-P ini. (kmb32)

Edisi : Selasa, 9 April, 2019

Hal : 16



Plafon Pasar Seni Geopark Jebol

Disperindag Siapkan Anggaran Renovasi Rp 1 Miliar

Bangli (Bali Post) -

Sejumlah bagian bangunan Pasar Seni Geopark, Kintamani mulai mengalami kerusakan. Salah satunya pada bagian plafon di lantai atas. Untuk memperbaiki kerusakan pada bangunan pasar tersebut, Disperindag Kabupaten Bangli telah menyiapkan anggaran Rp 1 miliar.

Berdasarkan pantauan, kerusakan terjadi pada plafon lantai tiga pasar Seni Geopark khususnya pada ruangan di sisi utara yang pernah ditempati sebagai kantor Disparbud. Beberapa titik plafon tampak jebol. Lis plafonnya juga sudah banyak yang berjatuhan. Sementara material plafon yang jebol berserakan di lantai.

Pasar yang rampung dibangun pemerintah tahun 2014 lalu itu menelan anggaran miliaran rupiah. Selain mengalami kerusakan, lantai serta dinding bangunan pasar yang dibiarkan kosong bertahun-tahun itu juga tampak sangat kotor.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dis-

perindag) Kabupaten Bangli Nengah Sudibya tak menampik adanya kerusakan pada bagian plafon pasar Seni Geopark. Menurutnya, kerusakan itu terjadi karena pengaruh usia bangunan yang sudah beberapa tahun dan cuaca daerah setempat yang dingin.

Dikatakannya bahwa pada tahun ini pihaknya

telah merencanakan renovasi di pasar itu. Untuk merenovasinya, Disperindag Bangli telah menyiapkan anggaran Rp 1 miliar yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dari Kementerian Perindustrian.

Selain merenovasi beberapa bagian yang rusak seperti plafon termasuk toilet, Sudibya mengatakan, akan melakukan penataan interior. Sesuai perencanaan, Pasar Seni Geopark tersebut nantinya akan dijadikan sebagai pusat promosi barang kerajinan. "Untuk

penataan pasar seni itu kita gunakan jasa konsultan perencanaan. Bagaimana penataannya, penempatan produknya," terangnya. Nantinya setelah selesai direnovasi, pengelolaan Pasar Seni yang berlokasi di Penelokan itu rencananya akan diserahkan ke Badan Pengelola Pariwisata. (kmb40)

Edisi : Selasa, 9 April, 2019

Hal : 14



Perkuat Perekonomian Masyarakat

Ketua DPRD Badung Berikan Bantuan Modal UMKM

KETUA DPRD Badung Putu Parwata terus menepati janjinya dalam merealisasikan pembangunan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Badung. Politisi asal Dalung, Kuta Utara tersebut Senin (8/4) kemarin kembali menggelontorkan dana motivasi untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bagi masyarakat Badung. Ada dua warga yang dibantu dana motivasi penguatan UMKM tersebut, mereka adalah Ni Luh

MODAL USAHA -
Ketua DPRD Badung Putu Parwata memberikan dana penguatan modal UMKM untuk dua warga asal Dalung, bertempat di gedung DPRD Badung, Senin (8/4) kemarin.

Nariati dan Ni Ketut Adnyani.

Putu Parwata mengatakan, pemberdayaan masyarakat melalui penguatan modal UMKM ini adalah bagian terpenting dalam menjaga stabilitas perekonomian kabupaten. "Kegiatan ini adalah peran pemerintah dalam meningkatkan masyarakat berusaha untuk berdaya saing. Pemberian penguatan modal ini juga menghindari para pengusaha kecil ini meminjam dana dari rentenir dan mereka pun tidak terlilit utang oleh rentenir," ujarnya.

Lebih lanjut alumni Program Doktor Ekonomi Pembangunan Unud ini juga mengatakan, nanti untuk periode keempat pihaknya akan memberikan lagi bantuan untuk warung serta industri rumahan untuk 15

orang. "Merupakan salah satu kiat untuk menekan jumlah kemiskinan. Jika kesempatan berusaha ada, tentu saja masyarakat memiliki pendapatan untuk menjalani hidup," papar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung tersebut.

Selain lewat dana motivasi yang bersumber dari dana operasional Ketua DPRD Badung, tegasnya, bantuan permodalan juga dapat diperoleh dari hibah, *corporate social responsibility* (CSR) serta program yang disusun di organisasi perangkat daerah. Selain itu, Pemkab Badung masih bisa memberikan rekomendasi bagi pelaku UMKM untuk memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan BPD Bali dengan bunga hanya tujuh persen. "Khusus KUR hingga Rp 25 juta, tidak kena syarat

agunan," tegasnya.

Pihaknya bisa memberikan rekomendasi, kata Parwata, karena Pemkab Badung merupakan pemegang saham tertinggi di BPD Bali. Karena itu, tak ada alasan BPD tak mau menyalurkan KUR kepada UMKM di Badung.

Sementara salah satu penerima bantuan penguatan modal dari Ketua DPRD Badung, Ni Luh Nariati menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD Badung Putu Parwata yang sangat memperhatikan para pengusaha kecil seperti dirinya. "Bantuan ini nantinya saya gunakan untuk menambah usaha yang sedang digeluti saat ini. Mudah-mudahan bantuan ini bisa terus berlanjut dan menambah motivasi masyarakat untuk membangun usahanya," ungkapnya. (ad323)





"Ngenteg Linggih" di Pura Ulun Desa Banjar Telengis Desa Bengkel Tabanan

Wabup Suiasa Serahkan Hibah Rp 1,3 Miliar Lebih

USAI pemugaran dan pembangunan beberapa *palinggih* di Pura Ulun Desa, Banjar Adat Telengis, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Tabanan, dilaksanakan upacara *Ngenteg Linggih*. Acara dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Wakil Bupati Tabanan I Komang Sanjaya, para tokoh adat dan masyarakat Desa Bengkel, serta *krama* dan *pangemong* pura tersebut, Senin (8/4) kemarin.

Ketua Panitia Pembangunan I Wayan Kandri mengatakan, pihaknya atas nama masyarakat Desa Bengkel mengucapkan terima kasih, di antaranya kepada Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah

Kabupaten Tabanan dan para donatur yang telah ikhlas memberikan bantuan. Berkat dukungan berbagai pihak, pembangunan Pura Ulun Desa yang diempon 60 KK tersebut bisa terselesaikan.

Dituturkan Kandri, pembangunan pura berdasarkan *rembuk krama*, karena jumlah *pangemong* kian bertambah. Perluasan diawali dengan membeli 2 hektar tanah di lokasi pura tersebut seharga Rp 130 juta. Sementara membangun *palinggih* menghabiskan Rp 900 juta. "Untuk pembangunan dan penataan pura, kami mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali, Pemkab Tabanan dan bantuan BKK dari Pemkab Badung sebesar Rp 500 juta, serta para donatur lainnya," ungkapnya.

Dikatakan pula, pembangunan dimulai dari tahun 2017. Sementara pelaksanaan *Ngenteg Linggih* dimulai Februari 2019 dengan puncak *karya* pada 10 April. "Biaya upacara dan pembangunan menghabiskan kurang lebih Rp 1 miliar. Kekurangan dari biaya tersebut kami tutupi dengan urunan bersama," jelasnya.

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dalam sambutannya mengatakan, pemberian bantuan ini merupakan implementasi prinsip "Badung Angelus Bhuana" yang berarti Badung Berbagi, dari Badung untuk Bali. Program ini telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Bali yang ditujukan ikut membangun manusia Bali dengan mengajegkan adat, seni, dan

budaya Bali. "Dengan pembangunan pura dan pelaksanaan upacara ini, telah menunjukkan jati diri umat se-dharma untuk tetap melestarikan seni, adat, dan agama Hindu," ungkapnya.

Pihaknya sangat mengapresiasi masyarakat Desa Bengkel yang telah melaksanakan *swadharmaning agama* dengan pembangunan pura serta melaksanakan upacara dengan gotong royong dan hati yang tulus ikhlas. "Semoga dengan dilaksanakannya upacara ini masyarakat mendapat *karahajengan* dan kesejahteraan oleh Ida Batara-Batari yang *malinggih* di pura ini. Dengan *yadnya*-lah kita bisa tunjukkan rasa terima kasih kepada Hyang Parama Kawi, agar kita selalu diberikan kesejahteraan," jelasnya.

Senada dengan Wabup Suiasa, Wakil Bupati Tabanan I Komang Sanjaya juga memberikan apresiasi. Pihaknya merasa bangga kepada warga Desa Bengkel dapat melaksanakan pembangunan dan melakukan upacara *Ngenteg Linggih* dengan *pakedek-pakenyum*. "Kami berharap ini tetap terus terjaga demi generasi

muda ke depan," imbuhnya. Sementara itu, Wagub Bali Tjokorda Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace menegaskan, *yadnya* merupakan tanggung jawab bersama sebagai umat Hindu kepada Hyang Parama Wisesa. "Pelaksanaan upacara ini tentu telah membawa energi yang positif kepada kita semua. Apalagi upacara

ini dilaksanakan secara bersama-sama dan tulus ikhlas," tegasnya.

Sebelum melaksanakan persembahyangan bersama, secara simbolis Wabup Suiasa menyerahkan hibah sebesar Rp 1,3 miliar lebih dan secara pribadi *mapunia* Rp 5 juta yang diterima langsung oleh panitia pembangunan. (ad328)



Gara-gara Saksi Parpol Mangkir dalam Pelatihan **Takut Anggaran Jadi Temuan BPK, Bawaslu Drop Buku Saku ke TPS**

DENPASAR, NusaBali

Inilah dampak mangkirnya saksi dari parpol peserta Pemilu 2019 saat hendak diberi pelatihan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali. Khawatir anggaran jadi temuan BPK, Bawaslu Bali pun berencana mengirimkan

secepatnya buku saku yang sudah dicetak senilai Rp 1,7 miliar ke TPS-TPS, sesuai dengan jumlah TPS Pileg/Pilpres.

Anggota Divisi Sengketa Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, mengatakan buku saku yang dicetak dengan menggunakan ang-

garan negara senilai Rp 1,7 miliar itu tidak boleh sia-sia. Harus diterima para peserta Pemilu, dalam hal ini saksi parpol. "Kami akan serahkan buku saku itu ke TPS-TPS. Jumlahnya sesuai dengan TPS yang ada di

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Takut Anggaran Jadi Temuan BPK, Bawaslu Drop.

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

seluruh Bali, 12.386 TPS," ujar Rudia di Denpasar, Senin (8/4).

Menurut Rudia, kalau buku saku yang dicetak dengan duit negara itu tidak sampai ke tangan saksi parpol peserta Pemilu, itu akan menjadi temuan BPK. Satu buku saja tidak sampai diterima dengan berita acara, bisa menjadi temuan BPK. "Kami khawatir kalau buku saku itu tidak terbagikan. Kami sudah tidak punya cukup waktu membagikan buku-buku itu. Sebab, saksi parpol yang hendak kita latih dan mau dikasi buku, malah tidak datang," sesal Rudia.

Untuk mensiati masalah ini, kata Rudia, Bawaslu Bali meminta parpol untuk mengikuti kegiatan pelatihan saksi dengan mengirimkan orang untuk hadir. "Karena ini aturan Pemilu. Norma yang menyebutkan saksi peserta Pemilu dilatih Bawaslu, itu jelas adalah lembaga DPR. Kami mengikuti aturan sesuai dengan Undang-undang saja. Kita minta parpol mengikuti aturan," tegas mantan Ketua Bawaslu Bali 2013-2018 ini.

Itu baru masalah buku saku. Nelum lagi persoalan konsumsi yang mubazir gara-gara saksi parpol peserta Pemilu tidak hadir dalam pelatihan oleh Bawaslu. Menurut Rudia, sisa waktu pelatihan akan selesai Rabu (10/4) besok. Pihaknya berharap semua saksi parpol peserta Pemilu bisa hadir. "Kami tidak menyurati ulang, tapi kita hubungi lagi parpolnya. Karena sebelumnya surat sudah jalan. Kita berharap parpol tegas dengan saksinya suruh hadir."

Data yang dirangkum NusaBali sebelumnya, hampir seluruh kegiatan pelatihan saksi dari parpol diwarnai aksi mangkir. Kegiatan pelatihan saksi dari parpol ini digelar Bawaslu Bali sejak 1 April 2019 dan hingga kini masih berjalan di sejumlah kabupaten/kota se-Bali.

Parpol-parpol umumnya sudah menyetorkan daftar nama saksi ke Bawaslu untuk dilatih, namun ternyata sebagian besar tidak hadir. Bahkan, saat pelatihan di wilayah Karangasem dan Buleleng, ada parpol yang sama sekali tidak mengirimkan saksi. Akibatnya, konsumsi yang sudah dibeli oleh Panwascam dibagi-bagi-

kan kepada anak-anak sekolah dan ke beberapa panti asuhan. Hal yang sama juga terjadi saat kegiatan pelatihan saksi parpol di Tabanan.

Rudia mencontohkan pelatihan saksi dari Gerindra di Singaraja, Buleleng. Jumlah saksi yang didaftarkan Gerindra ke Bawaslu mencapai 132 orang, namun tak satu pun dari mereka hadir pelatihan. Sedangkan dari 325 saksi yang didaftarkan Golkar di Buleleng, hanya 15 orang yang hadir. Demikian pula dari 12 saksi yang didaftarkan NasDem, hanya 15 orang ikut pelatihan.

Kegiatan pelatihan saksi parpol yang digelar Bawaslu di Gedung Serbaguna Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Buleleng juga sama. Gerindra mendaftarkan 246 saksi, tapi yang hadir cuma 3 orang. Sedangkan Golkar mendaftarkan 153 saksi, tapi yang hadir hanya 55 orang. Demikian pula Partai Berkarya, mendaftarkan 117 saksi, tapi yang hadir cuma 1 orang. Contoh memprihatinkan lainnya terjadi di Gianyar, ketika Demokrat mendaftarkan 216 saksi, tapi yang hadir hanya 1 orang. **nat**

Edisi : Selasa, 9 April, 2019

Hal : 1 dan 15



Sikapi Protes Kenaikan PBB P2

BKD 'Lempar Bola' ke Dirjen Pajak

Koordinasi dilakukan dengan Dirjen Pajak karena pemberlakuan tarif baru sudah diterbitkan melalui Perda.

SINGARAJA, NusaBali
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buleleng, berencana berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pa-

jak, Kementerian Keuangan (Kemendagri) RI, menyusul banyaknya keberatan atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) akibat penyesuaian tarif Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Upaya itu dilakukan karena pemberlakuan tarif NJOP sudah diundangkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Rencana tersebut diputuskan dalam rapat antara BKD dengan Inspektorat dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng, Senin (8/4) di kantor BKD Buleleng, Jalan Ngurah Rai Singaraja.

Sekretaris BKD Buleleng, Ni Made Susi Adnyani dikonfirmasi usai rapat mengatakan, dari pembahasan awal BKD baru menyusun draf pengurangan untuk menindaklanjuti keberatan yang diajukan wajib pajak. Penyusunan draf ini berdasarkan pertimbangan prinsip kepatutan terhadap regulasi yang mengatur dan berkeadilan. Ini karena, pungutan PBB P2 sendiri berdasarkan Undang-Undang (UU) diikuti Peraturan Daerah (Perda). Regulasi ini sudah diundangkan, sehingga wajib diterapkan.

Karena itu, BKD akan ber-

kordinasi ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP), agar keputusan yang akan diambil nantinya tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. "Kami baru melakukan rapat awal dan pada dasarnya setiap keberatan itu kita tindaklanjuti, dan keputusan dalam penetapan keberatan pajaknya sesuai prinsip kepatutan dan berkeadilan," katanya.

Menurut Susi, sejak Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) didistribusikan ke setiap Unit Pelaksana Teknis (UPTD) di setiap kecamatan, pihaknya telah menerima beberapa jenis keberatan. Secara

detail berapa wajib pajak yang mengajukan keberatan belum dirinci.

Meski demikian, Susi menyebut kebanyakan wajib pajak keberatan atas kenaikan NJOP. Sedangkan, keberatan karena nilai pajak-nya naik dibandingkan tagihan pajak tahun terdahulu belum banyak yang masuk ke BKD. "Umumnya keberatan kenaikan NJOP dan keberatan PBB-nya naik belum banyak. Ini masih berproses paling lambat dalam seminggu ini sudah ada keputusan pengurangan pajak," jelasnya.

Sebelumnya, penyesuaian tarif NJOP tersebut meru-

pakan tindaklanjut dari perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2013, tentang PBB P2. Dalam penyesuaian itu, Pemkab Buleleng melalui Badan Keuangan Daerah (BKD), telah menyewa tim appraisal menghitung perubahan tarif NJOP PBB P2. Kini, penyesuaian tarif tersebut mulai diberlakukan untuk PBB P2 tahun 2019.

Data di BDK Buleleng menyebut, jumlah SPPT yang dicetak di tahun 2019 sebanyak 178.000 lembar. Jumlah tersebut telah didistribusikan ke masing-masing unit pelaksana teknis (UPT) di masing-masing

kecamatan, untuk diteruskan ke masing-masing WP. Nah setelah SPPT tersebar, WP mulai keberatan karena nilai pajak yang ditanggung kenaikannya cukup tinggi. Seorang warga mengaku, memiliki lahan seluas 1 hektare, dulunya hanya bayar pajak sebesar Rp 300.000, tetapi sekarang naik sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang dulunya hanya membayar sebesar Rp 3.800.000, kini harus membayar sebesar Rp 12.000.000. "Kalau naik pasti naik, tetapi kenaikannya sekarang sangat banyak. Saya sudah layangkan surat keberatan ke BKD," ungkapnya. **k19**



Disdikpora Kaji Lagi Beasiswa Luar Negeri

MANAGUPURA, NusaBali

Program beasiswa ke luar negeri tahap kedua untuk jenjang pendidikan S2 dan S3 sampai sekarang belum dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) masih melakukan kajian matang dan akan meminta petunjuk lebih lanjut pada pimpinan.

"Kami sudah menghadap Pak Sekda. Tapi masih harus didiskusikan dengan berbagai pihak terkait. Termasuk nanti akan dilaporkan kepada Bapak Bupati," ungkap Kepala Disdikpora Kabupaten Badung I Ketut Widia Astika, Senin (8/4).

Menurut Astika, nanti bila sudah ada petunjuk pimpinan, maka akan langsung diproses. "Kalau sudah ada petunjuk terutama mengenai pengang-

garan, baru berproses untuk program beasiswa ke luar negeri tahun 2019. Yang jelas, tahun ini beasiswa akan diberikan khusus untuk S2 dan S3. Masing-masing kuotanya untuk lima orang," ungkap mantan kepala SMKN 1 Kuta Selatan, tersebut.

Program beasiswa ke luar negeri tahun 2019 ini adalah program beasiswa tahap dua. Namun, program yang terlahir atas usulan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta ini terbatas hanya untuk Program Magister/S2 (Strata Dua) dan Program Doktor/S3 (Strata Tiga). Sementara, program beasiswa jenjang Strata Satu (S1) untuk tahun ini ditiadakan. Meniadakan program beasiswa S1 tahun 2019, bukan tanpa sebab. Menurut Astika, program beasiswa S1 sudah

berjalan tahun 2018. Pihaknya perlu melakukan evaluasi atas program tersebut sebelum melanjutkan.

Nah, bagi peserta yang terpilih menerima beasiswa tahap dua khusus untuk S2 dan S3, seluruh biaya selama menempuh pendidikan bakal ditanggung oleh Pemkab Badung. Masing-masing orang dianggarkan Rp 1,1 miliar per tahun.

Secara umum, persyaratan penerima program beasiswa S2 dan S3 ke luar negeri tidak jauh berbeda dengan penerima program beasiswa S1. Antara lain harus warga Badung, yang dibuktikan dengan KTP dan KK.

Kemudian, penerima beasiswa bebas memilih negara yang dituju. Sepanjang yang bersangkutan bersungguh-sungguh kuliah dan setelah ta-

mat siap menerapkan ilmunya untuk Pemerintah Kabupaten Badung.

Sekadar mengingatkan, program beasiswa ke luar negeri tahap pertama dimulai tahun 2018. Setelah melakukan tahapan seleksi yang ketat, Disdikpora Kabupaten Badung akhirnya memberangkatkan 20 orang pelajar berprestasi belajar ke luar negeri. Sebagian besar dari mereka memilih negara Australia sebagai tempat menimba ilmu. Selain itu, negara yang dipilih adalah Inggris, Belanda, dan Malaysia.

Bagi penerima beasiswa S1, mendapatkan anggaran sebesar Rp 500 juta per tahun. Penerima beasiswa pun wajib menandatangani MoU yang berisi setelah lulus kuliah siap mengabdikan untuk Pemerintah Kabupaten Badung. **asa**

Edisi : Selasa, 9 April, 2019

Hal : 2



Radar Bali

RAPAT PARIPURNA DPRD KLUNGKUNG BAHAS LKPJ BUPATI 2018

Pendapatan Daerah Capai Rp 1,1 Triliun

SEMARAPURA - DPRD Klungkung gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klungkung Tahun 2018 di Gedung Sabha Nawa Natya, DPRD Klungkung, Senin (8/4). Terungkap, realisasi Pendapatan Daerah (PD) 2018 capai 97,70 persen dari pagu indikatif perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebesar Rp 1,126 triliun.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta beberkan, realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun 2018 capai Rp 1,1 triliun atau mencapai 97,70 persen dari pagu indikatif perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebesar Rp 1,126 triliun.

Tak mencapai 100 persen lantaran realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Rp 186,993 miliar lebih atau 97,31 persen dari pagu indikatif perubahan RKPD 2018 sebesar Rp 192,166 miliar lebih. "Realisasi



DEWA AYU PITRI ARISANTURADAR BALI

LAPORAN: Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Klungkung 2018 di Gedung Sabha Nawa Natya, Kantor DPRD Klungkung, Senin kemarin (8/4).

pendapatan bersumber dari dana perimbangan sebesar Rp 669,716 miliar lebih atau lebih rendah Rp 10,9 miliar lebih dari pagu indikatif perubahan RKPD tahun 2018 sebesar Rp 680,647 miliar lebih," bebernya.

Begitu juga dengan realisasi belanja pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp 1,146 triliun lebih atau lebih rendah sebesar Rp 55,041 miliar lebih dari pagu indikatif perubahan RKPD tahun 2018. Itu lantaran realisasi belanja langsung mencapai Rp 502,145 miliar atau 89,35 persen dari indikatif perubahan

RKPD tahun 2018 yang dirancang sebesar Rp 562,009 miliar. "Sementara realisasi belanja

tidak langsung mencapai Rp 644,691 miliar lebih atau 100,75 persen dari indikator perubahan RKPD Tahun 2018 yang dirancang sebesar Rp 639,869 miliar," terangnya.

Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru apresiasi kinerja Bupati Klungkung di 2018. Katanya, LKPJ Bupati Klungkung Tahun 2018 selain memenuhi kewajiban konstitusi juga dimaksudkan sebagai upaya membangun transportasi dan memperkuat check and balances penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh DPRD. (adv/ayu/rid)

Edisi : Selasa, 9 April, 2019

Hal : 3



Radar Bali

Wakil Bupati Ketut Suiasa Serahkan Hibah Rp 1,195 Miliar

TABANAN - Usai pemugaran dan pembangunan beberapa palinggih di Pura Ulun Desa, Banjar Adat Telengis, Desa Bengkel, Kediri, Tabanan, dilaksanakan *Ngenteg Linggih*.

Ritual dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Wakil Bupati Tabanan I Komang Sanjaya, para tokoh adat dan masyarakat Desa Bengkel, serta *krama* dan *pangemong* pura tersebut, Senin (8/4).

Ketua panitia pembangunan I Wayan Kandri mengatakan, berterima kasih ke Pemprov Bali, Pemkab Badung, Pemkab Tabanan, serta para donator yang telah ikhlas memberikan bantuan. Sehingga, dalam pembangunan Pura Pura Ulun

Desa yang di-*mong* 60 kepala keluarga (KK) tersebut bisa selesai.

Dituturkan Kandri, pembangunan pura berdasarkan *rembuk krama*, karena jumlah *pangemong* kian bertambah. Guna perluasan, diawali membeli 2 hektare tanah di lokasi pura tersebut seharga Rp 130 juta. Sementara membangun palinggih menghabiskan Rp 900 juta. "Untuk pembangunan dan penataan pura ini, kami mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali, Pemkab Tabanan, dan bantuan BKK dari Pemkab Badung sebesar Rp 500 Juta, serta para donatur lainnya," ungkapnya.

Dikatakan, pembangunan dimulai dari 2017. *Ngenteg Linggih* dimulai Februari 2019 dengan puncak *karya* pada

10 April mendatang. "Biaya upacara dan pembangunan menghabiskan kurang lebih Rp 1 miliar. Kekurangan dari biaya tersebut kami tutupi dengan urunan bersama," jelasnya.

Wakil Bupati Badung I Ke-

tut Suiasa mengatakan, prinsip *Badung Angelus Bhuna*, berarti; Badung Berbagi, dari Badung untuk Bali, telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Bali. "Dengan pembangunan pura dan

pelaksanaan upacara ini, telah menunjukkan jati diri umat *se-dharma*, untuk tetap melestarikan seni, adat, dan agama Hindu," ungkapnya.

Suiasa sangat mengapresiasi masyarakat Desa Bengkel. Sebab, telah melaksanakan *swadharmaning* agama dengan pembangunan pura, serta melaksanakan upacara den-

gan gotong-royong dan hati tulus ikhlas.

Wakil Bupati Tabanan I Komang Sanjaya *pun* mengapresiasi. Pihaknya merasa bangga kepada warga Desa Bengkel dapat melaksanakan pembangunan dan melakukan upacara *Ngenteg Linggih* dengan *pakedek-pakenyum*.

Wagub Cok Ace menegas-

kan, *yadnya* merupakan tanggung jawab bersama sebagai umat Hindu kepada Hyang Parama Wisesa.

Sebelum melaksanakan persembahyangan bersama, secara simbolis Wabup Suiasa menyerahkan hibah Rp 1,195 miliar lebih dan secara pribadi *mepunia* Rp 5 juta, diterima panitia pembangunan. (adv/dwi/djo)

Edisi : Selasa, 9 April, 2019

Hal : 3



Anggarkan Rp 290 Juta untuk 30 Dewan

● Pemkab Beri DPRD Dana Purnabakti Sebagai Jasa Pengabdian

BANGLI, TRIBUN BALI - Jelang berakhirnya masa pengabdian anggota DPRD Bangli periode 2014-2019, Pemkab Bangli menganggarkan Rp 290 juta untuk 30 anggota dewan. Anggaran yang disebut dana purnabakti ini nantinya diberikan kepada seluruh anggota dewan sebagai jasa

pengabdian.

Sekretaris Dewan, Anak Agung Gde Panji Awatarayana menyebutkan, penganggaran uang jasa pengabdian ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota De-

wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Aturan tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2017. Karena sudah ada payung hukumnya, kami berani menganggarkan uang jasa pengabdian dalam APBD Tahun 2019,"

ungkapnya, Senin (8/4).

Pembagian dana purnabakti ini hanya diberikan sekali. Pembagian besaran uang jasa pengabdian, sesuai dengan masa bakti pimpinan serta anggota DPRD. Seperti masa bakti kurang dari atau sampai dengan satu tahun, maka besaran uang jasa pengabdian sebesar satu bulan uang representasi.

Sedangkan untuk masa bakti sampai lima tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar lima bulan atau paling banyak enam bulan uang representasi. Gung Panji mengatakan, uang representasi anggota dewan pada periode ini lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya. Seperti uang representasi bagi ketua DPRD yakni Rp 2,1 juta, wakil ketua Rp 1,6 juta, dan anggota sebesar Rp 1,5 juta.

"Dengan demikian untuk ketua DPRD Bangli nantinya akan menerima Rp 12,6 juta, wakil ketua Rp 10 juta, dan anggota Rp 9,4 juta. Untuk anggota yang mendapatkan jumlah sekian (Rp 9,4 juta) hanya sebanyak 26 orang. Sedangkan satu orang anggota dewan hanya mendapatkan uang jasa pengabdian satu bulan uang representasi sebesar Rp 1,5 juta mengingat yang bersangkutan merupakan PAW dari almarhum I Made Bawa," paparnya.

"Uang jasa pengabdian ini akan kami cairkan setelah masa bakti anggota dewan berakhir, yakni bulan Agustus 2019 nanti. Sementara sisa dari anggaran uang jasa pengabdian itu sudah tentu kita akan kembalikan ke kas daerah," tandasnya. (mer)

Edisi : Selasa, 9 April 2019

Hal : 5



Perekonomian Masyarakat Semakin Timpang

● Pemkab Klungkung Genjot Sektor UMKM dan Pertanian

BUPATI Klungkung I Nyoman Suwirta membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), di hadapan dewan dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (8/4). Ada beberapa hal yang menjadi point penting yang disampaikan Suwirta, yakni perekonomian masyarakat Klungkung yang semakin timpang, sehingga ke depannya pemerintah akan lebih menggenjot sektor UMKM serta pertanian.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru dan dihadiri 18 anggota dewan. Serta dihadiri Bupati Nyoman Suwirta dan jajarannya. Dalam paripurna tersebut, Suwirta menyampaikan secara umum kondisi perekonomian di Kabupaten Klungkung menunjukkan perkembangan positif. Mulai dari pertumbuhan ekonomi pada 2017 mencapai 5,34 persen, di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,07 persen.

"Titik puncak dari pertumbuhan ekonomi ini, memang tidak setinggi di tahun 2016 yang mencapai 6,02 persen. Perekonomian Klungkung di tahun 2016, melesat lantaran sektor pariwisata," jelasnya.

Kondisi ini ternyata juga berdampak pada gini ratio (ketimpangan) antara penduduk miskin dengan kaya di Klungkung yang semakin lebar. Hal ini karena sektor pariwisata biasanya digerakkan para pemodal, sementara sektor pendukung utama, seperti pertanian dikalahkan oleh sektor pariwisata.

"Kami akan terus genjot sektor UMKM dan pertanian. Perekonomian warga tidak boleh terlalu senjang, seperti saat ini," tegas Suwirta.

Terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2018, Suwirta memaparkan, realisasi pendapatan daerah pada 2018 sebesar Rp1,100 triliun atau mencapai 97,70 persen.

Sumber pendapatan dari dana perimbangan belum mencapai target. Yang mana penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak hanya terealisasi Rp 18,401 miliar (84,47



TRIBUN BALI/EKA MITA SUPUTRA

persen). Demikian juga dengan dana alokasi khusus yang terealisasi Rp 120,943 miliar dari pagu Rp 128,491 miliar atau hanya tercapai 94,13 persen. Sedangkan untuk realisasi belanja pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp 1,146 triliun atau lebih rendah Rp 55,041 miliar dari pagu indikatif RKPD tahun 2018.

Realisasi pendapatan daerah ini bersumber dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 186,993 miliar atau 97,31 persen dari pagu indikatif perubahan RKPD tahun 2018 yang ditetapkan Rp 192,166 Miliar. Di samping itu, realisasi pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan Rp 669,716 miliar, lebih rendah Rp 10,931 miliar dari pagu indikatif perubahan RKPD tahun 2018 Rp 680,647 miliar.

Terkait realisasi pembangunan, Bupati Suwirta menyampaikan, sepanjang 2018 sudah dituntaskan rehabilitasi jalan sepanjang 29,60 km, pembangunan gedung Instalansi Bedah Sentral (IBS) Rp 19,951 Miliar, pembangunan enam unit pasar, serta pembangunan 80 unit bedah rumah dan 47 unit rehab rumah.

Pada rapat paripurna itu diserahkan LKPJ ke Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru. (adv/mit)

Edisi : Selasa, 9 April 2019

Hal : 5



Rehab 7 SD Habiskan Rp 2,6 Miliar

DINAS Pendidikan Kota Denpasar menganggarkan Rp 2,6 miliar untuk rehab tujuh Sekolah Dasar (SD) di Kota Denpasar.

"Untuk yang kelanjutan perbaikan tahun 2018 kemarin, kami kebut dan rencanakan selesai sebelum tahun ajaran baru. Sehingga saat tahun ajaran baru, gedung itu sudah terpakai, kami kejar, sehingga target Mei atau Juni tuntas dan Juli bisa dipakai," kata Merta.

Untuk tahun 2019 ada tujuh sekolah yang direhab meliputi SDN 8 Sanur, SDN 6 Penatih, SDN 2 Tonja, SDN 15 Dauh Puri, SDN 14 Pedungan, SDN 27 Pemecutan, SDN 15 Pemecutan.

Adapun rehab ini untuk perhaban atap sekolah. Rehab tahun 2019 dengan anggaran Rp 2,636 miliar ini akan

dimulai bulan Mei 2019 dan ditargetkan tuntas pada September 2019. Dana ini bersumber dari APBD Kota Denpasar 2019.

"Nilai rehabnya nanti tergantung kebutuhan di sekolah masing-masing. Konsultan yang mengerjakan. Kita anggarakan dana segitu, kita mohon ke konsultan sebelum buat gambar atau DED agar ke sekolah dulu, tanya kepala sekolahnya apa yang diperlukan. Sekolah yang tentukan bagaimana," katanya.

Selain rehab atap, juga ada pembangunan Padmasana di dua sekolah yakni SDN 22 Dauh Puri, dan SDN 16 Pemecutan. Juga perbaikan tembok penyengker di SDN 11 Peguyangan, SDN 8 Pemecutan, SDN 6 Ssetan, SDN 17 Kesiman, SDN 18 Dangin Puri, dan SDN 4 Peguyangan. (sup)

Edisi : Selasa, 9 April 2009

Hal : 8



Digelontorkan DD Rp 78 Miliar Lebih

Pemberdayaan Masyarakat Jadi Prioritas Program



Bali Post/kmb41

Komang Agus Sukasena

Kabupaten Karangasem tahun 2019 mendapatkan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat Rp 78.781.974.000.

Kucuran jumlah dana desa itu termasuk mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 64.239.619.000. Dengan dana sebesar itu, lalu di sektor manakah dijadikan prioritas pembangunan oleh pihak Pemkab itu?

KADIS DPMD Karangasem Komang Agus Sukasena, Selasa (9/4) kemarin mengungkapkan, bantuan

DD untuk Karangasem itu memang mengalami peningkatan dari tahun lalu. Peningkatan alokasi DD yang

diberikan itu merupakan kebijakan pemerintah pusat. Pada tahun 2019, Karangasem mendapatkan dana desa (DD) dari pemerintah pusat Rp 78.781.974.000. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang jumlah DD-nya Rp 64.239.619.000.

Untuk menyalurkan bantuan DD ke-78 desa yang tersebar di Karangasem itu, kata Sukasena nilainya tidak sama antara satu desa dengan desa lainnya. Penyaluran DD itu diberikan berdasarkan sejumlah indikator. Param-

bingung, karena membutuhkan waktu cukup lama untuk mencoblos. Sebagian besar warga mengaku kesulitan melihat gambar partai dan calegnya. Demikian juga tulisan pada surat suara, juga amat kecil-kecil. Ada juga yang mengaku kesulitan melipat kembali surat suaranya, karena ukurannya yang cukup besar.

Salah satu warga Wayan Rasni, mengakui sulit mencari nama caleg pilihannya, karena tulisannya dianggap terlalu kecil. Demikian juga Wayan Sarna, mengaku

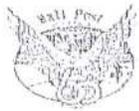
warnanya. Padahal, sebelum memasukkan sudah dipandu oleh petugas PPS yang menjaga dan mengarahkan di sekitar kotak suara. Hasil ini sedikit menjadi catatan, di mana proses sosialisasi KPU belum mampu memberikan pemahaman sepenuhnya kepada masyarakat dalam teknis memilih. Ini pula yang menjadi kekhawatiran banyak pihak, dengan sistem pemilu serentak ini, karena masyarakat di desa-desa nampak belum siap dengan sistem pemilihan seperti itu. (kmb31)

losan.

Ketua KPU Klungkung Gusti Lanang Mega Saskara, Selasa (9/4) kemarin, mengatakan kecamatan yang pertama kali disasar adalah Nusa Penida. Proses distribusi logistik ke Nusa Penida akan dilakukan pada 14 April nanti, menggunakan truk, kemudian diangkut menggunakan Kapal Roro dari Pelabuhan Padangbai menuju Nusa Penida. Total logistik ke Nusa Penida dengan jumlah TPS 190, sebanyak 950 kotak suara (satu TPS lima kotak suara) yang

Edisi : Rabu, 10 April 2019

Hal : 11



Pengadaan Mobil Expander Semestinya Tak Jadi Prioritas

PEMKAB Gianyar menyerahkan puluhan unit mobil Expander untuk 63 desa di Kabupaten Gianyar, kecuali Desa Pejeng. Pengadaan 63 unit mobil nilainya belasan miliar rupiah itu diperoleh dari Bagi Hasil Pajak (BHP) daerah Kabupaten Gianyar. Pengadaan ini mendapat sorotan. Pasalnya, anggaran tersebut seharusnya bisa digunakan untuk program lain yang lebih prioritas.

Kepala Dinas PMD Gianyar Dewa Ngakan Ngurah Adi menerangkan, pembelian mobil yang menggunakan dana BHP sudah sesuai Perbup 141/2018 tentang pedoman pemberian bagi hasil pajak kepada pemerintah desa tahun 2019. Berdasarkan perbup itu, pemerintahan desa berkewajiban menganggarkan pengadaan mobil dan motor tersebut. "Bapak Bupati berani mewajibkan

karena sesuai perbup ini, karena mempertimbangkan BHP yang naik signifikan, yakni dari Rp 53 miliar menjadi Rp 72 miliar untuk desa tahun ini," jelasnya.

Akibat kebijakan ini, sejumlah desa ada yang menunda pembangunan infrastruktur, karena harus menganggarkan pembelian mobil. Menanggapi persoalan tersebut, Dewa Adi menyebutkan, untuk pembangunan infrastruktur itu bisa menggunakan alokasi dana selain BHP. "Misalnya Dana Desa dari pusat itu kan dipertukarkan khusus membangun infrastruktur, bisa pakai itu seharusnya," katanya.

Anggota DPRD Gianyar I.B. Nyoman Rai menilai program pengadaan mobil operasional desa ini seharusnya diadakan selektif. Sebab, setiap desa memiliki kebutuhan berbeda.

Misalnya pemberian dengan mempertimbangkan prestasi desa, sehingga dapat diberikan bertahap sebagai bentuk *reward*. "Makanya ini seharusnya disertai dengan kajian wilayah dan sosial masyarakat," katanya.

Satu-satunya desa yang tidak ikut beli mobil adalah Desa Pejeng Kaja. Perbekel Pejeng Kaja Tjokorda Gde Agung beralasan saat ini sedang mengerjakan program pengolahan sampah 3R. "Kita sedang menjalankan program pengolahan sampah yang lumayan perlu dana, sebab tempat pembuangan sampah kan kita tidak bisa lagi timbun di jurang atau dibuang ke sana-ke mari, apalagi masyarakat sendiri ingin lingkungan bersih dan sehat," jelasnya.

Rencana pembangunan tempat pengolahan sampah

tersebut pasti direalisasikan, karena sudah dianggarkan dalam APBDes. Selain itu, tahun ini pihaknya juga fokus dalam perbaikan infrastruktur jalan pada salah satu banjar di Desa Pejeng. "Ada satu sudut yang belum diaspal, beberapa kali dirancang tapi batal, tahun ini sudah pasti dikerjakan itu. Nah, kalau misalnya kami mengadakan mobil, dengan jalan masih rusak, kan ribut warga saya. Makanya pertimbangan kami ke sana, untuk mobil tahun depan masih bisa," tandasnya.

Sebelumnya, bertepatan dengan *Tilem Kadasa*, Kamis (4/4), Pemkab Gianyar menyerahkan kendaraan operasional untuk Pemerintah Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Gianyar. Hal 15 Serah Terima

Serah Terima

Dari Hal. 1

Sebanyak 63 mobil Expander dan 64 sepeda motor PCX diserahkan langsung Bupati Gianyar I Made Mahayastra di Lapangan Astina Gianyar. Sesuai serah terima, acara dilanjutkan dengan *touring* ke Basang Ambu, Tampaksiring.

Berdasarkan data Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (DPMD), total pagu dana desa di Kabuapten Gianyar mencapai Rp 314,7 miliar. Jumlah itu berasal dari berbagai sumber seperti BKK Provinsi Bali untuk desa pakraman Rp 63,7 miliar, BKK Provinsi Bali untuk subak dan subak abian Rp 26,7 miliar, BKK Kabupaten Gianyar untuk desa pakraman Rp 5,3

miliar, Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 74,4 miliar, Pagu BHP 72,3 miliar, Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp 12,1 miliar dan Pagu Dana Desa 59,9 miliar. Dari seluruh dana itu, setiap desa di Kabupaten Gianyar bisa menerima dana miliaran rupiah. Seperti Desa Taru yang total menerima dana dari tujuh sumber itu sebesar Rp 9,8 miliar. (kmb35)

Edisi : Rabu, 10 April 2019

Hal : 1 dan 15



Belum Tertangani Sejak Jebol Tiga Tahun Lalu Warga Sulahan Sempat Protes ke Sedana

BANGLI, TRIBUN BALI - Sejak jebol tiga tahun lalu, jalan yang menjadi pintu masuk Desa Sulahan, Kecamatan Susut belum mendapat perbaikan. Padahal ruas jalan tersebut menjadi jalur perlintasan warga sekitar meski saat ini hanya menyisakan lebar 1,5 meter.

Wakil Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Artha sempat menyinggung kerusakan jalan di kampung halaman yang terbilang cukup parah tersebut. Ia sampaikan itu saat memimpin apel disiplin pertengahan tahun 2018.

Dikonfirmasi Selasa (9/4), Sedana Artha mengatakan

banyak masyarakat yang mengeluh kepadanya terkait jalan jebol itu mengingat kerusakan telah terjadi sejak tiga tahun terakhir. Ia pun mengungkapkan sudah menganggarkan perbaikan saat jalan itu jebol.

"Ini bukan sesuatu yang harus kita wacanakan, tapi perlu *action* (dari) pihak terkait dalam hal ini Kepala Dinas PU. Saya sudah perintahkan karena sudah ada anggarannya itu," katanya.

Sebelumnya, pejabat yang juga berasal dari Desa Sulahan ini mengaku sempat diprotes oleh warganya melalui media sosial lantaran

ruas jalan selebar tujuh meter itu tak kunjung mendapatkan perbaikan meski telah dianggarkan.

Di hadapan pegawai Pemkab Bangli kala itu, Sedana Artha meminta Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKim) Bangli segera merealisasikan perbaikan. Namun penegasan wakil bupati saat apel tersebut terkesan gertak sambal. Hingga bulan keempat tahun 2019 ini, jalan jebol sepanjang 20 meter tersebut belum diperbaiki juga.

Lalu kapan dimulainya perbaikan? Sedana Artha

menjawab, perbaikan dilakukan tahun ini. Sedangkan mengenai kendala lambatnya realisasi perbaikan dengan dana yang telah tersedia, ia mengarahkan *Tribun Bali* untuk konfirmasi ke Kepala Dinas PUPRKim.

Review dan Lelang

Sekretaris Dinas PUPRKim Bangli, I Made Soma mengatakan, tahun ini perbaikan jalan jebol menuju kampung halaman Wabup Bangli itu akan segera dikerjakan. Panjang kerusakan jalan mencapai 20 meter dengan lebar jalan yang tergerus 5,5 meter dari total lebar jalan tujuh

meter terhitung sampai bahu jalan. Anggaran perbaikan sudah diplot dengan nominal Rp 600 juta pada APBD induk 2019 ini.

"Setelah dibuatkan DED (*Detail Engineering Design*) oleh konsultan, perlu review sedikit untuk penyempurnaan. Paling tidak review ini

hanya membutuhkan waktu selama sepekan. Selanjutnya baru diajukan untuk proses lelang ke ULP (Unit Layanan Pengadaan)," jelasnya. (mer)

Anggaran Sebelumnya Tak Mencukupi

PERBAIKAN jalan tersebut sudah dianggarkan sejak diketahui jebol dengan nilai Rp 200 juta. Namun saat dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) belum disahkan, justru kerusakan semakin parah akibat tergerus hujan. "Setelah dievaluasi kembali, ternyata dana itu tidak mencukupi. Karena ada kekurangan dana serta tidak bisa dikerjakan, maka dianggarkan kembali pada tahun 2018 di (APBD) perubahan dengan anggaran Rp 600 juta," beber Sekretaris Dinas PUPRKim Bangli, I Made Soma.

Usai ditambahnya anggaran perbaikan, pengerjaan jalan jebol lagi-lagi tidak bisa direalisasikan. Soma menyebut, ini disebabkan pengesahan APBD Perubahan saat itu cenderung mepet, yakni sekitar bulan Oktober atau November. Sedangkan proses lelang kegiatan, setidaknya membutuhkan waktu selama sebulan. "Belum lagi pengerjaan senderannya yang membutuhkan waktu selama dua bulan. Oleh karena itu, kami putuskan untuk menunda dan dialihkan tahun 2019," tandasnya. (mer)



Made Urip Gelontorkan "Vertikal Dryer" Senilai Rp 1 Miliar Perjuangkan Nasib Petani dan Krama Subak di Bali

USAI menyerahkan bantuan vertikal *dryer* (mesin pengering padi) di Subak Bengkel, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Tabanan berkapasitas 10 ton senilai Rp 1,6 miliar, kini giliran Kelompok Tani Warna Merta di Desa Mambang, Selemadeg Timur, Tabanan, Selasa (9/4) lalu digelontorkan bantuan serupa, berkapasitas 6 ton senilai Rp 1 miliar oleh anggota Komisi IV DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs. I Made Urip, M.Si. Bantuan tersebut diresmikan secara simbolis oleh wakil rakyat sejuta traktor itu bersama anggota DPRD Tabanan Wayan Eddy Nugraha Giri, S.Sos., M.M. yang juga Caleg DPRD Tabanan dapil Kediri dan Marga dari PDI Perjuangan beserta jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Bali dan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, Camat Selemadeg Timur, Perbekel Desa Mambang serta Bendesa Adat Mambang Gede disaksikan ratusan petani dan *krama* subak setempat.

Ketua LUPM Warna Merta, I Made Tarka Suta, S.Sn., mengakui sengaja mengundangi Made Urip saat *memakuh* dan *melapas* bangunan dan mesin vertikal *dryer* karena satu-satunya wakil rakyat yang terbukti memperjuangkan nasib petani dan *krama* subak di seluruh Bali. Salah satunya, bantuan berupa bangunan dan mesin pengering padi atau gabah ini. Karena itu, merasa sangat bersyukur diberikan bantuan bangunan yang dilengkapi dengan mesin vertikal *dryer*. Bangunan dapat diselesaikan sekitar 15 Desember 2018 yang dikerjakan sejak 19 Oktober 2018. Untuk pemasangan mesin mulai 18 Desember 2018. "Bantuan ini peran serta dari Pak Made Urip yang sudah membantu aspirasi kelompok petani. Kita ucapkan terima kasih atas bantuannya dan siap mendukung Pak Urip periode berikut," bebernya.

Sementara itu, Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura I Nyoman Sunarta mewakili Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Bali menegaskan, demi petani Made



DIRESMIKAN - Anggota Komisi IV DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan Drs. I Made Urip, M.Si. saat meresmikan bantuan bangunan dan vertikal *dryer* Kelompok Tani Warna Merta di Desa Mambang, Selemadeg Timur, Tabanan, Selasa (9/4).

Urip memperjuangkan bantuan ini sebagai wujud keberpihakan petani dengan seribu *dryer* seluruh Indonesia. Salah satunya bangunan dan vertikal *dryer* ini terwujud berkat arahan dari Made Urip di tingkat pusat sebagai DPR-RI-nya petani. "Bapak ini memang khusus di pertanian yang saat kampanye semua diwujudkan, termasuk traktor yang banyak dibantu. Karena itu, bantuan ini harap digunakan dengan baik agar Pak Urip tidak malu memberikan bantuan ini," tandasnya.

Bendesa Adat Mambang Gede Wayan Gunadi, B.A., S.Sos. yang mewakili *krama* adat khusus kelompok tani mengucapkan terima kasih atas bantuan pusat yang diperjuangkan Made Urip. "Pak Urip sudah terbukti berkomitmen dan berpihak terhadap petani. Karena itu kami siap mendukung kelima kalinya maju ke DPR-RI. Karena figurnya sangat bersaja dan sangat memperhatikan para petani yang juga terbukti adanya bantuan sejuta traktor di seluruh Bali. Karena itu, kita kembali memberi mandat agar duduk kembali menjadi wakil rakyat di DPR-RI, karena sangat merasakan perjuangan Pak Urip khususnya bantuan untuk kelompok tani,"

imbuhnya.

Sementara itu, Made Urip mengaku sangat bangga saat kegiatan reses bisa melihat perkembangan kelompok tani mewujudkan *dryer* yang sudah bisa digunakan dan bermamfaat bagi *krama* subak di Desa Mambang. "Melihat hasil panen khususnya musim hujan sulit mengeringkan gabahnya, sehingga harganya jatuh. Karena itu lahir kebijakan mengangkat hasil panen, agar bisa bermanfaat dengan bantuan program alsintan termasuk *dryer*," jelas anggota DPR-RI empat periode ini.

Bahkan, Ketua DPP PDI Perjuangan yang ditugaskan kelima kalinya maju sebagai Caleg DPR-RI Dapil Bali nomor urut 1 dari PDI Perjuangan itu sebelumnya sudah sempat meresmikan vertikal *dryer* di Desa Bengkel dengan kapasitas yang lebih besar. "Saya berharap para petani yang mendapatkan bantuan supaya digunakan dengan baik, karena ada evaluasi dan monitoring dari pusat apakah bantuan sudah jalan apa tidak, sehingga harus dijaga betul dan terus mendapat pembinaan. Jika berjalan dengan baik bisa memacu semangat, agar kelompok lain juga dapat bantuan seperti ini," tutup anggota Bangar MPR-RI itu. (ad439)

Edisi : Kamis, 11 April, 2019

Hal : 4



dari Badung untuk Gianyar Rp 30 M Lebih Dana Hibah

Tahap Pertama Diserahkan Rp 18 Miliar ✓

PEMERINTAH Kabupaten Badung kembali menyerahkan dana hibah, kali ini sebesar Rp 30 miliar lebih dana hibah dialokasikan untuk Kabupaten Gianyar. Penyerahan tahap pertama diserahkan sebesar Rp 18 miliar oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bertempat di Wantilan Pura Tirta Empul Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring, Gianyar, Rabu (10/4) kemarin.

Kehadiran Bupati Giri Prasta disambut antusias oleh masyarakat Gianyar, diiringi dengan tari Baris dan tari Kecak. Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, anggota DPRD Provinsi Bali Nyoman Partha dan Kadek Diana, Ketua DPRD Kabupaten Gianyar

I Wayan Tagel Winarta, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayatra dengan Wakil Bupati Gianyar A.A. Mayun beserta pimpinan forum Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar, Kabag Humas Setda Badung Putu Ngurah Thomas Yuniartha, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara, Kepala Bagian Hukum Setda Badung I Nyoman Budi Argawa, dan Kepala BPKAD Badung I Ketut Suyasa.

Bupati Giri Prasta dalam sambutannya mengatakan penyerahan dana hibah ini merupakan program "Angelus Bhwana" yang bermakna "Badung Berbagi dari Badung untuk Bali". Sudah menjadi komitmennya sejak awal untuk meringankan beban masyarakat umat sedharma

di dalam melestarikan dan menjaga adat, tradisi, seni dan budaya Bali, bantuan hibah ini sebagai bentuk sayang dirinya terhadap sesama. "Di sinilah kami hadir bersama Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk meringankan beban masyarakat, saya kira sikap positif ini bisa kita lakukan bersama-sama. Ke depan pun kita harus bersatu padu membangun Bali ini. Kami memiliki konsep semakin banyak yang akan kita ajak bekerja semakin ringan beban *krama* Bali ini. Karena itu saya mengajak semeton, tokoh-tokoh *krama* Bali mari kita membangun, menjaga dan melestarikan pulau dewata yang kita cintai ini," ujar Bupati Giri Prasta.

Sementara itu, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayatra menyampaikan

ucapan terima kasih kepada Bupati Badung mewakili segenap masyarakat Gianyar atas bantuannya berupa dana hibah untuk membangun Kabupaten Gianyar dari Badung. Bupati Gianyar berjanji akan mengawasi penuh bantuan ini, sehingga pemanfaatannya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bermasalah nantinya. Untuk penerimaan dana hibah tahap pertama ini diterima oleh para bendesa 31 pakraman dari 3 kecamatan yaitu Tegallalang sebesar Rp 3,150 miliar, Payangan Rp 9,9 miliar dan Tampaksiring Rp 4,950 miliar, sedangkan pada tahap kedua akan diserahkan dana sebesar Rp 12,5 miliar untuk Kecamatan Sukawati, Ubud, Blahbatuh dan Gianyar. (ad449)



Wantilan Desa Diproyeksi Jadi Balinese Culture Meeting Point

NEGARA, NusaBali

Program Wifi gratis di seluruh Bali menuju 'Bali Smart Island' diluncurkan secara resmi Gubernur Wayan Koster di Wantilan Pura Puseh Desa Adat Dauh Waru, Kecamatan Jembrana, Rabu (10/4) sore. Ditargetkan tahun 2020 mendatang sudah terpa-

sang 4.157 akses poin Wifi gratis se-Bali. Gubernur Koster ingin wantilan desa adat nantinya menjadi 'Balinese Culture Meeting Point'.

Acara launching program Wifi gratis se-Bali di Wantilan Pura Puseh

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Desa Adat Dauh Waru, Rabu sore pukul 15.00 Wita, dihadiri ribuan peserta yang terdiri dari kalangan bendesa adat, para perbekel, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemuda. Peluncuran program Wifi gratis ditandai penekanan sirine yang dilakukan Gubernur Koster bersama Bupati Jembrana I Putu Artha, Wabup Jembrana I Made Kembang Hartawan, Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa, dan unsur Forkopimda Jembrana.

Gubernur Koster menyatakan, penyediaan Wifi gratis diberikan kepada seluruh desa adat di Bali. Melalui layanan internet gratis yang dipasang di masing-masing wantilan desa adat ini, pihaknya mengharapkan peningkatan kualitas SDM. Selain itu, wantilan desa adat nantinya bisa menjadi 'Balinese Culture Meeting Point'. Artinya, wantilan desa adat dimanfaatkan menjadi berbagai pusat kegiatan, baik pengembangan kebudayaan, kehidupan sosial, maupun ekonomi.

"Di Bali ada 1.493 desa adat, semuanya akan dapat layanan internet gratis. Selain itu, sekolah, Puskesmas, dan destinasi wisata juga semua dapat akses internet lebih mudah untuk keperluan banyak hal yang bermanfaat," tandas Koster seraya mengaku sudah menyiapkan SOP menyangkut layanan Wifi gratis ini, agar tidak disalah-

gunakan untuk mencari hal-hal yang bersifat negatif.

Menurut Koster, penyediaan Wifi gratis menuju 'Bali Smart Island' ini juga dijalankan untuk integritas kesatuan wilayah. Melalui layanan internet gratis di desa adat ini, juga bisa menjadi akses untuk memperluas pemasaran produk-produk lokal di masing-masing desa. Selain itu, juga memperkuat kepariwisataan, budaya, kesehatan, dan pengetahuan sesuai dengan potensi lokal dan wawasan global yang dimiliki.

Launching layanan internet gratis ini, kata Koster, sekaligus momentum memulai kreativitas dan inovasi dalam dinamika perubahan yang begitu cepat, tanpa melupakan akar budaya Bali sebagai spirit dalam mewujudkan Krama Bali Sejahtera. "Bali Smart Island ini kami harapkan dimanfaatkan seluruh komponen masyarakat untuk memperoleh informasi yang positif dan berguna sebagai referensi pengetahuan dalam memperkuat karakter budaya Bali secara umum," papar Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Sementara, Kadis Kominfo dan Statistik Provinsi Bali, Nyoman Sujaya, dalam sambutannya mengatakan penyediaan layanan internet gratis ini sudah dimulai sejak November 2018. Dari target 180

akses poin layanan internet gratis tahun 2018, sudah teralisasi 311 akses poin. Sedangkan di tahun 2019, ditargetkan pemasangan 1.825 akses poin Wifi gratis, dengan lokasi penempatan di wantilan desa adat sebanyak 1.371 akses poin, Puskesmas (107 akses poin), objek wisata seba (203 akses poin), SMA/SMK/SLB (132 akses poin), dan public area (12 akses poin). Hingga April ini, sudah terpasang 640 akses poin atau 35,07 persen dari total target 1.825 terpasang tahun 2019. "Diharapkan tahun ini semua direalisasikan sesuai target sasaran," ujar Sujaya.

Menurut Sujaya, berdasarkan jumlah desa adat, Puskesmas, sekolah dari SD hingga SMA, dan bertambahnya objek wisata potensial se-Bali, sampai tahun 2020 depan ditarget pemasangan Wifi gratis sebanyak 4.157 akses poin. Khusus di Jembrana, pada tahun 2018 sudah mendapat 25 akses poin Wifi gratis, sementara pada 2019 dapat jatah 89 akses poin, dan tahun 2020 mencapai 209 akses poin.

Anggaran pengadaan Wifi gratis ini, kata Sujaya, berasal dari belanja langsung. Rinciannya, pengadaan Wifi gratis tahun 2018 dengan anggaran Rp 165 juta, sementara untuk tahun 2019 dianggarkan Rp 10,18 miliar. "Anggaran ini dapat bertambah sejalan dengan kemampuan penyiapan infrastruktur serat optic ke

seluruh pelosok pedesaan di Bali," katanya.

Sementara itu, Bupati Putu Artha mengaku sangat mengapresiasi berbagai program Gubernur Koster beserta perhatiannya terhadap Jembrana. Termasuk soal program Wifi gratis ini. Menurut Bupati Artha, pihaknya sempat mengusulkan pengadaan 89 akses poin Wifi gratis. Namun, di luar dugaan Gubernur Koster memastikan akan menambahkan lagi 200 akses poin Wifi gratis, sehingga Jembrana total akan diberikan 289 akses poin.

"Tentu program ini sangat bagus. Selain dapat meningkatkan pengetahuan dan mengurangi kesenjangan digital masyarakat, pemerataan infrastruktur telekomunikasi dan internet juga dapat meningkatkan kualitas SDM krama Bali," tegas politisi PDIP yang sudah dua periode menjabat Bupati Jembrana ini.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan Wifi gratis ini, Bupati Artha mengharapkan peran serta masyarakat dan jajarannya, agar benar-benar menggunakan dan mensosialisasikannya dengan baik, sehingga dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas SDM. Masyarakat juga diminta menjaga dengan baik fasilitas yang disediakan. "Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya dan ikut menjaga," ajak Bupati Artha. @ode

Edisi : Kamis, 11 April, 2019

Hal : 1 dan 15



Radar Bali

Duo Kelian Dinas di Jembrana Dituntut 4,5 Tahun

DENPASAR – Tuntutan hukuman penjara lumayan tinggi diajukan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Jembrana terhadap Kelian Dinas Banjar Munduk Ranti, I Gede Astawa, 48 dan kelian Dinas Banjar Sari Kuning Tulungagung, I Dewa Ketut Artawan, 53. Duo kelian dinas dari Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, itu masing-masing dituntut penjara semalam 4,5 tahun.

JPU Gedion Ardana mewakili Jaksa Ivan Praditya Putra menilai dua kelian dinas tersebut bersalah mengorupsi dana santunan kematian Pemkab Jembrana tahun 2015. "Agar majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Gede Astawa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan (4,5 tahun) dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara," ujar JPU di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin (10/4).

Selain pidana badan, JPU juga meminta majelis hakim kepada majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila menjatuhkan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Selain itu, Astawa yang menjabat sebagai Kelian Dinas Banjar Munduk Ranti sejak tahun 2003 sampai tahun 2014 juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 32.700.000, atau harta bendanya disita atau diganti pidana penjara selama enam bulan.

Tuntutan pidana penjara dan denda yang sama juga dikenakan kepada terdakwa Artawan. Bedanya pada uang pengganti yang lebih besar, yakni Rp 70.400.000. Bila tak membayar, hartanya disita, atau dipidana penjara selama satu tahun.

JPU menilai kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan primer, yaitu Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menanggapi tuntutan JPU, masing-masing terdakwa melalui tim penasihat dari pos bantuan hukum (PBH) Peradi Denpasar akan mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis. "Kami minta waktu seminggu untuk menyampaikan pledoi, Yang Mulia," ujar Dewi Wulandari, salah satu pengacara terdakwa.

Seperti yang tertuang dalam dakwaan, kedua terdakwa mengajukan dana santunan kematian fiktif pada Dinas Kessosnakertrans Jembrana tahun 2015. Keduanya bekerja sama dengan Indah Suryaningsih (berkas terpisah), pegawai di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Jembrana. Dalam perkara ini juga melibatkan sejumlah kelian banjar di beberapa desa di Jembrana. Total anggaran santunan kematian dalam DPPA SKPD Dinkesosnakertrans tahun 2015 sebesar Rp 3.762.357.500 atau Rp 1,5 juta per warga yang meninggal. Dari santunan yang telah direalisasikan sebanyak 2.387 penerima senilai Rp 3,580 miliar, dan ada 301 berkas yang direkayasa (dokumen fiktif) dan diduplikasi untuk diajukan ulang. (san/yor)

Edisi : Kamis, 11 April 2019

Hal : 4.



Radar Bali

Kelompok Ternak Diberi Kandang Ayam Rp3,2 M

MANGUPURA - Pemerintah Kabupaten Badung terus menggelontor bantuan hibah ke masyarakat. Tidak hanya hibah pembangunan bale banjar dan pura, kini memberikan bantuan hibah untuk kandang ayam potong bagi satu kelompok masyarakat di Badung. Untuk satu kandang ayam, menghabiskan Rp 3,2 miliar yang nantinya diserahkan kepada kelompok ternak.

Kabid Produksi Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten

Badung I Gede Rama Bargawa menjelaskan, untuk pembangunan kandang ayam ini masih dalam proses lelang. Pagu anggaran Rp 3.250.958.174 yang diambil dari APBD 2019. Setelah pembangunan selesai, kemudian diserahkan kepada kelompok ternak. "Hibah ini (kandang ayam potong) diberikan kepada satu kelompok saja yakni Kelompok Jaya Mandiri Perkasa Banjar Tabah, Desa Taman, Abiansemal," terang Bargawa, Rabu (10/4) kemarin.

Secara terpisah Kepala Dinas

Perikanan Badung Putu Oka Swadiana menjelaskan, pemberian hibah ini untuk pemberdayaan peternak ayam di Badung sehingga dapat meningkatkan produksi. Seperti diketahui, populasi ayam pedaging di Badung naik 15 persen dari 611.503 ekor pada 2017 menjadi 703.962 ekor pada 2018. "Pemberian hibah ini tentu untuk meningkatkan produksi daging ayam di Badung," ungkapnya.

Selain itu konsep kandang ini juga dibuat bagus dan mewah

sehingga nanti bisa dijadikan objek studi banding oleh masyarakat. "Ya intinya ini menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kesejahteraan peternak di Badung," terangnya.

Begitu juga anggota DPRD Badung Nyoman Dirga Yusa asal Desa Taman, Abiansemal ini membenarkan bahwa ini adalah Kelompok yang mendapat hibah kandang ayam ini berasal dari Banjar Tabah, Desa Taman. Ia

meyakinkan bahwa kelompok ini bukan milik perorangan melainkan benar-benar kelompok. "Ini jauh dari fiktif. Ini benar-benar kelompok," jelas Dirga Yusa.

Dari penelusuran koran ini, bukan kali ini saja Kelompok Jaya Mandiri Perkasa mendapat bantuan hibah dari Pemkab Badung. Pada tahun 2017 lalu, kelompok ini juga mendapat hibah dari Pemkab Badung untuk ternak ayam buras senilai Rp25 juta. (dwi/yor)

Edisi : Kamis, 11 April 2019

Hal : 4



Keluarga Koruptor Protes

Klaim Barang Sitaan Negara Milik Mereka

SEMARAPURA- Kasus tindak pidana korupsi, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan mantan Bupati Klungkung periode tahun 2003-2008 dan tahun 2008-2013, I Wayan Candra kembali mencuat. Itu terjadi setelah dua kerabat Candra, I Nengah Nata Wisnaya dan I Ketut Rugeg asal Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan melayangkan gugatan kepada Kejaksaan Negeri Klungkung atas aset-aset yang menjadi barang sitaan negara. Atas adanya gugatan itu, Kejari Klungkung tidak hanya akan meladeni gugatan dua penggugat itu. Namun, kembali mempelajari kasus Candra untuk kemungkinan akan dilanjutkan.

Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Otto Sompotan didampingi Kasi Datun Kejari Klungkung, Cokorda Gede Agung Inrasunu dan Kasi Intel I Gusti Ngurah Anom Sukawinata saat dikonfirmasi di Kantor Kejari Klungkung, Rabu (10/4) membenarkan terkait gugatan yang dilakukan I Nengah Nata Wisnaya dan I Ketut Rugeg. "Benar, ada gugatan yang dilakukan dua penggugat tersebut," ungkapnya.

Gugatan itu berawal saat Kejari Klungkung berencana melakukan eksekusi terhadap 10 dari 51 bidang tanah beserta bangunan milik mantan Bupati Klungkung, I Wayan Candra menjadi barang rampasan negara atas kasus korupsi, gratifikasi, dan pencucian uang terkait pembangunan Dermaga Gunaksa yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Setelah rencana tersebut disiarkan oleh media masa, Nata dan Rugeg melakukan gugatan. Mereka berdua mengklaim sejumlah aset berupa tanah dan bangunan yang telah menjadi barang sitaan negara atas kasus Candra yang telah inkracht tersebut merupakan milik mereka. "Memang dokumen itu atas nama penggugat. Setiap warga negara berhak untuk mengajukan gugatan. Tetapi

yang menjadi tanda tanya, gugatannya kenapa baru sekarang saat kami akan eksekusi. Kenapa tidak pra-peradilan dari dulu, kenapa baru kami akan eksekusi dan muncul di berita baru menggugat. Kenapa?" ujarnya heran.

Atas gugatan tersebut, menurutnya Kejari Klungkung akan berjuang untuk mempertahankan barang yang kini berstatus barang rampasan negara tersebut. Apalagi pihaknya melihat bahwa pihak Candra kini berupaya untuk menyelamatkan aset-aset milik Candra tersebut dengan cara melakukan gugatan. "Dan kami tidak akan membiarkan barang yang sudah jadi barang milik negara kembali lagi kepada para koruptor. Tidak akan kami biarkan. Karena yang kami baca seperti itu. Masih ada upaya-upaya dari pihak Can-

dra untuk mengklaim kembali barang-barangnya yang sudah dirampas negara. Caranya dia dengan gugatan ini," katanya.

"Tidak hanya meladeni, lantaran adanya gugatan itu menurutnya Kejari Klungkung kembali mempelajari kasus Candra untuk kemungkinan akan kembali melanjutkannya. Bahkan, pihaknya mengancam tidak akan membiarkan orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut lolos dalam jeratan hukum. "Jadi siapa pun yang terkait di situ, tidak akan kami biarkan lolos. Kalau ada indikasi-indikasi pada saat zaman Pak Candra itu ada pihak-pihak yang bekerja sama menyamarkan harta benda yang patut dicurigai berasal dari tindak pidana maka dia tidak boleh lolos dari pertanggungjawaban pidana," terangnya

Lebih lanjut pihaknya mengungkapkan telah menargetkan akan mengeksekusi 10 bidang tanah dan bangunan milik mantan Bupati Klungkung, I Wayan Candra yang dirampas negara atas kasus korupsi, gratifikasi dan pencucian uang terkait pembangunan Dermaga Gunaksa di tahun 2019. "Besok (hari ini, Red) jadwal persidangannya dengan agenda Sidang Pembuktian Dokumen," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, 10 dari 51 bidang tanah beserta bangunan milik mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra yang dirampas negara atas kasus korupsi, gratifikasi dan pencucian uang terkait pembangunan Dermaga Gunaksa kini sedang dalam pengajuan proses lelang oleh Kejaksaan Negeri Klungkung. Sementara sisanya belum dapat diproses untuk dilelang lantaran batas-batas lahan yang disita negara tersebut belum jelas (baca juga grafis). (ayu/dot)

ASET YANG DISITA DARI WAYAN CANDRA:

- 10 bidang tanah dan bangunan
- Tanah seluas 9.450 meter persegi di Desa Bunga Mekar
- Tanah 10 ribu meter persegi di Desa Ped
- Tanah seluas 850 meter persegi di Desa Tojan
- Tanah seluas 14.200 meter persegi di Desa Dawan Kaler
- Tanah seluas 35 meter persegi beserta bangunannya di Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat
- Tanah seluas 12 meter persegi beserta bangunannya di Denpasar Barat
- Tanah seluas 47 meter persegi beserta bangunannya di Desa Dauh Puri Kauh
- Rumah di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra.

Edisi : Kamis, 11 April 2019

Hal : 12



Radar Bali

ASET

Penghitungan Aset IKM Celuk Belum Rampung

GIANYAR - Gedung Industri Kecil Menengah (IKM) di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, masih dibiarkan mangkrak. Gedung tersebut sempat dibongkar oleh sub kontraktornya karena belum membayar ongkos. Rencananya dihitung jumlah aset Pemkab. Akan tetapi, hingga kini penghitungan belum rampung.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Bappeda) Pemkab Gianyar, I Gede Widarma Suharta menyatakan hasil penghitungan dari konsultan pengawas belum diterima hingga saat ini. "Belum saya terima hasilnya, mungkin masih berproses," ujar Widarma yang juga Pelaksana Tugas Asisten II Setda Gianyar ini, kemarin (10/4).

Penghitungan dilakukan untuk memastikan sebanyak 77 persen dari 88 persen aset milik Pemkab Gianyar. Penghitungan dilakukan supaya jelas, bagian barang mana saja yang milik Pemkab. Itu karena pihak sub kontraktor yang mengeluh tidak dibayar bisa mengambil kelebihan proyek mereka. "Mudah-mudahan segera rampung agar bisa dipastikan 77 persen aset dari pada bangunan itu," ucapnya.

Apabila penghitungan ini berjalan cepat, maka proyek mangkrak itu bisa dilanjutkan lagi tahun 2019. Apalagi Pemkab Gianyar sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 928 juta pada APBD induk 2019 untuk melanjutkan pembangunan proyek yang tidak rampung pada 2018 itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pekerja melakukan pembongkaran gedung Industri Kecil Menengah (IKM) pada Senin lalu (25/3). Genteng yang sudah dipasang dicopoti karena pihak sub kontraktor mengeluh genteng mereka belum dibayar. **(dra/dot)**

Edisi : Kamis, 11, April, 2019

Hal : 7



Diduga, Kejari Salah Sita 9 Aset

★ Kerabat Mantan Bupati Wayan Candra Layangkan Gugatan

SEMARAPURA, NusaBali

I Nengah Nata Wisnaya dan I Ketut Rugeg, warga Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Klungkung, yang notabene kerabat mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra, mengajukan gugatan terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung. Karena sembilan aset atas milik Wisnaya dan Rugeg turut menjadi barang sitaan Kejari Klungkung.

Agenda sidang perdata dengan pembuktian saksi dan dokumen digelar di Pengadilan Negeri (PN) Semarapura, Klungkung, Kamis (11/4) siang. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Kukuh Kurniawan, dengan anggota Ni Nyoman Mei Melianawati dan Andri Dewantara.

Dari penggugat dihadiri kuasa hukumnya Teger Bangun, dan tergugat I (Kejaksaan Negeri Klungkung) dihadiri Kasi Datun Cokorda Indrasunu, tergugat II (Wayan Candra) dihadiri kuasa hukumnya, Nurlian.

Dalam sidang, Kejari Klungkung menghadirkan dua saksi dari intern Kejari Klungkung yakni staf Kejari Klungkung I Wayan Winartha. Dalam perkara sidang I Wayan Candra, Wayan Winartha sebagai penjaga tahanan dan diminta sebagai saksi dalam penandatanganan berita acara penyitaan aset dari perkara

korupsi pengadaan lahan Dermaga Gunaksa. Selain itu, dihadirkan Kadek Wiradmaja, Kasi Pidsus Kejari Klungkung.

Karena saksi yang dihadirkan dari intern Kejari Klungkung, hal ini membuat pihak dari penggugat merasa keberatan. "Kami mengajukan keberatan," ujar Teger Bangun kepada majelis hakim.

Dalam fakta persidangan, disebutkan ada empat aset atas nama Nengah Nata yang ketika itu disita oleh Kejari Klungkung. Aset itu di wilayah Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, dan Desa Bungamekar serta Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida. Namun diakui oleh saksi, ketika itu yang disita hanya berupa foto copy sertifikat.

Selain itu, saksi II (Wiradmaja) dicecar berbagai pertanyaan, tentang teknis dan prosedur dalam penyitaan aset. Kemudian sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa (23/4), dengan agenda pemeriksaan setempat di Nusa Penida.

Ditemui usai sidang, Teger Bangun mengatakan gugatan dari kliennya tersebut sudah dilayangkan setelah ada putusan dari MA, sejak tahun 2017. Karena dalam hal ini Kejaksaan menyita beberapa aset terkait kasus korupsi pengadaan lahan Dermaga

Gunaksa, atas sertifikat I Nengah Nata Wisnaya dan I Ketut Rugeg, yang merupakan kerabat Wayan Candra, termasuk aset tanah Puri Cempaka yang bersertifikat Ketut Rugeg. "Dari kedua klien kami itu ada sembilan objek aset yang disita, yakni Nengah Nata empat objek dan Ketut Rugeg lima objek," ujarnya.

Lebih lanjut pengacara asal Bogor, Jawa Barat ini mengatakan, dulu kliennya berpikir positif, sempat dikira aset yang disita untuk urusan penyelidikan tersebut, akan dikembalikan setelah proses pidana selesai. Akan tetapi aset itu tidak dikembalikan, sehingga ada indikasi kejaksaan salah menyita aset.

Gugatan terhadap Kejari Klungkung ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar. Namun hal ini tidak diterima karena objek gugatan berada di Klungkung. Pihaknya lalu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarapura, dan sempat tidak diterima. Setelah banding ke Pengadilan Tinggi, turun perkara ini persidangannya memang harusnya di PN Semarapura. Dalam kasus ini,

ia juga menggugat terpidana I Wayan Candra sebagai tergugat II. Karena mantan Bupati Klungkung telah lalai dan mengakui aset dimaksud adalah hak milik orang lain. **wan**



Diduga, Kejari Salah Sita 9 Aset

★ Kerabat Mantan Bupati Wayan Candra Layangkan Gugatan

SEMARAPURA, NusaBali

I Nengah Nata Wisnaya dan I Ketut Rugeg, warga Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Klungkung, yang notabene kerabat mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra, mengajukan gugatan terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung. Karena sembilan aset atas milik Wisnaya dan Rugeg turut menjadi barang sitaan Kejari Klungkung.

Agenda sidang perdata dengan pembuktian saksi dan dokumen digelar di Pengadilan Negeri (PN) Semarapura, Klungkung, Kamis (11/4) siang. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Kukuh Kurniawan, dengan anggota Ni Nyoman Mei Melianawati dan Andri Dewantara.

Dari penggugat dihadiri kuasa hukumnya Teger Bangun, dan tergugat I (Kejaksaan Negeri Klungkung) dihadiri Kasi Datun Cokorda Indrasunu, tergugat II (Wayan Candra) dihadiri kuasa hukumnya, Nurlian.

Dalam sidang, Kejari Klungkung menghadirkan dua saksi dari intern Kejari Klungkung yakni staf Kejari Klungkung I Wayan Winartha. Dalam perkara sidang I Wayan Candra, Wayan Winartha sebagai penjaga tahanan dan diminta sebagai saksi dalam penandatanganan berita acara penyitaan aset dari perkara

korupsi pengadaan lahan Dermaga Gunaksa. Selain itu, dihadirkan Kadek Wiradmaja, Kasi Pidsus Kejari Klungkung.

Karena saksi yang dihadirkan dari intern Kejari Klungkung, hal ini membuat pihak dari penggugat merasa keberatan. "Kami mengajukan keberatan," ujar Teger Bangun kepada majelis hakim.

Dalam fakta persidangan, disebutkan ada empat aset atas nama Nengah Nata yang ketika itu disita oleh Kejari Klungkung. Aset itu di wilayah Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, dan Desa Bungamekar serta Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida. Namun diakui oleh saksi, ketika itu yang disita hanya berupa foto copy sertifikat.

Selain itu, saksi II (Wiradmaja) dicecar berbagai pertanyaan, tentang teknis dan prosedur dalam penyitaan aset. Kemudian sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa (23/4), dengan agenda pemeriksaan setempat di Nusa Penida.

Ditemui usai sidang, Teger Bangun mengatakan gugatan dari kliennya tersebut sudah dilayangkan setelah ada putusan dari MA, sejak tahun 2017. Karena dalam hal ini Kejaksaan menyita beberapa aset terkait kasus korupsi pengadaan lahan Dermaga

Gunaksa, atas sertifikat I Nengah Nata Wisnaya dan I Ketut Rugeg, yang merupakan kerabat Wayan Candra, termasuk aset tanah Puri Cempaka yang bersertifikat Ketut Rugeg. "Dari kedua klien kami itu ada sembilan objek aset yang disita, yakni Nengah Nata empat objek dan Ketut Rugeg lima objek," ujarnya.

Lebih lanjut pengacara asal Bogor, Jawa Barat ini mengatakan, dulu kliennya berpikir positif, sempat dikira aset yang disita untuk urusan penyelidikan tersebut, akan dikembalikan setelah proses pidana selesai. Akan tetapi aset itu tidak dikembalikan, sehingga ada indikasi kejaksaan salah menyita aset.

Gugatan terhadap Kejari Klungkung ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar. Namun hal ini tidak diterima karena objek gugatan berada di Klungkung. Pihaknya lalu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarapura, dan sempat tidak diterima. Setelah banding ke Pengadilan Tinggi, turun perkara ini persidangannya memang harusnya di PN Semarapura. Dalam kasus ini,

ia juga menggugat terpidana I Wayan Candra sebagai tergugat II. Karena mantan Bupati Klungkung telah lalai dan mengakui aset dimaksud adalah hak milik orang lain. **wan**



Made Urip Gelontorkan "Vertikal Dryer" Senilai Rp 1 Miliar Perjuangkan Nasib Petani dan Krama Subak di Bali

USAI menyerahkan bantuan vertikal *dryer* (mesin pengering padi) di Subak Bengkel, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Tabanan berkapasitas 10 ton senilai Rp 1,6 miliar, kini giliran Kelompok Tani Warna Merta di Desa Mambang, Selemadeg Timur, Tabanan, Selasa (9/4) lalu digelontorkan bantuan serupa, berkapasitas 6 ton senilai Rp 1 miliar oleh anggota Komisi IV DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs. I Made Urip, M.Si. Bantuan tersebut diresmikan secara simbolis oleh wakil rakyat sejuta traktor itu bersama anggota DPRD Tabanan Wayan Eddy Nugraha Giri, S.Sos., M.M. yang juga Caleg DPRD Tabanan dapil Kediri dan Marga dari PDI Perjuangan beserta jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Bali dan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, Camat Selemadeg Timur, Perbekel Desa Mambang serta Bendesa Adat Mambang Gede disaksikan ratusan petani dan *krama* subak setempat.

Ketua LUPM Warna Merta, I Made Tarka Suta, S.Sn., mengakui sengaja mengundangi Made Urip saat *memakuh* dan *melapas* bangunan dan mesin vertikal *dryer* karena satu-satunya wakil rakyat yang terbukti memperjuangkan nasib petani dan *krama* subak di seluruh Bali. Salah satunya, bantuan berupa bangunan dan mesin pengering padi atau gabah ini. Karena itu, merasa sangat bersyukur diberikan bantuan bangunan yang dilengkapi dengan mesin vertikal *dryer*. Bangunan dapat diselesaikan sekitar 15 Desember 2018 yang dikerjakan sejak 19 Oktober 2018. Untuk pemasangan mesin mulai 18 Desember 2018. "Bantuan ini peran serta dari Pak Made Urip yang sudah membantu aspirasi kelompok petani. Kita ucapkan terima kasih atas bantuannya dan siap mendukung Pak Urip periode berikut," bebernya.

Sementara itu, Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura I Nyoman Sunarta mewakili Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Bali menegaskan, demi petani Made



DIRESMIKAN - Anggota Komisi IV DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan Drs. I Made Urip, M.Si. saat meresmikan bantuan bangunan dan vertikal *dryer* Kelompok Tani Warna Merta di Desa Mambang, Selemadeg Timur, Tabanan, Selasa (9/4).

Urip memperjuangkan bantuan ini sebagai wujud keberpihakan petani dengan seribu *dryer* seluruh Indonesia. Salah satunya bangunan dan vertikal *dryer* ini terwujud berkat arahan dari Made Urip di tingkat pusat sebagai DPR-RI-nya petani. "Bapak ini memang khusus di pertanian yang saat kampanye semua diwujudkan, termasuk traktor yang banyak dibantu. Karena itu, bantuan ini harap digunakan dengan baik agar Pak Urip tidak malu memberikan bantuan ini," tandasnya.

Bendesa Adat Mambang Gede Wayan Gunadi, B.A., S.Sos. yang mewakili *krama* adat khusus kelompok tani mengucapkan terima kasih atas bantuan pusat yang diperjuangkan Made Urip. "Pak Urip sudah terbukti berkomitmen dan berpihak terhadap petani. Karena itu kami siap mendukung kelima kalinya maju ke DPR-RI. Karena figurnya sangat bersaja dan sangat memperhatikan para petani yang juga terbukti adanya bantuan sejuta traktor di seluruh Bali. Karena itu, kita kembali memberi mandat agar duduk kembali menjadi wakil rakyat di DPR-RI, karena sangat merasakan perjuangan Pak Urip khususnya bantuan untuk kelompok tani,"

imbuhnya.

Sementara itu, Made Urip mengaku sangat bangga saat kegiatan reses bisa melihat perkembangan kelompok tani mewujudkan *dryer* yang sudah bisa digunakan dan bermamfaat bagi *krama* subak di Desa Mambang. "Melihat hasil panen khususnya musim hujan sulit mengeringkan gabahnya, sehingga harganya jatuh. Karena itu lahir kebijakan mengangkat hasil panen, agar bisa bermanfaat dengan bantuan program alsintan termasuk *dryer*," jelas anggota DPR-RI empat periode ini.

Bahkan, Ketua DPP PDI Perjuangan yang ditugaskan kelima kalinya maju sebagai Caleg DPR-RI Dapil Bali nomor urut 1 dari PDI Perjuangan itu sebelumnya sudah sempat meresmikan vertikal *dryer* di Desa Bengkel dengan kapasitas yang lebih besar. "Saya berharap para petani yang mendapatkan bantuan supaya digunakan dengan baik, karena ada evaluasi dan monitoring dari pusat apakah bantuan sudah jalan apa tidak, sehingga harus dijaga betul dan terus mendapat pembinaan. Jika berjalan dengan baik bisa memacu semangat, agar kelompok lain juga dapat bantuan seperti ini," tutup anggota Bangar MPR-RI itu. (ad439)

Edisi : Kamis, 11 April, 2019

Hal : 4



dari Badung untuk Gianyar Rp 30 M Lebih Dana Hibah

Tahap Pertama Diserahkan Rp 18 Miliar ✓

PEMERINTAH Kabupaten Badung kembali menyerahkan dana hibah, kali ini sebesar Rp 30 miliar lebih dana hibah dialokasikan untuk Kabupaten Gianyar. Penyerahan tahap pertama diserahkan sebesar Rp 18 miliar oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bertempat di Wantilan Pura Tirta Empul Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring, Gianyar, Rabu (10/4) kemarin.

Kehadiran Bupati Giri Prasta disambut antusias oleh masyarakat Gianyar, diiringi dengan tari Baris dan tari Kecak. Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, anggota DPRD Provinsi Bali Nyoman Partha dan Kadek Diana, Ketua DPRD Kabupaten Gianyar

I Wayan Tagel Winarta, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra dengan Wakil Bupati Gianyar A.A. Mayun beserta pimpinan forum Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar, Kabag Humas Setda Badung Putu Ngurah Thomas Yuniartha, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara, Kepala Bagian Hukum Setda Badung I Nyoman Budi Argawa, dan Kepala BPKAD Badung I Ketut Suyasa.

Bupati Giri Prasta dalam sambutannya mengatakan penyerahan dana hibah ini merupakan program "Angelus Bhwana" yang bermakna "Badung Berbagi dari Badung untuk Bali". Sudah menjadi komitmennya sejak awal untuk meringankan beban masyarakat umat sedharma

di dalam melestarikan dan menjaga adat, tradisi, seni dan budaya Bali, bantuan hibah ini sebagai bentuk sayang dirinya terhadap sesama. "Di sinilah kami hadir bersama Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk meringankan beban masyarakat, saya kira sikap positif ini bisa kita lakukan bersama-sama. Ke depan pun kita harus bersatu padu membangun Bali ini. Kami memiliki konsep semakin banyak yang akan kita ajak bekerja semakin ringan beban *krama* Bali ini. Karena itu saya mengajak semeton, tokoh-tokoh *krama* Bali mari kita membangun, menjaga dan melestarikan pulau dewata yang kita cintai ini," ujar Bupati Giri Prasta.

Sementara itu, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra menyampaikan

ucapan terima kasih kepada Bupati Badung mewakili segenap masyarakat Gianyar atas bantuannya berupa dana hibah untuk membangun Kabupaten Gianyar dari Badung. Bupati Gianyar berjanji akan mengawasi penuh bantuan ini, sehingga pemanfaatannya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bermasalah nantinya. Untuk penerimaan dana hibah tahap pertama ini diterima oleh para bendesa 31 pakraman dari 3 kecamatan yaitu Tegallalang sebesar Rp 3,150 miliar, Payangan Rp 9,9 miliar dan Tampaksiring Rp 4,950 miliar, sedangkan pada tahap kedua akan diserahkan dana sebesar Rp 12,5 miliar untuk Kecamatan Sukawati, Ubud, Blahbatuh dan Gianyar. (ad449)



Wantilan Desa Diproyeksi Jadi Balinese Culture Meeting Point

NEGARA, NusaBali

Program Wifi gratis di seluruh Bali menuju 'Bali Smart Island' diluncurkan secara resmi Gubernur Wayan Koster di Wantilan Pura Puseh Desa Adat Dauh Waru, Kecamatan Jembrana, Rabu (10/4) sore. Ditargetkan tahun 2020 mendatang sudah terpa-

sang 4.157 akses poin Wifi gratis se-Bali. Gubernur Koster ingin wantilan desa adat nantinya menjadi 'Balinese Culture Meeting Point'.

Acara launching program Wifi gratis se-Bali di Wantilan Pura Puseh

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Desa Adat Dauh Waru, Rabu sore pukul 15.00 Wita, dihadiri ribuan peserta yang terdiri dari kalangan bendesa adat, para perbekel, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemuda. Peluncuran program Wifi gratis ditandai penekanan sirine yang dilakukan Gubernur Koster bersama Bupati Jembrana I Putu Artha, Wabup Jembrana I Made Kembang Hartawan, Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa, dan unsur Forkopimda Jembrana.

Gubernur Koster menyatakan, penyediaan Wifi gratis diberikan kepada seluruh desa adat di Bali. Melalui layanan internet gratis yang dipasang di masing-masing wantilan desa adat ini, pihaknya mengharapkan peningkatan kualitas SDM. Selain itu, wantilan desa adat nantinya bisa menjadi 'Balinese Culture Meeting Point'. Artinya, wantilan desa adat dimanfaatkan menjadi berbagai pusat kegiatan, baik pengembangan kebudayaan, kehidupan sosial, maupun ekonomi.

"Di Bali ada 1.493 desa adat, semuanya akan dapat layanan internet gratis. Selain itu, sekolah, Puskesmas, dan destinasi wisata juga semua dapat akses internet lebih mudah untuk keperluan banyak hal yang bermanfaat," tandas Koster seraya mengaku sudah menyiapkan SOP menyangkut layanan Wifi gratis ini, agar tidak disalah-

gunakan untuk mencari hal-hal yang bersifat negatif.

Menurut Koster, penyediaan Wifi gratis menuju 'Bali Smart Island' ini juga dijalankan untuk integritas kesatuan wilayah. Melalui layanan internet gratis di desa adat ini, juga bisa menjadi akses untuk memperluas pemasaran produk-produk lokal di masing-masing desa. Selain itu, juga memperkuat kepariwisataan, budaya, kesehatan, dan pengetahuan sesuai dengan potensi lokal dan wawasan global yang dimiliki.

Launching layanan internet gratis ini, kata Koster, sekaligus momentum memulai kreativitas dan inovasi dalam dinamika perubahan yang begitu cepat, tanpa melupakan akar budaya Bali sebagai spirit dalam mewujudkan Krama Bali Sejahtera. "Bali Smart Island ini kami harapkan dimanfaatkan seluruh komponen masyarakat untuk memperoleh informasi yang positif dan berguna sebagai referensi pengetahuan dalam memperkuat karakter budaya Bali secara umum," papar Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Sementara, Kadis Kominfo dan Statistik Provinsi Bali, Nyoman Sujaya, dalam sambutannya mengatakan penyediaan layanan internet gratis ini sudah dimulai sejak November 2018. Dari target 180

akses poin layanan internet gratis tahun 2018, sudah terealisasi 311 akses poin. Sedangkan di tahun 2019, ditargetkan pemasangan 1.825 akses poin Wifi gratis, dengan lokasi penempatan di wantilan desa adat sebanyak 1.371 akses poin, Puskesmas (107 akses poin), objek wisata seba (203 akses poin), SMA/SMK/SLB (132 akses poin), dan public area (12 akses poin). Hingga April ini, sudah terpasang 640 akses poin atau 35,07 persen dari total target 1.825 terpasang tahun 2019. "Diharapkan tahun ini semua direalisasikan sesuai target sasaran," ujar Sujaya.

Menurut Sujaya, berdasarkan jumlah desa adat, Puskesmas, sekolah dari SD hingga SMA, dan bertambahnya objek wisata potensial se-Bali, sampai tahun 2020 depan ditarget pemasangan Wifi gratis sebanyak 4.157 akses poin. Khusus di Jembrana, pada tahun 2018 sudah mendapat 25 akses poin Wifi gratis, sementara pada 2019 dapat jatah 89 akses poin, dan tahun 2020 mencapai 209 akses poin.

Anggaran pengadaan Wifi gratis ini, kata Sujaya, berasal dari belanja langsung. Rinciannya, pengadaan Wifi gratis tahun 2018 dengan anggaran Rp 165 juta, sementara untuk tahun 2019 dianggarkan Rp 10,18 miliar. "Anggaran ini dapat bertambah sejalan dengan kemampuan penyiapan infrastruktur serat optic ke

seluruh pelosok pedesaan di Bali," katanya.

Sementara itu, Bupati Putu Artha mengaku sangat mengapresiasi berbagai program Gubernur Koster beserta perhatiannya terhadap Jembrana. Termasuk soal program Wifi gratis ini. Menurut Bupati Artha, pihaknya sempat mengusulkan pengadaan 89 akses poin Wifi gratis. Namun, di luar dugaan Gubernur Koster memastikan akan menambahkan lagi 200 akses poin Wifi gratis, sehingga Jembrana total akan diberikan 289 akses poin.

"Tentu program ini sangat bagus. Selain dapat meningkatkan pengetahuan dan mengurangi kesenjangan digital masyarakat, pemerataan infrastruktur telekomunikasi dan internet juga dapat meningkatkan kualitas SDM krama Bali," tegas politisi PDIP yang sudah dua periode menjabat Bupati Jembrana ini.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan Wifi gratis ini, Bupati Artha mengharapkan peran serta masyarakat dan jajarannya, agar benar-benar menggunakan dan mensosialisasikannya dengan baik, sehingga dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas SDM. Masyarakat juga diminta menjaga dengan baik fasilitas yang disediakan. "Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya dan ikut menjaga," ajak Bupati Artha. @ode

Edisi : Kamis, 11 April, 2019

Hal : 1 dan 15